

Dr. Eka Susanti, M.Pd
Toni Nasution, M.Pd

Pendidikan PANCASILA



Editor :
Parida Harahap, M.Si
Syafri Fadilah Marpaung, M.Pd



PENDIDIKAN PANCASILA

Dr. Eka Susanti, M.Pd
Toni Nasution, M.Pd

Editor
Parida Harahap, M.Si
Syafri Fadillah Marpaung, M.Pd



CV. Widya Puspita
Jln. Keadilan/ Cemara, Lorong II Barat No. 57 Sampali Medan
CP: 081397477666 – 081361060465
Email: cv.widyapuspita@gmail.com

PENDIDIKAN PANCASILA

Oleh:

Dr. Eka Susanti, M.Pd

Toni Nasution, M.Pd

Editor:

Parida Harahap, M.Si

Syafri Fadillah Marpaung, M.Pd

Desain Sampul :

PUSDIKRA Advertising

Layout:

Oda Kinata Banurea

Desain:

Dhanu Nugroho Susanto

Diterbitkan Oleh :

CV. Widya Puspita

Jln. Keadilan/ Cemara, Lorong II Barat No. 57 Sampali Medan

CP: 081397477666 – 081361699291 - 081361060465

Email: cv.widyapuspita@gmail.com

Copyright © 2018 - CV. Widya Puspita, Medan



Cetakan Pertama Agustus 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Mengutip Sebagian Atau Seluruh Atau Seluruh Isi Buku Ini Dengan
Cara Apapun, Termasuk Dengan Cara Penggunaan Mesin Foto Copi, Tanpa
Izin Sah Dari Penerbit

ISBN: 978-602-52819-1-4

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	v
PENDAHULUAN -----	1
BAB I	
RUANG LINGKUP PENDIDIKAN PANCASILA ~~~~~	3
A. Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila -----	5
B. Alasan Perlunya Pendidikan Pancasila -----	16
C. Pengertian Pancasila -----	22
D. Latar Belakang Pendidikan Pancasila -----	36
E. Tujuan Pendidikan Pancasila -----	46
BAB II	
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA ~~~~~	52
A. Konsepsi Sejarah Perjuangan Bangsa -----	52
B. Zaman Kerajaan -----	55
C. Zaman Penjajahan dan Kebangkitan Nasional -----	75
BAB III	
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA ~~~~~	108
A. Konsepsi Sejarah Perjuangan-----	108
B. Sejarah Dari Berbagai Sudut Pandang -----	114
C. Perdebatan Kesejarahan tentang Lahirnya Pancasila -----	124
D. Sejarah Pergerakan Indonesia, Mengawali Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara -----	135
E. Perumusan Pancasila, Dasar Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 -----	142
BAB IV	
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL -----	153
A. Latar belakang -----	153
B. Pengertian Ideologi dan Dimensi-dimensinya -----	155

C. Peranan Ideologi dalam Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara -----	157
D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka-----	159
E. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lainnya	161
F. Hambatan dan Tantangan dalam berideologi Pancasila ----	174
G. Refleksi Kritis Terhadap Ideologi -----	177
BAB V	
DEMOKRASI PANCASILA -----	179
A. Apa itu Demokrasi -----	179
B. Konsep Dasar Demokrasi -----	181
C. Macam-macam Demokrasi-----	186
D. Ciri-ciri Demokrasi -----	187
E. Prinsip Demokrasi -----	188
F. Kelebihan dan kelemahan Sistem Demokrasi -----	189
G. Membangun Demokrasi-----	190
H. Negara-negara Penganut Demokrasi-----	195
BAB VI	
KONSEP DASAR AGAMA DAN NEGARA -----	208
A. Konsep Dasar Agama -----	208
B. Bentuk Realisasi konsep Agama di Indonesia -----	210
C. Konsep Dasar Negara -----	210
D. Perlunya Pengetahuan Mendalam tentang konsep dasar Agama dan Negara-----	212
BAB VII	
SEJARAH MAKNA LAMBANG GARUDA PANCASILA -----	216
A. Sejarah -----	216
B. Perancang Garuda Pancasila-----	218
BAB VIII	
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL -----	221
A. Pengertian Paradigma -----	221

B. Pancasila Sebagai Orientasi dan Kerangka Pembangunan Nasional-----	223
C. Pancasila Sebagai Paradigma dalam berbagai Kehidupan---	227
Lagu-Lagu Kebangsaan-----	235
Daftar Pustaka -----	247
Tentang Penulis ~~~~~	250

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas Rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan Diktat Pendidikan Pancasila ini. Serta shalawat dan salam yang mana semoga kita semua menjadi ummat yang mendapat syafaat Nabi Muhammad Saw nantinya di hari kelak amin. Terkhusus kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu berdo'a untuk selalu mengukir karya dan prestasi untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk ummat dan bangsa dan Agama. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah supaya para mahasiswa dapat mengetahui berbagai literatur materi berbasis Pendidikan Nilai dan wawasan Pancasila yang diharapkan menambah khasanah keilmuan mahasiswa, terlepas apapun jurusan yang mereka tempuh.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Editor Secara khusus, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Buku yang tersusun sekian lama ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Medan, 2019

Penulis

PENDAHULUAN

Perkembangan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara tercatat dalam perjalanan sejarah yang amat panjang untuk membangun negara yang berkemajuan dalam rangka melahirkan suatu generasi emas bangsa di masa mendatang. Bahwa Indonesia sebagai negara yang berideologikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik indonesia tertanam dalam jiwa pancasila. Kesadaran etik yang merupakan kesadaran relasional akan tumbuh subur bagi warga masyarakat indonesia ketika nilai-nilai pancasila itu diyakini kebenarannya, kesadaran etik juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moralpancasila itu dapat di laksanakan kedalam norma-norma yang diberlakukan di indonesia.

Secara hukum Indonesia memang sudah merdeka, namun apabila secara individu hal ini belum terbukti karena masih banyak penyimpangan yang kita tidak sadari bahkan kerap kali dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan rakyat yang adil dan makmur lenyap di telan kepentingan politik pribadi.

Pancasila bukan hanya pedoman yang berlangsung bersifat normatif ataupun praktis melainkan suatu sistem nilai-nilai etika

yang merupakan sumber hukum baik meliputi norma moral maupun norma hukum. Untuk itu semoga buku ini mampu menambah khasanah keilmuan pembaca serta membuka wacana berpikir kita untuk selalu meningkatkan militansi ideologi kita sebagai warga masyarakat Indonesia.

BAB I

RUANG LINGKUP PENDIDIKAN PANCASILA



Untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia

menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti pendidikan.

Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

Bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Tugas!

Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari informasi tentang:

1. *Pendidikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.*
2. *Pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda.*
3. *Alasan mendasar diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.*
4. *Buat resume mengenai ketiga hal tersebut sebagai laporan individual*

A. Konsep Dan Urgensi Pendidikan Pancasila

Anda tentu sudah mempelajari pendidikan Pancasila. Materi pendidikan Pancasila apa saja yang sudah Anda pelajari? Anda sudah pernah mengenal pendidikan budi pekerti, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), dan lain-lain. Namun, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah memperoleh pelajaran-pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut? Jawaban yang Anda ajukan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh:

1. Percaya kepada Tuhan dan toleran,
2. Gotong royong,
3. Musyawarah,
4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya.



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT INDONESIA!

Coba Anda perhatikan dengan seksama, pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas yang berkembang di lingkungan masyarakat! Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar? Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas bahwa gotong royong

didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu, dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut.

Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah? Ataukah Anda masih menemukan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sudah barang tentu perilaku seperti itu dapat dikategorikan perilaku yang tidak mensyukuri kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis), merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia, maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara.



Gotong royong sebagai salah satu nilai dalam Pancasila. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. (Sumber: sipolanmelihatawan.blogspot.com)

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergoresnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu,

perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila.

1. Masalah Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016, sebesar 74,6 % penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/instansi/perusahaan/dan lain-lain) yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.



Free rider, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut

(Sumber: <http://kp2kpngabang.blogspot.co.id/2013/09/jangan-menjadi-free-rider-di-atas-roda.html>)

2. Masalah Korupsi

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. *Transparency Internasional* (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia.



Unjuk rasa mahasiswa menentang korupsi
Sumber: www.beritalima.com

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari.

Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.

3. Masalah Lingkungan

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan, yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan.

Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila.



Gunung Sampah di Bantar Gebang

Sumber: <http://www.bekasibusiness.com/2015/01/29/tpst-bantar-gebang-antisipasi-longsor-dengan-jaga-kemiringan-tumpukan-sampah/>.

4. Masalah Disintegrasi Bangsa

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam

wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3).

5. Masalah Dekadensi Moral

Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat? Bagaimana caranya meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif? Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi Anda?

6. Masalah Narkoba

Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis, dilihat dari kaca mata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba.

Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba.

<http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/27/13/821215/sepanjang-2013-kasus-narkoba-meningkat>).

Bukankah hal ini mengancam generasi penerus bangsa? Apakah Anda tidak merasa prihatin terhadap peningkatan jumlah korban narkoba tersebut?

7. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan



ILUSTRASIKAN NERACA KEADILAN SEBAGAI PENGGANTI GAMBAR DI BAWAH INI, AGAK BERAT SEBELAH!



Simbol hukum

Sumber: kicauanpenaku.blogspot.com

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

8. Masalah Terorisme

Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa

kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama.

Dengan melihat permasalahan tersebut, tentu Anda mengerutkan dahi dan bertanya, apakah ada hal-hal positif yang dapat meningkatkan kebanggaan Anda sebagai bagian dari bangsa ini? Sudah barang tentu, hal-hal positif masih lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal negatif di negara Indonesia. Agar tidak tertarik dan cenderung subjektif, hanya memperhatikan hal-hal yang kurang baik dari bangsa ini, silakan Anda cari tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam melawan/mengatasi masalah-masalah tersebut!

Tugas!

Anda dipersilakan melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisasi kategori tokoh-tokoh (baik tokoh lokal, nasional, maupun internasional) sebagai berikut:

Tokoh Pejabat dan/atau Penggiat Anti korupsi (KPK, Polisi, Jaksa, LSM, dan sebagainya), Tokoh Pecinta Lingkungan, Tokoh Pejuang Integrasi Bangsa dalam era globalisasi, Tokoh Penggiat Moral/Karakter Bangsa, Tokoh Penggiat Anti narkoba, Tokoh Penegak Hukum yang adil, Tokoh Anti Terorisme. Anda diminta untuk menyerahkan daftar tokoh hasil diskusi kelompok tersebut kepada dosen.

Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut

dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) (Abdulgani, 1979: 14). Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson (1998), yaitu sebagai pembentuk *civic disposition* yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan *civic knowledge* dan *civic skills* mahasiswa. Lantas, apakah yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila?

Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum (MKWU) yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah

penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Misi

1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik (Sumber: Tim Dikti).

Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, empat pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors, 1996). Berdasarkan ke-empat pilar pendidikan tersebut, pilar ke-empat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan.

Anda dipersilakan untuk mencari informasi yang dapat memperkaya pemahaman Anda tentang pilar-pilar pembelajaran menurut UNESCO.

Tugas!

Anda dipersilakan untuk mempelajari dari berbagai sumber tentang pengertian dari pilar-pilar pembelajaran sebagai berikut:

1. *Learning to know*
2. *Learning to do*
3. *Learning to be*
4. *Learning to live together*

Kemudian, buatlah ringkasan untuk dilaporkan kepada dosen!

Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparaturnya maupun pemimpin bangsa, dikemudian hari dapat diminimalkan.

Tugas!

Anda dipersilakan untuk menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut.

Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diharapkan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok kemudian membuat laporan secara tertulis.

B. Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila

Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi mengingat jurusan/ program studi di perguruan tinggi sangat spesifik sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Namun, apabila Anda berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (*mainstream*) dalam berbagai kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selain itu, degradasi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup dimasyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati *fatsoen* politik dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan, banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa.

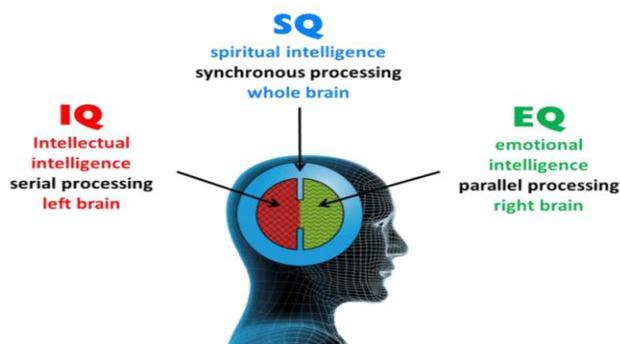
Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkuat modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain:

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri,
2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang,
3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional,
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan,
5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa,
6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,
7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.

Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa (meminjam istilah dari Kenichi Ohmae, 1995 yaitu, *the end of the nation-state*). Punahnya suatu negara dapat terjadi karena empat "I", yaitu industri, investasi, individu, dan informasi (Ohmae, 2002: xv). Agar lebih jelas, Anda dapat menggali informasi tentang ke-empat konsep tersebut untuk memperkaya wawasan Anda tentang penyebab punahnya suatu bangsa. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi juga ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Salah satu contoh terkenal dalam sejarah, ialah musnahnya bangsa Aztec di Meksiko yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju, tetapi punah dalam waktu singkat setelah kedatangan petualang dari Portugis agar anda memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan punahnya suatu bangsa, maka carilah informasinya melalui berbagai sumber!



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN TENTANG SQ, IQ, DAN EQ SEPERTI GAMBAR DI BAWAH INI!



The Psychology of Spiritual Intelligence

Sumber: sqi.co

Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Meskipun pada tataran implementasinya, mengalami pasang surut pemberlakuannya, tetapi sejatinya pendidikan Pancasila harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis.

Tugas!

Anda dipersilakan untuk mendiskusikan hal-hal berikut dengan teman sekelompok:

1. *Apakah yang dapat Anda pahami tentang pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan/program studi yang sedang ditempuh?*
2. *Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program Studi Anda?*
3. *Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Anda?*

Anda diminta membuat laporan secara tertulis kepada dosen!

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;

2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari nurani;
4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:

1. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem

pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).

Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan negara.

Tugas!

Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompok Anda hal-hal sebagai berikut:

- 1. mencari dari berbagai sumber tentang alasan pendidikan Pancasila diperlukan untuk negara Indonesia.*
- 2. menemukan alasan pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di perguruan tinggi.*
- 3. menunjukkan apa yang akan terjadi apabila pendidikan Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan Indonesia.*

Kemudian Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

C. Pengertian Pancasila

Kedudukan dan fungsi Pancasila secara ilmiah memiliki pengertian yang luas. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila antara lain sebagai dasar Negara, serta sebagai kepribadian bangsa. Dalam proses terjadinya Pancasila terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Permasalahan ini terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan pancasila. Pembahasan Pancasila ini dimulai dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa

sampai mendasar Negara bahkan sampai pada pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Fokus pembahasan Pancasila pada waktu orde lama, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda-beda tersebut harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya serta sejarah perumusan Pancasila itu secara objektif.

Untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila meliputi lingkup pengertian sebagai berikut :

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis
2. Pengertian Pancasila secara Historis
3. Pengertian Pancasila secara Terminologis (Kaelan, 2010 : 20)

Di bawah ini akan dijelaskan satu-persatu pengertian Pancasila dari tiga lingkup tersebut.

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Pembahasan asal kata istilah “Pancasila” beserta makna yang terkandung di dalamnya sangat perlu dilakukan sebelum kita membahas isi, arti, dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara. Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta (Kaelan, 2010: 21). Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikel yaitu : “*panca*” artinya “lima” “*syila*” vocal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”. “*syiila*” vocal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh”. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia

terutama bahasa Jawa diartka “*susila*” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis, kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “*Panca Syila*” dengan vocal i pendek yang memiliki makna lesikel “*berbatu sendi lima*” atau secara harfiah :”*dasar yang memiliki lima unsur*”. Adapun istilah “*Panca Syiila*” dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting (Yamin, 1960: 437).

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kita suci Tri Pitaka, yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu : Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah *Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila*.

Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus diataati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasila yang berisi lima larangan atau pantangan itu secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang memunuh.
- b. Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan, maksudnya dilarang mencuri.
- c. Janganlah berhubungan kelamin, maksudnya dilarang berzina.
- d. Janganlah berkata palsu, atau dilarang berdusta.
- e. Janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum-minuman keras.

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Budha, maka ajaran “Pancasila” Budhisme masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesusteraan nenek moyang kita zaman keemasan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan patih Gajah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca, yang selesai ditulis tahun 1365. Dalam sarga 53 bait ke-2 berbunyi sebagai berikut : *Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskar-bhisekaka karma*, yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa Kuno yang artinya tetap sama seperti yang terdapat dalam zaman Majapahit (Kaelan 2010: 22).

Pada zaman Majapahit hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha Mahayana dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu Budha tersebut *Dharmadyaksaring kasogatan*, ada pun untuk agama Syiwa disebut *Dharmadyaksaring kasyaiwan* (Slamet Mulyono, 1979 : 202). Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan lima larangan atau lima pantangan, yaitu dilarang:

- a. *Mateni*, artinya membunuh,
- b. *Maling*, artinya mencuri,
- c. *Madon*, artinya berzina
- d. *Mabok*, artinya meminum minuman keras atau menghisap candu,
- e. *Main*, artinya berjudi (Kaelan, 2010: 22-23)

Semua huruf dari lima ajaran moral tersebut diawali dengan huruf “M” atau dalam bahasa Jawa disebut “Ma”, oleh karena itu lima prinsip moral tersebut dinamakan “Ma lima” atau “M5”, yaitu lima larangan (Ismaun, 1981: 79).

2. Pengertian Pancasila secara Historis

Historis perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah yang dimaksud adalah tentang suatu rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah tiga orang pembicara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Di dalam sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945, Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar Negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar Negara tersebut, beliau memberi nama “Pancasila” yang artinya lima dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Adapun pidato asli beliau terkait dengan penamaan Pancasila adalah sebagai berikut :

....Saudara-saudara! “Dasar-dasar Negara” telah saya usulka, lima bilangannya. Inikah Panca Darma? Bukan! Nama Panca Dharma

tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indera. Apa lagi yang lima bilangannya?(Seorang yang hadir : Pendawa lima). Pedawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan e-Tuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita hli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi....(Tepuk tangan riuh) (Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1995: 81).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah "Pancasila", namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia disebut dengan istilah "Pancasila". Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka persiapan pembentukan rumusan dasar Negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Demikianlah riwayat singkat Pancasila baik dari segi istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar Negara yang

sah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Adapun secara terminologi historis, proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan ini Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar Negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Mr. Muhammad Yamin itu berisikan lima asaa dasar Negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan, sebagai berikut,

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat (Safroedin Bahar, dkk. (penyunting), 1995: 8-9)

Adapun penjelasan lebih rinci yang dikutip dari Risalah Sidang BPUPKI-PPKI tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan

Indonesia merdeka, sekarang-nationalisme lama dan baru dasar Negara Sriwijaya dan Majapahit-perubahan zaman dasar peradaban Indonesia-tradisi tata Negara yang *putus-etats national-etats patrimonies, etats puisances*- kesukaran mencari dasar asli cita-cita yang hancur di medan perjuangan, kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri.

2. Peri kemanusiaan

Kemajuan kemerdekaan-kemerdekaan akan menghidupkan kedaulatan Negara-anggota keluarga-dunia-status politik yang sempurna-menolak dominion status, *protectoraat*, mandate, atlantic Charter pasal 3-status Internasional yang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna.

3. Peri Ke-Tuhanan

Perdaban luhur-Ber-Tuhan-Dasar Negara berasal dari peradaban dan agama.

4. Peri Kerakyatan

Pemusyawaratan: Surat Asyasyura ayat 38-Kebaikan musyawarah-musyawarah dalam masyarakat dalam semasa khalif yang empat dan sesudah itu-musyawarah bersatu dengan dasar mufakat menurut adat-perpaduan adat dengan perintah agama.

Perwakilan: Dasar adat yang mengharuskan perwakilan-perwakilan sebagai ikatan masyarakat di seluruh Indonesia perwakilan sebagai dasar abadi bagi tata Negara.

Perwakilan sebagai dasar abadi bagi tata Negara.

Kebijaksanaan: rasionalisme-perubahan dalam adat dan masyarakat-Keinginan penyerahan-rasionalisme sebagai dinamika masyarakat.

5. Kesejahteraan Rakyat-Keadilan Sosial.

Kegembiraan dalam Negara baru-perubahan bagi Republik Rakyat Kesejahteraan (Selretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 8-9)

Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam Pembukaandari rancangan UUD tersebut tercantum lima asas dasar Negara yang rumusannya adalah sebagai berikut,

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya terdapat rumusan yang berbeda di antara rumusan dalam isi pidatonya dengan usulannya secara tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimakluminya.

b. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan usulan Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori – teori Negara sebagai berikut:

Teori Negara perseorangan (individualis), sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), Negara adalah masyarakat hokum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (*contract social*). Paham ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.

Paham Negara kelas (*clas theory*) atau teori golongan. Tokoh teori ini adalah Karl Marx, Engels, dan Lenin. Menurut paham ini negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai

persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian, atau anggotanya saling berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan organis. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan dasar filsafat Negara, Prof. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pendirian Negara nasional yang bersatu.
- b. Dianjurkan supaya para warga Negara takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.
- c. Dibentuk system badan permusyawaratan.
- d. Sistem tolong-menolong, system koperasi dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi.
- e. Negara Indonesia bersifat Negara Asia Timur Raya.

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Paerikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar Negara tersebut beliau mengajukan usul agar dasar Negara tersebut diberi nama "Pancasila", yang dikatakan oleh beliau bahwa istilah itu atas saran dari salah

seorang ahli bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nama seorang ahli bahasa tersebut. Usul mengenai nama “Pancasila” bagi dasar Negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI. Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa apabila kelima sila tersebut tidak disepakati dan terlalu luas, dapat diperas menjadi “Trisila” yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme”
2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat”
3. Ketuhanan yang Maha Esa.

Adapun jika dikehendaki “Trisila” tersebut masih bisa diperas lagi menjadi “Ekasila” atau sila yang intinya adalah “gotong-royong”. Penjelasan ini relevan dengan pidato asli beliau (Ir. Soekarno) sebagai mana tersebut dalam Risalah Sidang BPUPKI-PPKI sebagai berikut: *...Sebagai tadi telah saya katakakan; kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonrsia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! Semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong rotong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-royong!* (Tepuk tangan riuh rendah) (Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 1995: 82).

Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut diterbitkan dipublikasikan dan diberi judul “Lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah lahirnya Pancasila.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh *Dokuritsu Zyunbi Tioosakay* mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan”, yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagam Jakarta”. Di dalam Piagam Jakarta memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatua Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara sebagaimana lazimnya Negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal (Batang Tubuh UUD 1945).

UUD 1945 berisi 37 pasal, 1 aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan rambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI, mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi dan eksistensi Negara dan bangsa, maka terdapat rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut:

- a. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Dalam Konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut,

1. Ketuhan Yang Maha Esa

2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

b. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS)

Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

c. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas yang secara konstitusional sah dan benar adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan Nomor XX/MPRS/1966, dan Inpers Nomor 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa

pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Latar Belakang Pendidikan Pancasila

1. Latar Belakang Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Proses sejarah itu dimulai sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram sampai datangnya bangsa lain yang menjelajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri Negara kita dirumuskan, dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila (Kaelan, 2010:12).

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran

berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa.

Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Asal-usul nilai-nilai Pancasila tidak lain dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila. Dengan demikian, berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila.

Atas dasar pengertian dan alasan historis, maka sangat penting bagi generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Materi inilah yang dalam kurikulum internasional disebut *civic education*, yaitu mata kuliah yang membahas tentang *national philosophy* bangsa Indonesia. Hal ini Harus dipahami oleh seluruh generasi penerus bangsa, karena bangsa Indonesia secara historis memiliki kebudayaan, adat-istiadat serta nilai-nilai keagamaan yang secara historis melekat pada bangsa Indonesia.

Secara historis Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar Negara Indonesia merdeka. Pancasila yang akan dijadikan Dasar Negara tersebut, dalam proses perumusannya digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup masyarakat, kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Lebih lanjut,

pandangan hidup bangsa itu dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup Negara atau Dasar Negara.

Bukti atau fenomena historis yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan dijadikan dasar Negara dapat disimak dari peristiwa-peristiwa, ungkapan, atau pernyataan berikut ini (Soegita, 2002:1-2). Dalam pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Jumbi Choosakai*) tanggal 29 Mei 1945, DR. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka (*philosofische grondslag* dari Indonesia Merdeka). Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan sebagai berikut : *“Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan Negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun...”* (Naskah Persiapan UUD 1945).

RP. Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Muhammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945, antara lain mengatakan: *“Sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan Radjiman tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasar Indonesia Merdeka.....”* (Naskah Persiapan UUD 1945). Prof. Mr. Soepomo dalam pidato sidang Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945, antara lain mengatakan: *“soal yang kita bicarakan ialah bagaimana akan dasar-dasar Negara Indonesia Merdeka”* (Naskah Persiapan UUD 1945).

Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 juni 1945 dalam sidang-sidang penyelidik antara lain menyebutkan bahwa yang diminta oleh

Ketua Badan Penyelidik adalah agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka yaitu *Philosofische Grondslag* atau Dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka tersebut yakni Pancasila.

Di dalam “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” tercantum kalimat sebagai berikut. “... *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdsar kepada : Ketuhana, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” (Naskah Persiapan UUD 1945).

Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat: “... *maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia. Dengan, menetapkan UUd 1945 itu, maka Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar Negara, ternyata tidak secara otomatis Pancasila dapat dilaksanakan secara benar dan konsekuen. Di beberapa tempat terjadi berbagai macam pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan hidup lain yang secara bebas hidup dan berkembang di Negara Indonesia. Pandangan hidup lain itu berkembang menjadi sikap yang sangat mengutamakan kepentingan golongan atau daerah di atas kepentingan nasional. Peristiwa G 30 S/PKI Lubang Buaya pada tahun 1965, misalnya merupakan salah satu bukti pemberontakan yang ingin menyelewengkan Pancasila dan mengganti dengan ideologi lain yaitu paham komunis.

Sebab utama terjadinya penyelewengan ialah karena Pancasila yang merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bernegara. Memperhatikan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara yang mengikat seluruh warga Negara dan memperhatikan peristiwa historis terjadinya pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila, maka ada kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memahami, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Salah satu upaya untuk itu semua Pancasila harus disebarluaskan melalui pendidikan Pancasila itu sendiri.

2. Latar Belakang Kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat Internasional. Setiap bangsa memiliki

ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme mendasarkan ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx.

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas cultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemsyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai cultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri Negara seperti Ir. Soekarno, Mr. Muh. Yamin, Drs. Moh. Hatta, Prof. Soepomo serta para tokoh pendiri Negara lainnya.

Karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan Negara yang mendasarkan pandangan hidup, suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya berusaha mendalami secara dinamis dalam arti mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman.

Pancasila dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila-pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu. Bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur

bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan budaya tersebut melalui pendidikan Pancasila.

3. Latar Belakang Yuridis

Landasan Yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Meskipun secara eksplisit nama mata kuliah Pancasila tidak disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang disebutkan pada pasal 37 bahwa kurikulum pendidikan tinggi memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa, namun mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang mendidik warga Negara akan dasar filsafat negaranya.

Dengan dituangkannya rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung konsekuensi bahwa Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut.

Kirdi Dipoyudo mengatakan (1984:52): Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah Negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi sumber tertib Negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan Negara dalam segala bidang kehidupan.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar Negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia, atau sumber dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti Undang-undang dasar, ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan Peraturan daerah (Ketetapan No. III/MPR/2000). Apabila aturan-aturan itu dibuat berdasarkan ketentuan yang ada dan Pancasila atau UUD 1945 sebagai dasarnya, maka selain hal itu menjamin sifatnya yang resmi, dapat pula diharapkan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih jelas, pelaksanaannya teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Konkretisasi landasan yuridis pendidikan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembukaan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar Negara terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Konsekuensinya maka Pancasila merupakan pokok kaidah yang fundamental, peraturan hukum yang tertinggi, merupakan rangka, suasana, dasar, dan tujuan pendidikan.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa (1) setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (UUD 1945 hasil amendemen).

Pemerintah mengusahakan atas dasar kesepakatan atau consensus nasional yang didudukkan sebagai asas kerohanian atas dasar filsafat Negara Indonesia. Dilaksanakannya pendidikan Pancasila merupakan pelaksanaan amanat pokok pikiran keempat Pembukaan yang intinya mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Seperti diketahui bahwa Pancasila tidak lain adalah asas-asas moral atau budi pekerti rakyat yang dijadikan pandangan hidup, dan kemudian dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai warga Negara, kita wajib tunduk kepada hukum yang mengikat kita, termasuk mempelajari Pancasila yang merupakan dasar filsafat Negara, apalagi dengan adanya Ketetapan No. XVIII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara adalah mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan Negara. Tentunya ada keharusan untuk mengaktualisasikan dalam sikap dan perbuatan yang nyata dalam hidup sebagai bangsa yang bernegara. Pendidikan Pancasila adalah upaya membekali peserta didik untuk dapat

mengaktualisasikan Pancasila dasar filsafat Negara dalam sikap dan perbuatannya.

Secara operasional, Pendidikan Pancasila mempunyai dasar yuridis untuk diselenggarakan, yaitu USPN no. 2/1989 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional. Maka jelas dan tegaslah bahwa pendidikan Pancasila dan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila (di Perguruan Tinggi) telah memenuhi dasar/ landasan dan alasan yuridis yang kuat.

4. Latar Belakang Filosofis

Pancasila adalah dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka sudah menjadi keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara.

Secara filosofis, sebelum mendirikan Negara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan., hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu Negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok Negara), sehingga secara filosofis Negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologism demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara.

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat Negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk system peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hokum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Secara intrinsic nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa Indonesia. Nilai- nilai (tata nilai) itu tidak lain merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi/ bidang kehidupan suatu masyarakat/ bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia.

Tata nilai suatu bangsa dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, kondisi alam, dan cita-karsa manusianya. Oleh karena itu, lebih lanjut ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat Negara, etika, logika, dan sebagainya.

E. Tujuan Pendidikan Pancasila

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku

yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral (Kaelan, 2010: 15).

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual, penuh tanggung jawab sebagai seorang warga Negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan dilihat dari aspek iptek, etika atau pun kepatutan agama serta budaya.

Pancasila adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian **BHINEKA TUNGGAL IKA**. Objek materi filsafat adalah mempelajari segala hakikat sesuatu baik material konkrit dan abstrak. Pancasila mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah. Kedudukan pancasila sebagai Dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukannya sebagai kaidah Negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapaun termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum.

b. Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional.

Dalam ilmu hukum istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila.

c. Pancasila sebagai Pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri.

d. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia.

Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara oleh PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.

e. Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Merupakan sebuah tujuan bersama Bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

f. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa.

Bangsa Indonesia yang pluarilis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan Pemersatu Bangsa, hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengkoordinir semua perikehidupan yang berbhineka dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam rangka untuk menghasilkan peserta didik yang menjiwai nilai pancasila peserta didik diharapkan mampu berperilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan- perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia (Kaelan, 2010: 15).

Melalui Pendidikan Pancasila, warga Negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-

masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan Negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik). Selain itu pendidikan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, Negara, dan hubungan interasionalnya. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan penuh dengan paradoksal dan keterdugaan.

Kemampuan warganegara dari suatu Negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negaratersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warganegara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan wawasan dan kesadaran bernegara, cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara dan kewaspadaan nasional kepada para mahasiswa calon ilmuwan yang senantiasa mengkaji dan akan menguasai iptek dan seni, menjadi tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Kualitas warganegara

akan ditentukan teruma oleh keyakinan dan sikap hidup bermsyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan IPTEKS yang dipelajarinya.

Pendidikan IPTEK dan Seni di Perguruan Tinggidirancang dalam kurikulum suatu bidang studi yang memuat dasar- dasar keilmuan dan ketrampilan, mata kuliah keahlian dan perilaku berkarya, sesuai dengan disiplin ilmu yang diasuh. Isi kurikulum seperti itu perlu dibekali dengan dasar-dasar sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik untuk membekali pengetahuan, ketrampilan, serta efek turutan dari iptek dan seni yang didapatnya.

Generasi Education Humanities sebagai pembekalan dasar-dasar sikap, perilaku, di berbagai Negara diasuhkan berwujud:

- a. *History, Humanity, dan Phylosophy* di AS
- b. *Japanese History, Ethics, Phylosophy dan Science Religion* di Jepang
- c. *Philipino, Family Planing, taxation and land Reform, The Philipine New Constitution, dan study of Human Rights* di Philipina (Soegito, 2002:11).

Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut di atas, diandalkan pada Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya dasar dal ilmu Alamiah Dasar yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

BAB II

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

A. Konsepsi Sejarah Perjuangan Bangsa

Sejarah perjuangan bangsa dan semangat kebangsaan suatu bangsa akan selalu terus dipelajari, dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini akan dilakukan oleh bangsa manapun, karena apabila suatu bangsa tidak mengetahui sejarah bangsanya sendiri, maka bangsa tersebut akan kehilangan arah kehidupan menuju masa depan. Presiden Soekarno pernah menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawan (Sapriya, 2004: 69).

Dari pernyataan di atas, tersirat betapa pentingnya generasi-generasi sekarang ini mengetahui sejarah bangsanya. Oleh karena itu dalam pendidikan kewarganegaraan, sejarah perlu dibelajarkan dan dikaji secara kritis sedangkan semangat kebangsaan perlu dibelajarkan dan disegarkan karena dimensi ini akan mengalami pasang surut. Suatu praktek kehidupan masyarakat yang demokratis tidak diturunkan dengan sendirinya melainkan harus dipelajari melalui proses pendidikan.

Pentingnya pengetahuan sejarah bagi suatu bangsa tidak diragukan lagi. Namun ada hal lain yang lebih penting untuk kepentingan proses pembelajaran, yakni proses pembentukan peserta

didik agar menjadi warga Negara yang mengetahui sejarah bangsanya dan mau belajar dari sejarah. Pelaksanaan proses pembelajaran ini merupakan tugas kita bersama.

Dalam uraian berikut ini anda akan difasilitasi untuk menganalisis materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjelang hingga munculnya kesadaran berkehidupan sebagai suatu bangsa. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pergerakan rakyat pada akhir abad XIX dan awal Abad XX. Perjuangan ini dilakukan melalui organisasi kebangsaan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi bahkan politik. Selain itu, semangat kebangsaan yang lahir dan terus dipupuk pada masa decade sebelum kemerdekaan terutama pada saat - saat munculnya sikap kebangsaan diungkap dan dibahas tak terpisahkan dari kajian sejarah perjuangan bangsa.

Sedikitnya ada tiga pengertian secara harfiah: (1) istilah perjuangan identik dengan perkelahian untuk merebut sesuatu atau peperangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, (2) perjuangan berarti usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya, (3) dalam konteks politik, perjuangan berarti wujud interaksi sosial, termasuk persaingan, pelanggaran dan konflik (Sapriya, 2004: 74). Sedangkan konsep kebangsaan menunjukkan ciri-ciri yang menandai golongan bangsa (*nation*) atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu Negara. Paham yang mendasarkan diri pada perasaan kebangsaan, atau ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri disebut nasionalisme.

Termasuk dalam kategori manakah pengertian perjuangan bangsa Indonesia dalam konteks sejarah yang akan diuraikan di bawah ini? Apa dan bagaimana wujud semangat kebangsaan itu?

Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya anda ikuti uraian berikut ini.

Dua konsep, perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dalam proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah yang menunjukkan perjuangan dan semangat kebangsaan terjadi secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Hal yang perlu ada pembatasan adalah sejak kapan dimulainya perjuangan bangsa Indonesia dan munculnya semangat kebangsaan itu?

Mengingat terlalu luasnya perjuangan bangsa Indonesia, maka dalam pembahasan ini perjuangan bangsa Indonesia melalui pergerakan rakyat dan organisasi kemasyarakatan maupun politik untuk menjadi satu bangsa dan Negara yang merdeka. Apabila pembatasan ini yang dijadikan kriteria maka pembahasan sejarah perjuangan dimulai sejak munculnya kesadaran berbangsa atau kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional dimulai sejak awal abad ke - 20 dan mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 yakni saat diproklamirkannya, Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Surjomihardjo (1989), sebagaimana dikutip oleh Sapriya, bahwa perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di Negara-Negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan, pada umumnya, mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke - 20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945-1955 (2004: 73). Negara - Negara yang merdeka dalam periode tersebut selain Indonesia adalah Libanon dan Syria (21 Juni 1945), Yordania (22 Maret 1946), Filipina (4 Juli 1946), India dan Pakistan (15 Agustus

1947), Burma atau Myanmar (4 Januari 1948), Srilanka (4 februari 1948), Indocina atau Vietnam (20 Juli 1954), dan masih banyak lagi Negara-negara lain yang merdeka terutama setelah diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Apakah sebelum abad ke-20, sudah ada perjuangan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajahan? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya anda perhatikan penjelasan berikut ini. Perjuangan untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajah telah dilakukan di berbagai daerah di Nusantara jauh sebelum abad ke-20. Hanya perjuangannya belumlah bersifat nasional atau kebangsaan untuk membentuk suatu Negara. Perjuangan dilakukan oleh sejumlah kerajaan untuk mengusir penjajah dari daerah/ kerajaan tertentu secara local sehingga sering disebut perjuangan kedaerahan lokal. Untuk mengupas lebih jauh kajian di atas, kita ikuti uraian di bawah ini.

B. Zaman Kerajaan

1. Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 *yupa* (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman adalah keturunan dari raja Aswawarman dan merupakan keturunan dari Raja Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan member sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun *yupa* itu sebagai kepada para Brahmana, dan para Brahmana, membangun *yupa* itu sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan (Bambang Sumadio, dkk., dalam Sartono Kartodirdjo, 1977 : 33-32). Masyarakat Kutai yang membuka zaman

sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.

Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan – kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatera. Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separoh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit yang berpusat di Jawa.

Tujuh prasasti peninggalan Kerajaan Kutai di Muara Kaman, yang dikatakan sebagai kerajaan tertua di Nusantara dan merupakan Kerajaan Hindu pertama di Indonesia sudah cukup jelas kita ketengahkan dan sewajarnya kita ungkapkan karena telah dibahas dan diteliti secara mendalam. Bagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 1870 adanya suatu penelitian di Muara Kaman, karena adanya penemuan-penemuan berupa benda-benda yang menyangkut sejarah Kerajaan Kutai.

Adapun benda-benda yang diketemukan pada tahun 1870, tersebut antara lain: 4 buah tugu (batu prasasti yang disebut yupa), dua buah lencana kerajaan yang terbuat dari emas dan patung kura – kura emas yang disimpan oleh seorang keturunan raja-raja di Muara Kaman, menurut berita pada tanggal, 3 juni 1897, K.F. Holle yang tertarik dengan penemuan Prasasti yupa tersebut melaksanakan pertemuan di Batavia (Jakarta sekarang) guna meneliti lebih jelas tentang prasasti yupa yang ditemukan di Muara Kaman tersebut.

Pada tanggal, 13 September 1880, Kren telah pula mengadakan pertemuan di Royal Academy Of Sciences di Amsterdam Belanda, dalam persentasinya Kren berpendapat bahwa Yupa adalah sebuah perasati pendirian sebuah Negara yang berbentuk kerajaan, maka oleh J.Pn.Vogel transkripsi yupa diteliti secara seksama yang dibantu oleh F.D.K Bosch, dan beberapa epigraf dari India Selatan yakni Fleet, Hultzsch, serta Vankayya. Hasilnya belum cukup memuaskan.

Pada tahun 1939, diadakan penelitian di Muara Kaman dan menemukan 3 buah prasasti Raja Mulawarman yang disebutkan berasal dari abad ke-IV, karena melihat tulisan yang digunakan pada tugu batu tersebut adalah huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sansekerta kuno dari India Selatan. Guna memperjelas tentang pengkajian prasasti yupa pada tahun 1952, diadakan perbaikan dalam pembacaan dan penerjemahannya oleh Raden Mas Ng. Poerbatjaraka yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan tersebut menggambarkan beberapa hal tentang kurban dalam sebuah acara kenegaraan dankurban-kurban yang bersangkutan dengan acara ritual agama Hindu.

Menurut seorang pakar sejarah bernama Ny. Soeleman mengatakan bahwa didalam batu prasasti yupa ada menyebutkan kata *Vavrakecvara* yang diartikan lapangan luas tempat upacara kurban maka dalam pengkajian tersebut (*Rajah Cri Mala Varmanah Danam Puyatane Ksetrei Yadattam Varakecvare*) yang dikatakan bahwa Sang Raja Sri Mulawarman yang amat mulia dan terkemuka telah mengadakan kurban bertempat didalam *Varakecvare*, (lapangan luas) tempat upacara sedekah yang disebut Upacara *Bahuswarnakam* yaitu kurban hadiah sapid an emas.

Di bawah inidisajikan contoh tulisan prasasti yupa beserta terjemahannya.

Tulisan Prasasti Yupa:

.....cri mantah cri narendraasya mahat manah putro cvabharmo vikhya tan vancakarta yathancuman tasya putro mahat manah trayas-trayas ivagnayah tssan trayanam pravarah tapa bola danavitah cri mala varmanah rajendro yastava bahusvan akam yajnasya jupoyam dwijen drais sampra kalpita.....

Diartikan:

Sang Raja Kudungga yang mempunyai putra wamsakarta, melahirkan tiga putra seperti api sinarnya dan menjadi raja-raja berkuasa di wilayahnya dan yang paling terkenal adalah Maharaja Sri Mulawarman Nala Dewa yang mengadakan kurban besar dan member sedekah emas kepada para brahmana yang datang ke tempat itu, sehingga dia dinyatakan kuat dalam berkuasa.

2. Kerajaan Sriwijaya

Menurut Mr. Muh. Yamin bahwa berdirinya Negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu, pertama, Zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. Kedua, Negara Kebangsaan Zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan. Kedua tahap tersebut merupakan Negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, Negara kebangsaan modern yaitu Negara Indonesia merdeka (sekarang Negara Proklamasi 17 Agustus 1945) (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 : 11).

Pada abad VII muncullah suatu kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan Sriwijaya, di bawah kekuasaan Warga Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedukan Bukit di kaki bukit Siguntang dekat

Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 683 M., dalam bahasa Melayu Kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya. Kunci-kunci lalu-lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti selat Sunda (686), kemudian selat Malaka (775).

Pada zaman itu kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan dengan pedagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut *Tuha An Vatakvurah* sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya (Keneth R. Hall, 1976: 75-77). Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung – patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai Ketuhanan (Suwarno, 1993, 19).

Di kerajaan Sriwijaya agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama Budha, yang sangat terkenal di Negara lain di Asia. Banyak musafir dari Negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di universitas tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya misalnya Dharmakriti. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu Negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi '*marvuat vanua*

Criwijaya siddhayatra subhiksa' (suatu cita-cita Negara yang adil dan makmur) (Sulaiman, tanpa tahun: 53).

3. Kerajaan Majapahit

Sebelum Kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang besar telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan- kerajaan tersebut adalah kerajaan Kalingga pada abad VII, Sanjaya pada abad VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad VII dan IX).

Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dengan dibangunnya candi Borobudur (candi, agama Budha pada abad IX), dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad X).

Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur muncullah kerajaan-kerajaan Isana (pada abad IX), Darmawangsa (abad X) demikian juga kerajaan Airlangga pada abad XI. Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Budha, agama Wisnu dan agama Syiwa yang hidup berdampingan secara damai (Toyibin, 1997: 26). Menurut prasasti Kelagen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola dan Champa hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami penggemblengan lahir dan batin di hutan. Tahun 1019 para pengikutnya, rakyat, dan para Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja,

meneruskan tradisi istana, sebagai nilai-nilai sila keempat. Demikian pula menurut prasasti Kelagen, pada tahun 1037, raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelima. (Toyibin, 1997: 28,29).

Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit.

Pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintah raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari Semenanjung Melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Mpu Prapanca menulis *Negarakertagama* (1365). Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku *Sutasoma*, dan di dalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional yaitu, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang bunyi lengkapnya *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*, artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan beragama saat itu, yaitu agama Hindu dan Budha. Bahkan salah satu bawahan kekuasaannya adalah Pasai yang telah memeluk agama Islam.

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya sebagai berikut : ‘Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan (Yamin dalam Kaelan, 2010: 32).

Selain itu dalam hubungannya dengan Negara lain raja hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan bertetangga dengan baik misalnya kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa, dan Kamboja. Menurut prasasti Brumbung (1329), dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang bertugas memberikan nasihat kepada raja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai musyawarah mufakat telah dilaksanakan dalam sistem pemerintahan kerajaan Majapahit.

4. Kerajaan Demak

Ibu kota	Demak Bintara
Bahasa	Jawa
Agama	Islam
Pemerintahan	Kerajaan
- 1475-1518	Raden Patah
- 1518-1521	Pati Unus
- 1521-1548	Trenggana

Sejarah

- Berdirinya kota pelabuhan Demak 1475
- Wafatnya raja Tenggana 1548
(1475-1478 sebagai bawahan Majapahit)

Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam terbesar di pantai utara Jawa (“Pesisir”). Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan keadipatian (kedipaten) dari kerajaan Majapahit, dan tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Jadi jelas, bahwa awal mulanya Demak merupakan bagian dari kerajaan Majapahit.

Kerajaan Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1568, kekuasaan Demak beralih ke kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalan bersejarah Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak, yang menurut tradisi didirikan oleh Walisanga.

Lokasi Keraton Demak, yang pada masa itu berada di tepi laut, berada di kampong Bintara (dibaca “Bintoro” dalam bahasa Jawa). Saat ini telah menjadi kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribukota di sana dikenal sebagai *Demak Bintara*. Pada masa raja ke-4 ibukota dipindahkan ke Prawata (dibaca “Parawoto”) dan untuk periode ini kerajaan disebut *Demak Prawata*.

Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa surut, secara praktis wilayah-wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Wilayah-wilayah yang terbagi menjadi kadipaten-kadipaten tersebut saling serang, saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit.

Demak didirikan di perapat terakhir abad ke-15, kemungkinan besar oleh seorang Tionghoa Muslim bernama Cek Ko-po. Kemungkinan besar puteranya adalah orang yang oleh Tome Pires dalam *Suma Oriental*-nya dijuluki “Pate Rodim” mungkin dimaksudkan “Badruddin” atau “Kamaruddin” dan meninggal sekitar

tahun 1504. Putera atau adik Rodim, yang bernama Trenggana bertahta dari tahun 1505 sampai 1518, kemudian dari tahun 1521 sampai 1546. Di antara kedua masa ini yang bertahta adalah iparnya, raja Yunus dari Jepara.

Tradisi Jawa menceritakan bahwa pada masa itu, arus kekuasaan mengerucut pada dua adipat, yaitu Raden Patah dan Ki Ageng Pengging. Sementara Raden Patah mendapat dukungan dari Walisanga. Ki Ageng Pengging mendapat dukungan dari Syekh Siti Jenar.

Era Pati Unus

Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Pati Unus adalah raja kedua Demak. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritime yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Dengan adanya Portugis di Malaka, kehancuran pelabuhan-pelabuhan Nusantara tinggal menunggu waktu.

Era Trenggana

Trenggana adalah sultan ketiga kerajaan Demak. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dan Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana (1527), Tuban (1527), Madiun (1529), Surabaya dan Pasuruan (1527), Malang (1545), dan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur pulau Jawa (1527,1546). Panglima perang Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai (Sumatera), yang juga menjadi menantu Sultan Trenggana. Dalam sejarah disebutkan bahwa Fatahillah setelah lanjut

usia menetap di Cirebon dan mengajarkan Islam di daerah tersebut. Beliau (Fatahillah) biasa disebut dengan nama Sunan Gunung Jati, salah satu dari Walisanga. Atas perjuangannya, maka Islam berkembang pesat di daerah Cirebon, Jawa Barat. Hingga sekarang, di daerah Cirebon masih berdiri dua peninggalan kerajaan Islam yakni Kraton Kasepuhan Cirebon dan Kanoman. Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawata.

Kemunduran

Sukses ke tangan Sunan Prawata tidak berlangsung mulus. Penunjukannya sebagai sunan ditentang oleh adik Trenggana, yaitu Pangeran Sekar Seda Lepen. Dalam penumpasan pemberontakan, Pangeran Sekar Seda Lepen akhirnya terbunuh. Akan tetapi, pada tahun 1561 Sunan Prawoto beserta keluarganya dihabisi oleh suruhan Arya Penangsang, putera Pangeran Sekar Seda Lepen. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak. Suruhan Arya Pengangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, adipati Jepara, dan hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang, salah satunya adalah Adipati Pengging. Arya Penangsang akhirnya berhasil dibunuh dalam peperangan oleh Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, dan di sana ia mendirikan Kerajaan Pajang.

5. Kerajaan Pajang (1568-1586)

Ibu kota	Pajang
Bahasa	Jawa
Agama	Islam

Pemerintahan	Kerajaan
- 1568-1586	Hadiwijaya

Sejarah

- Hadiwijaya naik tahta 1568
- Perpindahan kekuasaan ke Mataram 1586

(1548-1568 adalah masa perebutan kekuasaan antara kerabat kerajaan setelah wafatnya penguasa terakhir Demak, Trenggan)

Kerajan Pajang adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Kompleks kraton, yang sekarang tinggal batas-batas fondasinya saja, berada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Letak Pajang jika dilihat dari peninggalan Kraton Kartasura adalah ke arah timur lebih kurang 5 km.

Asal-Usul

Sesungguhnya nama negeri Pajang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Menurut *Nagarakretagama* yang ditulis tahun 1365, ada seorang adik perempuan Hayam Wuruk (raja Majapahit saat itu) menjabat sebagai penguasa Pajang, bergelar *Bhatara i Pajang*, atau disingkat **Bhre Pajang**. Nama aslinya adalah Dyah Nertaja, yang merupakan ibu dari Wikramawardhana, raja Majapahit selanjutnya.

Dalam naskah-naskah *babad*, negeri **Pengging** disebut sebagai cikal bakal Pajang. Cerita rakyat yang sudah melegenda menyebut Pengging sebagai kerajaan kuno yang pernah dipimpin Prabu

Anglingdriya, musuh bebuyutan Prabu Baka raja Prambanan. Kisah ini dilanjutkan dengan dongeng berdirinya Candi Prambanan.

Ketika Majapahit dipimpin oleh Brawijaya (raja terakhir versi naskah *babad*), nama Pengging muncul kembali. Dikisahkan putri Brawijaya yang bernama Retno Ayu Pembayun diculik Menak Daliputih raja Blambangan putra Menak Jingga. Muncul seorang pahlawan bernama Jaka Sengara yang berhasil merebut sang putri dan membunuh penculiknya. Atas jasanya itu, Jaka Sengara diangkat Brawijaya sebagai bupati Pengging dan dinikahkan dengan Retno Ayu Pembayun. Jaka Sengara kemudian bergelar **Andayaningrat**. Pajang terlihat sebagai kerajaan pertama yang muncul di pedalaman Jawa setelah runtuhnya kerajaan muslim di Pesisir.

Menurut *babad*, Andayaningrat gugur di tangan Sunan Ngudung saat terjadinya perang antara Majapahit dan Demak. Ia kemudian digantikan oleh putranya, yang bernama Raden Kebo Kenanga, bergelar Ki Ageng Pengging. Sejak saat itu Pengging menjadi daerah bawahan Kerajan Demak. Beberapa tahun kemudian Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap Demak. Putranya yang bergelar Jaka Tingkir setelah dewasa justru mengabdikan ke Demak.

Prestasi Jaka Tingkir yang cemerlang dalam ketentaraan membuat ia diangkat sebagai menantu Trenggana, dan menjadi bupati Pajang bergelar Hadiwijaya. Wilayah Pajang saat itu meliputi daerah Pengging (sekarang kira-kira mencakup Boyolali dan Klaten), Tingkir (derah Salatiga), Butuh, dan sekitarnya.

Sepeninggal Trenggana tahun 1546, Sunan Prawoto naik takhta, namun kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya

Penangsang bupati Jipang tahun 1549. Setelah itu, Arya penangsang juga berusaha membunuh Hadiwijaya namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat (bupati Jepara dan puteri Trenggana), Hadiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Ia pun menjadi pewaris takhta Demak, yang ibu kotanya dipindah ke Pajang.

Perkembangan

Pada awal berdirinya tahun 1549, wilayah Pajang hanya meliputi sebagian Jawa Tengah saja, karena negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri sejak kematian Trenggana. Pada tahun 1568 Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama dari Surabaya (pemimpin persekutuan adipati Jawa Timur) dinikahkan dengan puteri Hadiwijaya.

Negeri kuat lainnya, yaitu Madura juga berhasil ditundukkan Pajang. Pemimpinnya yang bernama Raden Pratanu alias Panembahan Lemah Dhuwur juga diambil sebagai menantu Hadiwijaya.

Peran Walisanga

Pada zaman Kerajaan Demak, majelis ulama Walisanga memiliki peran penting, bahkan ikut mendirikan kerajaan tersebut. Majelis ini bersidang secara rutin selama periode tertentu dan ikut menentukan kebijakan politik Demak. Sepeninggal Trenggana, peran Walisanga ikut memudar. Sunan Kudus bahkan terlibat pembunuhan terhadap Sunan Prawata, raja baru pengganti Trenggana.

Meskipun tidak lagi bersidang secara aktif, sedikit banyak para wali masih berperan dalam pengambilan kebijakan politik Pajang. Misalnya, Sunan Prapen bertindak sebagai pelantik Hadiwijaya sebagai raja. Ia juga menjadi mediator pertemuan Hadiwijaya dengan para adipati Jawa Timur tahun 1568. Sementara itu, Sunan Kalijaga juga pernah membantu Ki Ageng Pemanahan meminta haknya pada Hadiwijaya atas tanah Mataram sebagai hadiah sayembara menumpas Arya Penangsang.

Wali lain yang masih berperan menurut naskah *babad* adalah Sunan Kudus. Sepeninggal Hadiwijaya tahun 1582, ia berhasil menyingkirkan Pangeran Benawa dari jabatan putra mahkota, dan menggantinya dengan Arya Pangiri. Mungkin yang dimaksud dengan Sunan Kudus dalam naskah *babad* adalah Panembahan Kudus, karena Sunan Kudus sendiri sudah meninggal tahun 1550.

Pemberontakan Mataram

Tanah Mataram dan Pati adalah dua hadiah Hadiwijaya untuk siapa saja yang mampu menumpas Arya Penangsang tahun 1549. Menurut laporan resmi peperangan, Arya Penangsang tewas dikeroyok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki Penjawi diangkat sebagai penguasa Pati sejak tahun 1549. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan baru mendapatkan hadiahnya tahun 1556 berkat bantuan Sunan Kalijaga. Hal ini disebabkan karena Hadiwijaya mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram akan lahir kerajaan yang lebih besar dari pada Pajang.

Ramalan tersebut menjadi kenyataan ketika Mataram dipimpin Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan sejak tahun 1575. Tokoh Sutawijaya inilah yang sebenarnya membunuh Arya

Penangsang. Di bawah pimpinannya, daerah Mataram semakin hari semakin maju dan berkembang. Pada tahun 1582 meletus perang Pajang dan Mataram karena Sutawijaya membela adik iparnya, yaitu Tumenggung Mayang, yang dihukum buang ke Semarang oleh Hadiwijaya. Perang itu dimenangkan pihak Mataram meskipun pasukan Pajang jumlahnya lebih besar.

Keruntuhan

Sepulang dari perang, Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu pangeran Benawa dan Arya Pangiri sebagai raja selanjutnya. Arya Pangiri didukung Panembahan Kudus berhasil naik takhta tahun 1583. Pemerintahan Arya Pangiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat pajang terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jipang, merasa prihatin.

Pada tahun 1586 Pangeran Benawa bersekutu dengan sutawijaya menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582 Sutawijaya memerangi Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan AryaPangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnyaa yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi raja Pajang yang ketiga.

Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya sehingga Pajang pun dijadikan sebagai negeri nawahan Mataram. Yang menjadi bupati di sana ialah Pangeran Gagak Baning, adik Sutawijaya. Sutawijaya sendiri

mendirikan Kerajaan Mataram, di mana ia sebagai raja pertama bergelar Panembahan Senopati.

Daftar raja Pajang

1. Jaka Tingkir (Mas Karebet) atau **Hadiwijaya**
2. Arya Pangiri atau **Ngawantipura**
3. Pangeran Benawa atau **Prabuwijaya**

6. Kerajaan Mataram (1588-1681)

Ibu kota Kota Gede (1588-1613)
Karta (1613-1647)
Pleret (1647-1681)

Bahasa Jawa

Agama Islam, Kejawen

Pemerintahan Monarki absolut

Panembahan, Susuhunan (Sunan), Sultan

- 1588-1601;t. 1584 Penmbahan Senopati
- 1677-1681 Susuhunan Ing Ngalogo (Paku Buwono I); Hamangkurat II (pengasingan)

Sejarah

- Wafat Sultan III Pajang (1588)
- Pemberontakan Trunajaya/Penaklukan Susuhan Ing Ngalogo (28 November 1681)

Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan, yang mengklaim sebagai suatu cabang ningrat keturunan penguasa

Majapahit. Asal-usulnya adalah suatu Kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di “Bumi Mentaok” yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang. Raja berdaulat pertama adalah Sutawijaya (Panembahan Senapati), putra dari Ki Ageng Pemanahan.

Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Negeri ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya firma dagang itu, namun ironisnya malah harus menerima bantuan VOC pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya.

Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris/pertanian dan relative lemah secara maritim. Ia meninggalkan beberapa jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini, seperti kampung Matraman di Batavia/Jakarta, system persawahan di Pantura Jawa Barat, penggunaan hanacaraka dalam literature bahasa Sunda, politik feudal di Pasundan, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih berlaku hingga sekarang.

Masa awal

Sutawijaya naik takhta setelah ia merebut wilayah Pajang sepeninggal Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senapati. Pada saat itu wilayahnya hanya di sekitar Jawa Tengah saat ini, mewarisi wilayah Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan berada di Mentaok, wilayah yang terletak kira-kira di timur Kota Yogyakarta dan Selatan Bandar Udara Adisucipto sekarang. Lokasi kraton (tempat kedudukan raja), pada masa awal terletak di Banguntapan, kemudian dipindah ke Kotagede. Sesudah ia meninggal (dimakamkan di kotagede)

kekuasaan diteruskan putranya Mas Jolang yang setelah naik takhta bergelar Prabu Hanyokrowati.

Pemerintahan Prabu Hanyokrowati tidak berlangsung lama karena beliau wafat sebab kecelakaan saat sedang berburu di hutan Krapyak. Karena itu ia juga disebut *Susuhunan Seda Krapyak* atau *Panembahan Seda Krapyak* yang artinya *Raja (yang) wafat (di) Krapyak*. Setelah itu tahta beralih sebentar ke tangan putra keempat Mas Jolang yang bergelar Adipati Martoputro. Ternyata Adipati Martoputro menderita penyakit syaraf sehingga tahta beralih ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang. Pada masa pemerintahan Mas Rangsang Mataram mengalami masa keemasan.

Sultan Agung/ Raden Mas Rangsang

Sesudah naik tahta Mas Rangsang bergelar *Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo* atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masanya Mataram berekspresi untuk mencari pengaruh di Jawa. Wilayah Mataram mencakup Pulau Jawa dan Madura (kira-kira gabungan Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur sekarang). Ia memindahkan lokasi kraton ke Karta (Jw. "Kerta", maka muncul sebutan pula "Mataram Karta"). Akibat terjadi gesekan dalam penguasaan perdagangan antara Mataram dengan VOC yang berpusat di Batavia, Mataram lalu berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC. Setelah wafat (Sultan Agung dimakamkan di Imogiri), ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat (Amangkurat I).

Terpecahnya Mataram

Mataram telah dipecah menjadi empat kerajaan pada tahun 1830, setelah Perang Diponegoro. Amangkurat I memindahkan lokasi keratin ke Plered (1647), tidak jauh dari Karta. Selain itu, ia tidak lagi menggunakan gelar sultan, melainkan “sunan” (dari “Susuhunan” atau “Yang Dipertuan”). Pemerintahan Amangkurat I kurang stabil karena banyak ketidakpuasan dan pemberontakan. Pada masanya, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya dan memaksa Amangkurat bersekutu dengan VOC. Ia wafat di Tegalarum (1677) ketika mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tegalarum. Penggantinya, Amangkurat II (Amangkurat Amral), sangat patuh pada VOC sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas dan pemberontakan terus terjadi. Pada masanya, keratin dipindahkan lagi ke Kartasura (1680), sekitar 5 km sebelah barat Pajang karena kraton yang lama dianggap telah tercemar.

Pengganti Amangkurat II berturut-turut adalah Amangkurat III (1703-1708), Pakubuwana I (1704-1719), Amangkurat IV (1719-1726), Pakubuwana II (1726-1749). VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC sehingga VOC mengangkat Pakubuwana I (Puger) sebagai raja. Akibatnya Mataram memiliki dua raja dan ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak dan menjadi “*king in exile*” hingga tertangkap di Batavia lalu dibuat ke Ceylon.

Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta tanggal 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian

Giyanti (nama diambil dari lokasi penandatanganan, di sebelah timur kota Karanganyar, Jawa Tengah). Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Walaupun demikian sebagian masyarakat Jawa beranggapan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta adalah “ahli waris” dari Kesultanan Mataram.

C. Zaman Penjajahan dan Kebangkitan Nasional

1. Zaman Penjajahan Portugis

Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI sehingga berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia dan pada awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis. Namun lama kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan misalnya Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis.

Bangsa Portugis (Portugal) berhasil merebut beberapa pelabuhan penting di pantai India dan menjadikan kota Goa yang terletak di pantai India sebagai pusat kekuasaannya. Untuk dapat menguasai dan monopoli perdagangan di Asia Selatan, bangsa Portugis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperluas kekuasaannya ke arah barat dengan menghancurkan armada laut Turki, sehingga bangsa Portugis dapat mengawasi perdagangan dan pelayaran di

laut antara Asia dengan Eropa. Bahkan bangsa Portugis dapat memaksa para pedagang untuk berlayar dari Bandar perdagangan Goa (India) menuju ke Afrika Selatan dan Selanjutnya sampai di Bandar Lisboa, yaitu pusat perdagangan di Eropa dan ibukota Portugis.

- b. Memperluas kekuasaannya ke arah timur dengan menguasai Malaka, sehingga dapat menghentikan dan menguasai aktivitas perdagangan langsung yang dilakukan oleh pedagang-pedagang China, India, maupun kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada tahun 1511, Malaka berhasil direbut oleh Portugis dibawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Sejak itu, kerajaan Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis. Dengan demikian bangsa Portugis dapat mengadakan perdagangan langsung dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia, seperti Ternate, Ambon, Banda, dan Timor.

Di Ternate bangsa Portugis berusaha merebut perdagangan cengkeh dan pala. Akan tetapi dalam upaya itu, bangsa Portugis telah berbuat sesuatu hal yang melukai perasaan orang-orang Islam, dengan melanggar perjanjian terhadap Sultan Ternate. Bangsa Portugis berusaha menanamkan kekuasaannya di daerah Maluku. Hal ini dilakukan agar dapat memonopoli perdagangan rempah – rempah.

Tindakan-tindakan bangsa Portugis yang semakin sewenang-wenang dan bertindak kejam terhadap rakyat telah menimbulkan terjadinya pertentangan antara rakyat Maluku dengan bangsa Portugis. Pertentangan ini semakin memuncak setelah bangsa Portugis membunuh Sultan Hairun dari kerajaan Ternate. Rakyat

Ternate angkat senjata dibawah pimpinan putranya yang bernama Baabullah, dan akhirnya tahun 1575 bangsa Portugis terusir dari daerah Maluku.

Zaman kekuasaan kolonial Portugis yang berlangsung dari tahun 1511-1641 di wilayah Indonesia meninggalkan bekas-bekasnya di dalam kebudayaan Indonesia saat ini. Peninggalan-peninggalan zaman kolonial Portugis baik yang berupa kebudayaan rohani maupun jasmaniasih dapat kita saksikan hingga sekarang. Semboyan dari penjelajahan bangsa Portugis, yaitu berusaha untuk menyebarkan agama Katholik pada daerah-daerah yang dikuasainya. Fransiscus Xaverius, seorang misionaris, telah menyebarkan agama Katolik di Ambon. Banyak orang Ambon yang akhirnya memeluk agama Katolik dan terlihat dari nama-namanya yang meniru nama-nama bangsa Portugis seperti, De Pereire, De Fretes, Lopies, De Quelju, Diaz, dan sebagainya.

Benda-benda peninggalan bangsa Portugis kemudian dianggap keramat oleh bangsa Indonesia seperti meriam-meriam yang terkenal dengan nama Nyai Setomi di Solo, Si Jagur di Jakarta, Ki Amuk di Banten dan sebagainya. Khusus meriam Si Jagur yang terdapat yang terdapat di Jakarta dianggap sebagai alat perantara kekuatan gaib untuk mendapatkan anak.

Pengaruh lainnya seperti bahasa Portugis yang turut memperkaya jumlah kata-kata dalam bahasa Indonesia, seperti kata *San Domingo* (Tuhan yang keramat), *gereja*, *mentega*, *mana* (dari kata madona), *sinyo* (dari kata signor) dan sebagainya. Adapun seni music yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah seni musik keroncongyang berasal dari seni musikPortugis. Keroncong berbahasa

Portugis yang pernah terkenal di Indonesia adalah keroncong Morisco.

2. Zaman Penjajahan Spanyol

Ferdinand Magelhaens, kadang juga ditulis Ferdinand Magelan. Tokoh inilah, yang memimpin armada pertama kali mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi bulat, saat itu dikenal oleh orang Eropa bumi datar. Dimulainya Kolonisasi berabad-abad oleh Spanyol bersama bangsa Eropa lain, terutama Portugis, Inggris, dan Belanda.

Dari Spanyol ke Samudra Pasifik itulah armada Spanyol mengarungi Samudra Pasifik, melewati Tanjung Harapan Afrika, menuju Selat Malaka. Dari sini penjajahan dilanjutkan ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, komoditas yang setara emas kala itu. Pada tanggal 20 September 1519, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago yang besar hingga yang terkecil mengikuti kapal induk Magelhaens, Trinidad, kapal terbesar kedua, seraya mereka berlayar menuju Amerika Selatan.

Tahun 1521 Spanyol mulai masuk perairan Indonesia. Spanyol memulai kolonisasi di Sulawesi Utara 1560. Spanyol mendirikan pos di Manado. Minahasa memegang peranan sebagai lumbung beras bagi Spanyol ketika melakukan usaha penguasaan total terhadap Filipina.

Pada tahun 1550 Spanyol telah mendirikan benteng di Wenang dengan cara menipu kepala Walak Lolong Lasut menggunakan kulit sapi dari Benggala India yang dibawa Portugis ke Minahasa. Tanah seluas kulit sapi yang dimaksud Spanyol adalah tanah seluas tali yang dibuat dari kulit sapi itu. Spanyol kemudian menggunakan orang Mongodow untuk menduduki benteng Portugis di Amurang pada tahun 1550-an sehingga akhirnya Spanyol dapat menduduki

Minahasa. Dan Dotu Kepala Walak (Kepala Negara) Lolong Lasut punya anak buah Tonaas Wuri Muda. Nama Kema dikaitkan dengan pembangunan pangkalan militer Spanyol.

Bartholomoe de Soisa mendarat pada 1651 dan mendirikan pelabuhan di daerah yang disebutnya 'La Quimas'. Penduduk setempat mengenal daerah ini dengan nama 'Maadon' atau juga 'Kaawuudan'. Letak benteng Spanyol berada di muara sungai Kema, yang disebut oleh Belanda, Spanyaardsgat, atau Liang Spanyol.

Sebelum menguasai kepulauan Filipina pada 1543, Spanyol menjadikan pulau Manado Tua sebagai tempat persinggahan untuk memperoleh air tawar. Dari pulau tersebut kapal-kapal Spanyol memasuki daratan Sulawesi-Utara melalui sungai Tondano. Hubungan musafir Spanyol dengan penduduk pedalaman terjalin melalui barter ekonomi bermula di Uwuran (sekarang kota Amurang) di tepi sungai Rano I Apo. Perdagangan barter berupa beras, dammar, madu dan hasil hutan lainnya dengan ikan dan garam.

Gudang kopi Manado dan Minahasa menjadi penting bagi Spanyol, karena kesuburan tanahnya dan digunakan Spanyol untuk penanaman kopi yang berasal dari Amerika-Selatan untuk dipasarkan ke daratan Cina yang memasarkan kopi kedaratan Cina. Nama Desliens, pada 1541. Manado juga menjadi daya tarik masyarakat Cina oleh kopi sebagai komoditi ekspor masyarakat pedalaman Manado dan Minahasa. Para pedagang Cina merintis pengembangan gudang kopi (kisi seputar Pasar 45) yang kemudian menjadi daerah pecinaan dan pemukiman. Para pendatang dari daratan Cina berbaur dan berasimilasi dengan masyarakat pedalaman hingga terbentuk

masyarakat pluralistic di Manado dan Minahasa bersama turunan Spanyol, Portugis dan Belanda.

Kemunculan nama Manado di Sulawesi Utara dengan berbagai kegiatan niaga yang dilakukan Spanyol menjadi daya tarik Portugis sejak memapankan posisinya di Ternate. Untuk itu Portugis melakukan pendakatan mengirim misi Katholik ke tanah Manado dan Minahasa pada 1563 dan mengembangkan agama dan pendidikan Katholik. Lomba adu pengaruh di antara Minahasa dengan Ternate ada dua pulau kecil bernama Mayu dan Tafure. Kemudian kedua pulau tadi dijadikan pelabuhan transit oleh pelaut Minahasa. Waktu itu terjadi persaingan Portugis dan Spanyol dimana Spanyol merebut kedua pulau tersebut. Pandey asal Tombulu yang menjadi raja di pulau itu lari dengan armada perahunya kembali ke Minahasa, tapi karena musim angin barat lalu terdampar di Gorontalo. Anak lelaki Pandey bernama Potangka melanjutkan perjalanan dan tiba di Ratahan. Di Ratahan, dia diangkat menjadi panglima perang karena dia ahli menembak meriam dan senapan Portugis untuk melawan penyerang dari Mongondouw di wilayah itu.

Tahun 1563 di wilayah Ratahan dikenal orang Ternate dengan nama "Watasina" karena ketika diserang armada Kora-kora Ternate untuk menghalau Spanyol dari wilayah itu (buku "*De Katholieken en hare Missie*" tulisan A.J. Van Aernsbergen). Tahun 1570 Portugis dan Spanyol bersekongkol membunuh Raja Ternate sehingga membuat keributan besar di Ternate. Ketika itu banyak pedagang Islam Ternate dan Tidore lari ke Ratahan. Serangan bajak laut meningkat di ratahan melalui Bentenan, bajak laut menggunakan budak-budak sebagai

pendayung. Para budak tawanan bajak laut lari ke Ratahan ketika malam hari armada perahu bajak laut dirusak prajurit Ratahan-Pasan.

Berikutnya sekilas akan dipaparkan perjuangan Minahasa melawan Spanyol. Ratu Oki berkisar pada tahun 1644 sampai 1683. Waktu itu, terjadi perang yang hebat antara anak suku Tombatu (juga biasa disebut Toundanow atau Tonsawang) dengan orang-orang Spanyol. Perang itu dipicu oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap orang-orang Spanyol yang ingin menguasai perdagangan terutama terhadap komoditi beras, yang kala itu merupakan hasil bumi andalan warga Kali. Di samping itu kemarahan juga diakibatkan oleh kejahatan orang-orang Spanyol terhadap warga setempat, terutama kepada para perempuannya. Perang itu telah mengakibatkan tewasnya 40 tentara Spanyol di Kali dan Batu (lokasi Batu Lesung sekarang). Naasnya, di pihak anak suku Tombatu, telah mengakibatkan tewasnya Panglima Monde bersma 9 orang tentaranya. Panglima Monde tidak lain adalah suaminya Ratu Oki. Menurut yang dikisahkan dalam tulisan itu, Panglima Monde tewas setelah mati-matian membela istrinya, Ratu Oki.

Menurut P.A. Gosal, dkk., dalam masa kekuasaan Ratu Oki anak suku Toundanow (sebutan lain untuk anak suku Tombatu atau Tonsawang) yang mendiami sekitar danau Bulilin hidup sejahtera aman dan tenteram. "Atas kebijaksanaan dan kearifannya memimpin anak suku Toundanow maka Ratu Oki disahkan juga sebagai Tonaas atau Balian. Selama kepemimpinan Ratu Oki, Spanyol dan Belanda tidak pernah menuasai atau menjajah anak Toundanow.

Para pelaut awak kapal Spanyol berdiam di Minahasa dan bahkan membaur dengan masyarakat. Mereka menikah dengan

wanita-wanita Minahasa, sehingga keturunan mereka menjadi bersaudara dengan warga pribumi.

Tahun 1643 pecah perang Minaesa Serikat melawan kerajaan Spanyol. Dalam suatu peperangan di Tompaso, pasukan Spanyol dibantu pasukan Raja Loloda Mokoagouw II dipukul kalah, mundur oleh gabungan pasukan serikat Minaesa, dikejar hingga dipantai. Tahun 1694 dalam suatu peperangan di Tompaso, pasukan Raja Loloda Mokoagouw II dipukul kalah, mundur oleh gabungan pasukan serikat Minahasa, dikejar hingga ke pantai tapi dicegah dan ditengahi oleh Residen VOC Herman Jansz Steynkuler. Pada tahun 1694 bulan September tanggal 21, diadakanlah kesepakatan damai, dan ditetapkan perbatasan Minahasa adalah sungai Poigar. Pasukan Serikat Minaesa yang berasal dari Tompaso menduduki Tompaso Baru, Rumoong Bawah, Kawangkoan mendiami Kawangkoan bawah, dan alin sebagainya.

Dr. J.G.F. Riedel menyebutkan bahwa armada Spanyol sudah mendarat di Kema tepat 100 tahun sebelumnya. Kema berkembang sebagai ibu negeri Pakasaan Tonsea sejak era pemerintahan Xaverius Dotulong, setelah taranak-taranak Tonsea mulai meninggalkan negeri tua, yakni Tonsea Ure dan mendirikan perkampungan-perkampungan baru. Surat Xaverius Dotulong pada 3 Februari 1770 kepada Gubernur VOC di Ternate mengungkapkan bahwa ayahnya, I. Runtukahu Lumanauw tingga di Kema dan merintis pembangunan kota ini. Hal ini diperkuat oleh para Ukung di Manado yang mengklaim sebagai turunan dotu Bogi, putera sulung dari beberapa dotu bersaudara seperti juga dikemukakan Gubernur Ternate dalam surat balasannya kepada Xaverius Dotulong pada 1 November 1772.

Portugis dan Spanyol merupakan tumpuan kekuatan gereja Katolik Roma memperluas wilayah yang dilakukan kesultanan Ottoman di Mediterania pada abad ke-XV. Selain itu, Portugis dan Spanyol juga tempat pengungsian pengusaha dan tenaga-tenaga terampil asal Konstantinopel ketika dikuasai kesultanan Ottoman dari Turki pada 1453. Pemukiman tersebut menyertakan alih pengetahuan ekonomi dan maritime di Eropa Selatan. Sejak itu pun Portugis dan Spanyol dan maritime di Eropa Selatan. Sejak itu pun Portugis dan Spanyol menjadi adikuasa di Eropa. Alih pengetahuan diperoleh dari pendatang asal Konstantinopel yang memungkinkan bagi kedua negeri Hispanik itu melakukan perluasan wilayah-wilayah baru diluar daratan Eropa dan Mediterania. Sasaran utama adalah Asia-Timur dan Asia-Tenggara. Mulanya perluasan wilayah antara kedua negeri terbagi dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492. Portugis kearah Timur sedangkan Spanyol ke Barat. Masa itu belum ada gambaran bahwa itu bulat. Baru disadari ketika kapal-kapal layar kedua belah pihak bertemu di perairan Laut Sulawesi. Kenyataan ini juga menjadi penyebab terjadi proses reformasi gereja, karena tidak semua yang menjadi fatwa gereja adalah undang-undang, hingga citra kekuasaan Paus sebagai penguasa dan wakil Tuhan di bumi dan sistem pemerintahan absolute theokratis ambruk. Keruntuhan ini terjadi dengan munculnya gereja Protestan rintisan Marti Luther dan Calvin di Eropa yang kemudian menyebar pula ke berbagai koloni Eropa di Asia, Afrika dan Amerika.

Dari kesepakatan Tordesillas itu, Portugis menelusuri dari pesisir pantai Afrika dan Samudera Hindia. Sedangkan Spanyol menelusuri Samudera Atlantik, benua Amerika Selatan dan melayari

Samudera Pasifik. Pertemuan terjadi ketika kapal-kapal Spanyol pimpinan Ferdinand Magellan menelusuri Pasifik dan tiba di Pulau Kawio, gugusan kepulauan Sangir dan Talaud di Laut Sulawesi pada 1521. Untuk mencegah persaingan di perairan Laut Sulawesi dan Maluku Utara, kedua belah pihak memperbarui jalur lintas melalui perjanjian Saragosa pada tahun 1529. Perjanjian tersebut membagi wilayah dengan melakukan batas garis tujuh belas derajat lintang timur di perairan Maluku Utara. Namun dalam perjanjian tersebut, Spanyol merasa dirugikan karena tidak meraih lintas niaga dengan gugusan kepulauan penghasil rempah-rempah. Untuk itu mengirimkan ekspedisi menuju Pasifik Barat pada 1542. Pada bulan Februari tahun itu lima kapal Spanyol dengan 370 awak kapal pimpinan Ruy Lopez de Villalobos menuju gugusan Pasifik Barat dari Meksiko. Tujuannya untuk melakukan perluasan wilayah dan sekaligus memperoleh konsesi perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara.

Dari pelayaran ini Villalobos mendarat di gugusan kepulauan Utara disebut Filipina, diambil dari nama putera Raja Carlos V, yakni Pangeran Philip, ahli waris kerajaan Spanyol. Sekalipun Filipina tidak menghasilkan rempah-rempah, tetapi kedatangan Spanyol di gugusan kepulauan tersebut menimbulkan protes keras dari Portugis. Alasannya karena gugusan kepulauan itu berada di bagaian Barat, di lingkungan wilayahnya. Walau mengkonsentrasikan perhatiannya di Amerika-Tengah, Spanyol tetap menghendaki konsesi niaga rempah-rempah Maluku-Utara yang juga ingin harus mundur ke Filipina. Akibatnya Spanyol kehilangan pengaruh di Sulawesi Utara yang

sebelumnya menjadi kantong ekonomi dan menjalin hubungan dengan masyarakat Minahasa.

Pengenalan kuliner asal Spanyol di Minahasa cukup berkembang pesat. Peperangan di Filipina Selatan turut memengaruhi perekonomian Spanyol. Penyebab utama kekalahan Spanyol juga akibat aksi pemberontakan pendayung yang melayani kapal-kapal Spanyol. Sistem perkapalan Spanyol bertumpu pada pendayung yang umumnya terdiri dari budak-budak Spanyol. Biasanya kapal Spanyol dilayani sekitar 500-600 pendayung yang umumnya diambil dari penduduk wilayah yang dikuasai Spanyol. Umumnya pemberontakan para pendayung terjadi bila ransum makanan menipis dan terlalu dibatasi dalam pelayaran panjang. Untuk menguasainya Spanyol menyebarkan penanaman palawijaya termasuk aneka ragam cabai (rica), jahe (goraka), kunyit dll. Kesemuanya di tanam pada setiap wilayah yang dikuasai untuk persediaan logistic makanan awak kapal dan ratusan pendayung. Itu budaya makan pedis yang di ramu dengan berbagai bumbu masak yang diperkenalkan pelaut Spanyol menyebar pesat dan menjadi kegemaran masyarakat Minahasa ada pula yang menarik dari peninggalan kuliner Spanyol, yakni budaya Panada. Kue ini juga asal dari penduduk Amerika Latin yang di bawa oleh Spanyol melalui lintasan Pasifik. Bedanya, adonan panada, di sisi dengan daging sapi ataupun domba, sedangkan panada khas Minahasa di sisi dengan ikan.

Kota Kema merupakan pemukiman orang Spanyol, dimulai dari kalangan pendayung yang menetap dan tidak ingin kembali ke negeri leluhur mereka. Mereka menikahi perempuan-perempuan penduduk setempat dan hidup turun-temurun. Kema kemudian juga

dikenal para musafir Jerman, Belanda dan Inggris. Mereka ini pun berbaur dan berasimilasi dengan penduduk setempat, sehingga di Kema terbentuk masyarakat pluralistik dan memperkaya Minahasa dengan budaya majemuk dan hidup berdamapingan harmonis. Itulah sebabnya hingga masyarakat Minahasa tidak canggung dan mudah bergaul menghadapi orang-orang Barat.

Pergerakan mengusir penjajahan lawan Spanyol cukup seru. Minahasa juga pernah berperang dengan Spanyol yang dimulai tahun 1617 dan berakhir tahun 1645. Perang ini dipicu oleh ketidakadilan Spanyol terhadap orang-orang Minahasa, terutama dalam hal perdagangan beras, sebagai komoditi utama waktu itu. Perang terbuka terjadi nanti pada tahun 1644-1646. Akhir dari perang itu adalah kekalahan total Spanyol, sehingga berhasil diusir oleh para *waranei* (ksatria-ksatria Minahasa).

3. Zaman Penjajahan VOC

Pada akhir abad XVI bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh rintangan. Untuk menghindarkan persaingan di antara mereka sendiri (Belanda), mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC, (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah *Kompeni*.

VOC sebagai perwakilan dagang Belanda di Indonesia mendirikan markas besarnya di Batavia (sekarang: Jakarta) dan mulai menguasai wilayah-wilayah perdagangan di Nusantara. Kebijakan militer VOC menjadi semakin agresif dengan ikut campur tangan dalam urusan kerajaan-kerajaan. Praktik-praktik VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan

perlawanan. Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629. Walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jendral J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu.

Beberapa saat setelah sultan Agung mangkat, maka Mataram menjadi bagian kekuasaan kompeni. Bangsa Belanda mulai memainkan peranan politiknya dengan licik di Indonesia. Di Makasar yang memiliki kedudukan sangat vital berhasil juga dikuasai oleh kompeni tahun (1667) dan timbullah perlawanan dari rakyat Makasar di bawah pimpinan Hasanuddin. Menyusul pula wilayah Banten (Sultan Ageng Tirtoyoso) dapat ditundukkan oleh kompeni pada tahun 1648. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada Akhir abad XVII nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasaan kompeni pada saat itu. Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar pimpinan armada dari Minangkabau untuk mengadakan perlawanan bersama terhadap kompeni juga tidak mendapat sambutan yang hangat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah yang terpancar-pancar dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan sehingga banyak menimbulkan korban bagi anak-anak bangsa. Demikianlah Belanda pada awalnya menguasai daerah-daerah yang strategis dan kaya akan hasil rempah-rempah pada abad XVII dan nampaknya semakin memeperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer.

Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Kekuasaan Belanda dimulai dari Indonesia

bagian timur sebagai pusat rempah-rempah yaitu Maluku, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara sampai Jawa (Rukiyati, 2008: 41). Mereka ingin membulatkan hegemoni atau pengaruhnya sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Dengan demikian kekuasaan raja-raja di Nusantara harus menghadapi Belanda. Melihat praktik-praktik penjajahan Belanda tersebut maka meledeaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah Nusantara, anatar lain: Patimura di Maluku (1817), Baharuddin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837), Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Jelantik, Polim, Teuku Tjik di Tiro, Teuku Umar dalam perang Aceh.

Hampir semua orang dari generasi terdahulu yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakit dan rasanya hidup dalam penderitaan selama penjajahan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) oleh Van Den Bosch tahun 1828, seorang Gubernur Jenderal kepercayaan Ratu Wilhem I dalam pemerintahan Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Adapun pokok-pokok peraturan tanam paksa itu sbb:

- a. Petani diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya yang akan ditanami oleh tanaman wajib, yang akan diperdagangkan oleh Pemerintah. Tanaman wajib itu berupa trauma (nila), tebu, tembakau, kopi.
- b. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan

- c. Tanah yang dikenakan tanaman wajib dibebaskan dari pajak tanah.
- d. Tenaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib, tidak boleh melebihi tenaga kerja demi penggarapa tanah (sawah).
- e. Mereka yang tidak memiliki tanah, dikenakan wajib kerja di perkebunan selama 65 hari setahunnya.

Di tengah-tengah penderitaan rakyat Nusantara, akibat praktik Cultuur Stelsel sedangkan di negeri Belanda sendiri terjadi proses pembangunan besar-besaran hasil keringat rakyat di Nusantara yang mengalami proses pembodohan dan pemiskinan, muncul pula suuara-suara yang ingin membela rakyat jajahan di Parlemen Belanda terutama dari Partai Liberal yang memenangkan pemilu saat itu. Orang-orang yang menaruh simpatik atas penderitaan rakyat di Nusantara antara lain:

1. Baron Van houvell, seorang pendeta yang bekerja bertahun-tahun di wilayah Nusantara sehingga tehu kondisi rakyat di tanah air saat itu. Ketika kembali ke negeri Belanda, ia menjadi anggota parlemen dan membeberkan tentang kesengsaraan rakyat di Indonesia.
2. Eduard Douwes Dekker, terkenal dengan nama samara Multatuli, bekas Asisten ResidenLebak yang minta berhenti karena tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat Lebak akibat penjajahan Belada. Dalam bukunya *Max Havelaar*, yang ditulis tahun 1860 menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Banten akibat penjajahan Belanda.

3. Mr. Van Deventer, yang gigih membela kepentingan rakyat Indonesia dan berpendapat bahwa Belanda mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia. Utang ini harus dibayar oleh Belanda dan ia mengusulkan agar Belanda menerapkan *Etissche Politic*, ialah politik balas budi yang terdiri atas tiga program : *Edukasi*, *transmigrasi*, dan *irigasi*. Semua program ini hendaknya dilaksanakan semata-mata hanya untuk membantu rakyat Indonesia. Namun kenyataannya jauh dari harapan rakyat Nusantara (Sapriya, 2004: 75-76).

Perkembangan selanjutnya, pemerintah Belanda akhirnya mau menjalankan politik balas budi ini, terbukti dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, irigasi, namun ternyata bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia melainkan hanya untuk kepentingan Belanda sendiri. Misalnya pembangunan sekolah-sekolah bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang terampil dan murah, rumah sakit dibangun untuk keperluan tenaga yang kuat dan sehat sedangkan irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda.

Efek samping dari upaya Belanda dalam menerapkan Politik Balas Budi ini bagi bangsa Indonesia tidak dapat diingkari. Dampak ini merupakan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Terbukti setelah adanya politik balas budi, ada rakyat Indonesia yang mulai sadar atas nasibnya dimana banyak kepincangan sosial, kebodohan dan kemiskinan yang merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya inilah yang selanjutnya menjadi tokoh-tokoh peregrakan dan kebangkitan nasional.

Sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara yang sama bagi rakyat di Nusantara dalam penjajahan. A.K. Pringgodigdo (1991) membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas lima dimensi, yakni: (1) Pergerakan politik; (2) Pergerakan sarekat Sekerja; (3) Pergerakan Keagamaan; (4) Pergerakan wanita; (5) Pergerakan Pemuda. Lima dimensi pergerakan pada masa penjajahan Belanda ini dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut:

I. Masa 1908 - 1920

II. Masa 1920 - 1930

III. Masa 1930 - 1942

IV.

Tiga kurun waktu dimensi pergerakan masa penjajahan Belanda dapat dijelaskan sebagai berikut.

I. Masa 1908 - 1920

Ada tiga jenis pergerakan politik pada masa 1908-1920, ialah:

1). Organisasi-organisasi Indonesia yang terdiri atas Budi Utomo, Sarekat Islam, perkumpulan-perkumpulan berdasarkan kedaerahan.

2). Perkumpulan campuran, yakni bangsa Indonesia dan bukan bangsa Indonesia, seperti *Insulinde*, *national Indische Partij*, *De Indische Partij-Douwes Dekker*, *Indische Social Democratische Vereeniging-Sneevliet*, *Indische Social Democratische Partij*.

3). Perkumpulan campuran yang bertujuan Indonesia tetap dalam ikatan dengan negeri Belanda.

Pergerakan politik pada masa 1920-1932 untuk organisasi Indonesia meliputi Partai Komunis Indonesia, Sarekat Islam, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia,

perkumpulan yang berdasarkan kedaerahan, dan golongan berdasarkan keagamaan. Sedangkan pergerakan politik pada masa 1930-1942 meliputi Pendidikan Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Gerindo, Partai persatuan Indonesia, Partai rakyat Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia, Partai Indonesia raya, PSII, Penyedar, PII dan PSII ke-2, golongan berdasarkan keagamaan, GAPI dan Majelis Rakyat Indonesia.

Dalam uraian bab ini beberapa organisasi pergerakan kebangsaan di atas akan dibahas sedangkan organisasi lainnya yang tidak diuraikan di sini, dianjurkan agar anda mempelajari referensi utama yang digunakan sebagai rujukan.

a. Budi Utomo

Merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang berbentuk modern. Maksud organisasi modern adalah organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, program kerja berdasarkan peraturan yang ada. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo dilatarbelakangi oleh propaganda dr. Wahidin Sudirohusodo untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pengajaran yang pada saat ini kondisinya sangat terbelakang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun usaha untuk mengadakan *studiefonds* mengalami kegagalan tetapi ide ini member kesan tersendiri bagi dua orang murid STOVIA, ialah R. Sutomo dan R. Gunawan Mangunkusumo.

Pada Kongres pertama Budi Utomo, 5 Oktober 1908 di Yogyakarta, Kongres berhasil menetapkan tujuan perkumpulan, sebagai berikut: Kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian,

peternakan, dan dagang teknik dan industry, kebudayaan (kesenian dan ilmu).

Budi Utomo sebagai perkumpulan orang-orang yang berhaluan berdasarkan kebangsaan Jawa liberal, mulai kehilangan kedudukannya karena mulai bermunculan organisasi lain yang berhaluan agama seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah serta ISDV yang berhaluan Marxis. Oleh karena itu itu dalam rapat umum, 5-6 Agustus 1915 di Bandung Budi Utomo menetapkan mosi yang menegaskan perlunya milisi untuk bangsa Indonesia, tetapi harus melalui Parlemen (DPR) dengan cara membentuk undang-undang, namun pada saat itu belum ada. Ketika Volksraad dibentuk pada tahun 1917, Budi Utomo menetapkan sebuah program politik yang bercita-cita mewujudkan pemerintahan parlementer berazaskan kebangsaan. Untuk mencapai cita-cita itu Budi Utomo berusaha menuntut peraturan pemilihan yang baik dan ada perbaikan dalam sistem peradilan sehingga ada kesamaan kedudukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

b. Sarekat Islam

Didirikan di Solo tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Semula namanya Sarekatdagang Islam (SDI) berasaskan kooperatif yang bertujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam sebagai agama yang memiliki pemeluk terbesar di Indonesia. Keanggotaan Sarekat Islam ternyata dari tahun ke tahun semakin besar karena merupakan organisasi yang telah lama diinginkan oleh rakyat, terutama para pedagang dan umat Islam. Lahirnya Sarekat Islam lebih banyak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Perdagangan bangsa Tionghoa yang telah banyak menghambat perdagangan Indonesia, seperti monopoli bahan-bahan batik dan tingkah laku sombong orang Tionghoa sesudah terjadinya revolusi di Tiongkok.
2. Semakin meningkatnya penyebaran agama Kristen di tanah air dan adanya ucapan penghinaan parlemen Belanda tentang tipisnya kepercayaan beragama orang Indonesia.
3. Cara adat istiadat lama yang terus dipakai di daerah-daerah kerajaan yang makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan.

Sampai tahun 1912, Sarekat Islam tidak mencatumkan tujuan politik dalam anggaran dasarnya karena pada saat itu pemerintah Belanda melarang pendirian partai politik oleh bangsa jajahan. Hal ini ditegaskan dalam Kongres Sarekat Islam pertama, 26 Januari 1913 di Surabaya yang dipimpin oleh Tjokroaminoto bahwa Sarekat Islam bukan partai politik dan tidak beraksi melawan pemerintahan Belanda. Namun demikian, pemerintah Belanda merasa tidak senang dengan Sarekat Islam yang berani dan semakin besar karena banyak cabang-cabangnya di daerah dengan jumlah anggota mencapai 12.000 orang.

Dalam kongres kedua di Solo diputuskan bahwa Sarekat Islam hanya terbuka untuk orang Indonesia dan bukan untuk pegawai pangreh praja agar tidak berubah corak dan tetap menjadi organisasi rakyat. Tujuan dalam anggaran dasar pun mengalami perluasan, yakni :

- a. Memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran.
- b. Memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan faham-faham yang keliru tentang agama Islam.
- c. Mempertebal rasa persaudara dan tolong-menolong diantara anggotanya.

Kongres ketiga di Bandung 17-24 Juni 1916, dinamakan Kongres Nasional pertama. Sebanyak 80 Sarekat Islam daerah mengirimkan perwakilan dari anggota yang jumlahnya telah mencapai 800.000 orang. Kongres yang dipimpin oleh Tjokroaminoto mencantumkan istilah nasional dimaksudkan bahwa Sarekat Islam menuju ke arah persatuan yang teguh dari semua golongan bangsa Indonesia. Sarekat Islam ingin membawa bangsa Indonesia sebagai suatu nation.

c. National Indische Partij

National Indische Partij (NIP) dan ISDV yang berdasarkan sosialisme kiri dan tidak banyak mendapat anggota mulai melihat keberhasilan Sarekat Islam sebagai organisasi rakyat dan berusaha mendapatkan pengaruh dalam Sarekat Islam (SI). Namun NIP tidak berhasil masuk dalam SI karena keanggotaan NIP meliputi pula peranakan Belanda dan Tionghoa. Sedangkan ISDV memiliki kesamaan dalam arah organisasi dan aksi antara lain menentang adat-adat kuno dan hak istimewa golongan Tionghoa. Upaya mempengaruhi Sarekat Islam oleh Semaun dan Darsono yang beraliran sosialis kiri menunjukkan keberhasilan, terbukti sarekat Islam berubah dan bergeser menjadi berhaluan kiri.

4. Zaman Penjajahan Inggris

Seperti tercatat dalam sejarah, Indonesia pernah berada dalam jajahan Inggris. Inggris secara resmi menjajah Indonesia lewat perjanjian Tuntang (1811) dimana perjanjian Tuntang memuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janssens (gubernur Jenderal Hindia Belanda) kepada Inggris.

Namun sebelum perjanjian Tuntang ini, sebenarnya Inggris telah datang ke Indonesia jauh sebelumnya. Perhatian terhadap Indonesia dimulai sewaktu penjelajah F. Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya ekspedisi lainnya dikirim pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama East Indies Company (EIC). EIC mengemban misi untuk hubungan dagang dengan Indonesia. Pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Pada tahun 1604, Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Banda. Tahun 1609 mendirikan pos di Sukadana Kalimantan. Tahun 1613 berdagang dengan Makasar (kerajaan Gowa), dan pada tahun 1614 mendirikan loji di Batavia (Jakarta).

Dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapat tantangan berat dari Belanda yang sudah mendirikan VOC. Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir orang Inggris dari Indonesia. Setelah terjadi tragedi *Ambon Massacre*, EIC mengundurkan diri dari Indonesia dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam sampai memperoleh kesuksesan. Inggris kembali memperoleh kekuasaan di Indonesia melalui keberhasilannya memenangkan perjanjian di Indonesia melalui keberhasilannya

memenangkan perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Selama lima tahun (1811-1816), Inggris memegang kendali pemerintahan dan kekuasaannya di Indonesia.

Indonesia mulai tahun 1811 berada dibawah kekuasaan Inggris. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Indonesia. Beberapa kebijakan Raffles yang dilakukan di Indonesia antara lain:

1. Jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan;
2. Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam;
3. Tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut;
4. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah.

Akibat dari kebijakan diatas, maka oenggarap tanah harus membayar pajak kepada pemerintah sebagai ganti uang sewa. Sistem tersebut disebut Lamdrent atau sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain:

1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut;
2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah;
3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai;
4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Sistem landrent ini diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah sekitar Batavia dan parahyangan. Hal itu disebabkan daerah-daerah Batavia pada umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah seitar Parahyangan

merupakan daerah wajib tanam kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Selama sistem tersebut dijalankan, kekuasaan Bupati sebagai pejabat tradisional semakin tersisihkan karena tergantikan oleh pejabat berbangsa Eropa yang semakin banyak berdatangan.

Raffles berkuasa dalam waktu yang cukup singkat. Sebab sejak tahun 1816 kerajaan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Pada tahun 1813, terjadi perang Lipzig antara Inggris melawan Perancis. Perang itu dimenangkan oleh Inggris dan kekaisaran Napoleon di Perancis jatuh pada tahun 1814. Kekalahan Perancis itu membawa dampak pada pemerintahan di negeri Belanda yaitu dengan berakhirnya pemerintahan Louis Napoleon di negeri Belanda. Pada tahun itu juga terjadi perundingan perdamaian antara Inggris dan Belanda. Perundingan itu menghasilkan konvensi London atau Perjanjian London (1814), yang isinya antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda, kecuali daerah Bangka, Belitung dan Bengkulu yang diterima Inggris dari Sultan Najamuddin. Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816. Dengan demikian dapat kembali berkuasa di Indonesia.

5. Zaman Kebangkitan Nasional

Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Filipina (1898), yang dipelopori Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsuniam (1905), gerakan Sun Yat Sen dengan Republik Cinyanya (1911). Partai Kongres di India dengan

tokoh Tilak dan Gandhi. Adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri.

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi pergerakan nasional itu antara lain: Serikat Dagang Islam (SDI) (1909), yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) tahun (1911) di bawah H.O.S. Cokroaminoto.

Berikutnya muncullah Indische Parjit (1913), yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu: Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (yang kemudian lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro). Sejak semula partai ini menunjukkan keradikalannya, sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri (1913).

Dalam situasi yang menggoncangkan itu muncullah Partai Nasional Indonesia (PNI) (1927) yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Mulailah kini perjuangan nasional Indonesia dititikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Tujuan itu diekspresikan dengan kata-kata yang jelas, kemudian diikuti dengan tampilannya golongan pemuda dengan tokoh-tokohnya antara lain: Muh. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto, serta tokoh-tokoh muda

lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya satu Nusa/tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Lagu Indonesia raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.

Perkembangan selanjutnya PNI oleh para pengikutnya dibubarkan, dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia dengan singkatan Partindo (1931). Kemudian golongan democrat antara lain Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (1933), dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

6. Zaman Penjajahan Jepang

Tahun 1940, tepatnya tanggal 10 Mei 1940 Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940. Ratu Wihelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintahan jajahan di Indonesia. Janji Belanda tentang Indonesia merdeka di kelak kemudian hari dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sampai akhir pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud.

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang Pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perang melawan Sekutu Barat yaitu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, belanda dan Negara Sekutu lainnya) nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu agar dapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintahan Jepang

bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari.

Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Jika dibandingkan dengan penjajahan Belanda (3,5 abad) terlihat sangat singkat. Namun demikian penderitaannya yang dirasakan bangsa Indonesia jauh lebih berat, terutama dengan adanya romusha. Selokan Mataram di Yogyakarta merupakan contoh proyong terpaksa menjadi romusha, kerja paksa zaman Jepang.

Tahun 1945 tepatnya pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan ahri ulang tahun Kaisar Jepang beliau memberikan hadiah 'ulang tahun' kepada bangsa Indonesia yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa 'kemerdekaan tanpa syarat'. Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah, dengan *Maklumat Gunseikan* (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), Nomor 23. Dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan dianjurkan kepada bangsa Indonesia untuk berani mendirikan Negara Indonesia merdeka di hadapan musuh-musuh Jepang yaitu Sekutu termasuk kaku tangannya NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Bahkan NICA telah melancarkan serangannya di pulau Tarakan dan Morotai.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Tioosakai*. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua serta para anggota sebagai berikut:

Ketua (Kaicoo) : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
Wakil Ketua : Itibangase Yosio (seorang anggota luar biasa)
: R.P. Soeroso

Enampuluh (60) orang anggota biasa (lin) bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda), kebanyakan berasal dari pulau Jawa, tetapi adapula yang berasal dari Sumatra, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang peranakan Eropa, Cina, Arab. Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa, karena Badan penyelidik itu diadakan oleh Saikoo Sikikan Jawa. Nama para anggota BPUPKI menurut nomor tempat duduknya dalam sidang adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno
2. Mr. Muh. Yamin
3. Dr. R. Kusumah Atmaja
4. R. Abdulrahim Pratalykrama
5. M. Aris
6. Ki Hajar Dewantara
7. Ki Bagus Hadikusuma
8. M.P.H. Bintoro
9. AK. Moezakir
10. B.P.H. Poerbojo
11. R.A.A. Wiranatakoesoema
12. Ir. R. Ashar Soetejo Moenandar
13. Oeij Tjiang Tjoei

14. Dr. Moh. Hatta
15. Oei Tjong Hauw
16. H. Agus Salim
17. M. Soetarjdo Kartohadikusumo
18. R. M. Margono Djojohadikusumo
19. K.H. Abdul Halim
20. K.H.Masjkoer
21. R. Soedirman
22. Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat
23. Prof. Dr. Soepomo
24. Prof. Ir. Roeseno
25. Mr. R.P. Singgih
26. Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso
27. R.M.T A. Soerjo
28. R. Ruslan Wongsokusumo
29. R. Soesanto Tirtoprodjo
30. Ny. R.S.S. Soemario Mangunpoespito
31. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
32. Liem Koen Hian
33. Mr. J. Latuharhary
34. Mr. R. Hindromartono
35. R. Soekardjo Wirjopranoto
36. H. AH. Sanoesi
37. Agus Moechsin Dasaat
38. Mr. Tan Eng Hoa
39. Ir. R.M.P. Soerachman
40. RAA. Soemitro Kolopaking

41. K.R.M.T.H. Woeryaningrat
42. Mr. A. Soebardjo
43. Prof. Dr. R. Djenal Asiki
44. Abikoeso
45. Parada Harahap
46. Mr. R.M. Sartono
47. K.H.M. Mansoer
48. K.R.M.A. Sosrodiningrat
49. Mr. Soewandi
50. K.H.A. Wachid Hasyim
51. P.F. Dahler
52. Dr. Soekiman
53. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro
54. R. Oto Iskandar Dinata
55. A. Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A.A. Maramis
59. Mr. Samsuudin
60. Mr. R. Sastromoeljono (Sekretariat Negara, 1995: XXV).

1. Sidang BPUPKI Pertama (29 Mei 1945 s.d. 1 Juni 1945)

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari. Berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut : (a) tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin, (b) tanggal 31 Mei 1945 Prof. Soepomo dan (c) tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno.

Calon rumusan dasar Negara Indonesia, baik menurut Mr. Muh. Yamin maupun Ir. Soekarno telah disebutkan di bab I. Selain usulan dasar Negara tersebut, Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara yang berisi rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

2. Sidang BPUPKI Kedua (10 Juli s.d. 16 Juli 1945)

Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua penambahan 6 anggota baru yaitu, 1) Abdul fatah Hasan, 2). Asikin Natanegara, 3) Soerjo Hamidjojo, 4) Muhammad Noor, 5) Besar, 6) Abdul Kaffar.

Selain tambahan anggota baru, Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak 1 Juni 1945. Adapun keanggotan Panitia kecil adalah sebagai berikut :

1. Ir. Soekarno
2. Wachid Hasyim
3. Mr. Muh. Yamin
4. Mr. Maramis
5. Drs. Moh. Hatta
6. Mr. Soebardjo
7. Kyai Abdoel Kahar Moezakir
8. Abikoesno Tjokrosoejoso
9. Haji Agus Salim

Karena berjumlah Sembilan orang, maka Panitia Kecil biasa disebut dengan istilah Panitia Sembilan.

Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Sidang-sidang PPKI dilaksanakan selama empat kali, yakni:

1. Sidang Pertama (18 Agustus 1945)

Sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama
- 3) Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.

2. Sidang Kedua (19 Agustus 1945)

Pada sidang PPKI kedua berhasil menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1). Tentang daerah Provinsi, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Jawa Barat
- b. Jawa Tengah
- c. Jawa Timur
- d. Sumatera
- e. Borneo
- f. Sulawesi
- g. Maluku
- h. Sunda Kecil

2). Dibentuknya kementerian atau departemen yang meliputi 12 Departemen, sebagai berikut:

- a. Departemen Dalam Negeri
- b. Departemen Luar Negeri
- c. Departemen Kehakiman

- d. Departemen Keuangan
- e. Departemen Kemakmuran
- f. Departemen Kesehatan
- g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, Kebudayaan
- h. Departemen Sosial
- i. Departemen Pertahanan
- j. Departemen Penerangan
- k. Departemen Perhubungan
- l. Departemen Pekerjaan Umum (Sekretariat Negara, 1995: 461)

3. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945)

Pada sidang ketiga PPKI dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang 'Badan Penolong Keluarga Korban Perang'. Adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri dari delapan pasal. Salah satu dari pasal tersebut yaitu pasal 2, dibentuklah suatu badan yang disebut 'Badan Keamanan Rakyat (BKR).

4. Sidang Keempat (22 Agustus 1945)

Pada sidang keempat PPKI membahas agenda Komite Nasional Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta.

BAB III

SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

A. Pengertian dan Konsep Dasar Sejarah

1. Pengertian Sejarah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sejarah dapat diartikan sebagai 1) asal-usul (keturunan) silsilah, 2) kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, cerita, 3) pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau (KBBI, 2001:1011).

Sejarah adalah sebuah bidang ilmu yang banyak dikembangkan di berbagai negeri oleh berbagai suku bangsa. Orang bergairah mencarinya. Orang kebanyakan atau orang awam ingin mengetahuinya. Orang berpengetahuan dan orang yang kurang berpengetahuan dapat memahaminya. Ini karena permukaan sejarah tidak lebih daripada informasi mengenal peristiwa politik, kerajaan dan kejadian pada masa lalu yang disajikan dengan menarik. Di pihak lain, sejarah dalam arti yang lebih berkaitan dengan renungan dan ikhtiar mencari kebenaran, mencari penjelasan yang setepat mungkin tentang sebab-musabab dan asal-usul hal-hal yang ada, dan dengan pengetahuan yang dalam tentang kejadian-kejadian dan sisi bagaimana dan

mengapanya. Sejarah, karena itu, berakar kuat dalam filsafat. Sejarah, karena itu, patut dijadikan salah satu cabang filsafat. (Ibn Khaldun 1967).

Dalam *Concise Oxford Dictionary* edisi 1964, sejarah adalah catatan terus menerus secara sistematis tentang kejadian-kejadian dalam masyarakat, kajian perkembangan Negara, rangkaian kejadian yang berkaitan dengan Negara, orang benda, dan sebagainya (Heather Sutherland dalam Henk Schulte, dkk (Editor), 2008: 33). Defenisi ini kelihatannya sangat jelas. Setelah dilihat lebih dekat, kata sejarah itu ternyata rumit. Di satu pihak, sejarah berarti catatan seperti apa yang ditulis, dan karena itu berarti kajian masa lalu. Di pihak lain, sejarah juga berarti rangkaian kejadian, terutama dalam kaitan dengan bangsa. Jadi sejarah dapat berarti apa yang telah terjadi menurut kata kita, dan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya keduanya merupakan dua konsep yang sangat berbeda satu sama lain, tetapi ada kesamaan bahwa sejarah berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi.

Sejarah menurut konsep pertama ialah narasi kronologis yang kita putuskan untuk disusun. Sejarah menurut konsep kedua berarti keseluruhan dari kejadian-kejadian yang tidak terhitung banyaknya dari masa lalu itu sendiri. Bagaimana mengatasi kontradiksi yang tidak terelakkan antara narasi terfokus ciptaan kita (sejarah sebagai catatan) dan kekacauan masa lalu (sejarah sebagai kejadian), inilah persoalan utama historiografi.

Perkataan sejarah (*History*) yang kita gunakan pada masa kini berpuncak daripada perkataan Arab yaitu *Syajaratum* yang

berarti pohon. Dari sudut lain pula, istilah *history* merupakan terjemahan dari perkataan Yunani yakni *Histories* yang membawa makna satu penyelidikan ataupun pengkajian. Sejarah secara sempit adalah sebuah peristiwa manusia yang bersumber dari realisasi diri, kebebasan dan keputusan daya rohani. Sedangkan secara luas, sejarah adalah setiap peristiwa (kejadian). Sejarah adalah catatan peristiwa masa lampau, studi tentang sebab dan akibat. Sejarah kita adalah cerita hidup kita.

Sejarah sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa disebabkan beberapa hal :

- a. Sejarah merupakan gambaran kehidupan masyarakat di masa lampau,
- b. Dengan sejarah kita dapat lebih mengetahui peristiwa/kejadian yang terjadi di masa lampau,
- c. Peristiwa yang terjadi di masa lampau tersebut dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di masa kini dan yang akan datang,
- d. Dengan sejarah kita tidak sekedar mengingat data-data dan fakta-fakta yang ada tetapi lebih memaknainya dengan mengetahui mengapa peristiwa tersebut terjadi.

Secara *etimologi* atau asal-usul kata, sejarah diambil dari berbagai macam istilah, diantaranya:

- a. Kata dalam bahasa Arab yaitu *syajaratun* artinya pohon. Mereka mengenal juga kata *syajarah annasab*, artinya pohon silsilah. Pohon dalam hal ini dihubungkan dengan keturunan atau asal usul keluarga raja/dinasti tertentu. Hal ini dijadikan

elemen utama dalam kisah sejarah pada masa awal. Dikatakan sebagai pohon sebab pohon akan terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks/maju. Sejarah seperti pohon yang terus berkembang dari akar sampai ke ranting yang terkecil.

- b. Dalam bahasa Jerman, yaitu *Geschichte* berarti sesuatu yang telah terjadi.
- c. Dalam bahasa Belanda yaitu *Geschiedenis*, yang berarti terjadi.
- d. Dalam bahasa Inggris yaitu *History*, artinya masa lampau umat manusia.
- e. Kata *History* sebenarnya diturunkan dari bahasa latin dan Yunani yaitu *Historia* artinya informasi/penacarian, dapat pula diartikan ilmu.

Hal ini menunjukkan bahwa pengkajian sejarah sepenuhnya bergantung kepada penyelidikan terhadap perkara-perkara yang benar-benar pernah terjadi. *Istor* dalam bahasa Yunani artinya orang pandai, *Istoria* artinya ilmu yang khusus untuk menelaah gejala-gejala dalam urutan kronologis. Berdasarkan asal kata tersebut maka sejarah dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau dalam kehidupan umat manusia.

Sejarah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dan bahkan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih maju atau modern. Berdasarkan bahasa Indonesia, sejarah mengandung 3 pengertian:

1. Sejarah adalah silsilah atau asal-usul.
2. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
3. Sejarah adalah ilmu, pengetahuan, dan cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau.

Jadi pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia.

2. Konsep Dasar Sejarah

Sejarah mempunyai sifat yang khas disbanding ilmu yang lain, yaitu :

- a) Adanya masa lalu yang berdasarkan urutan waktu atau kronologis.
- b) Peristiwa sejarah menyangkut tiga dimensi waktu yaitu masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang.
- c) Ada hubungan sebab akibat atau kausalitas dari peristiwa tersebut.
- d) Kebenaran dari peristiwa sejarah bersifat sementara (merupakan hipotesis) yang akan gugur apabila ditemukan data pembuktian yang baru.

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. Mengapa sejarah selalu

berhubungan dengan masa lalu/lampau? Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Tetapi, masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti, dan tertutup.

Masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Dalam sejarah, masa lampau manusia bukan demi masa lampau itu sendiri dan dilupakan begitu saja, sebab sejarah itu berkesinambungan. Apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang.

Masa lampau, merupakan masa yang telah dilewati oleh masyarakat suatu bangsa. Masa lampau itu selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan, dan kesinambungan atau *when, where, who, what, why, dan how*. Kejadian yang menyangkut kehidupan manusia merupakan unsure penting dalam sejarah yang menempati rentang waktu. Waktu akan memberikan makna dalam kehidupan dunia yang sedang dijalani sehingga selama hidup manusia tidak dapat lepas dari waktu karena perjalanan hidup manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri. Perkembangan sejarah manusia akan mempengaruhi perkembangan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang.

B. Sejarah Dari Berbagai Sudut Pandang

Sejarah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu :

1. Sejarah sebagai peristiwa

Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sehingga sejarah sebagai peristiwa yaitu peristiwa yang sebenarnya telah terjadi/berlangsung pada waktu lampau. Sejarah melihat sebagaimana/seperti apa yang seharusnya terjadi (*histoire realite*). Sejarah sebagai peristiwa merupakan suatu kejadian di masa lampau yang hanya sekali terjadi serta tidak bisa diulang.

Ciri utama dari Sejarah sebagai peristiwa adalah sebagai berikut.

a. Abadi,

Karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah. Sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan tidak akan berubah ataupun diubah. Oleh karena itulah maka peristiwa tersebut akan tetap dikenang sepanjang masa.

b. Unik,

Karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Peristiwa tersebut tidak dapat diulang, jika ingin diulang tidak akan sama persis.

c. Penting,

Karena peristiwa yang terjadi tersebut mempunyai arti bagi seseorang bahkan dapat pula menentukan kehidupan orang banyak.

Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai sajarah. Sebuah kenyataan sejarah dapat diketahui melalui bukti-bukti sejarah yang dapat menjadi saksi terhadap peristiwa yang telah

terjadi. Agar sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah maka harus memenuhi ciri-ciri berikut ini.

- a. Peristiwa tersebut berhubungan dengan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun kelompok,
- b. Memperhatikan dimensi ruang dan waktu (kapan dan dimana),
- c. Peristiwa tersebut dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain, contoh: peristiwa ekonomi yang terjadi bias disebabkan oleh aspek politik, sosial, dan budaya,
- d. Adanya hubungan sebab-akibat dari peristiwa tersebut. Adanya hubungan sebab akibat baik karena faktor dari dalam maupun dari luar peristiwa tersebut. Penyebab adalah hal yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi.
- e. Peristiwa sejarah yang terjadi merupakan sebuah perubahan dalam kehidupan. Hal ini disebabkan karena sejarah pada hakikatnya adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Selain itu, sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan tersebut dapat meliputi berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Peristiwa adalah kenyataan yang bersifat absolute atau mutlak dan objektif. Sejarah sebagai peristiwa merupakan suatu kenyataan yang objektif artinya kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat manusia. Kenyataan ini dapat dilihat dari fakta-fakta sejarahnya. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan manusia seperti peristiwa politik, ekonomi, dan sosial.

2. Sejarah sebagai kisah

Sejarah sebagai kisah merupakan *rekontruksidari suatu peristiwa yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang*. Sejarah sebagai sebuah kisah dapat berbentuk lisan dan tulisan.

a. *Bentuk Lisan*

Contoh penuturan secara lisan baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tentang peristiwa yang telah terjadi.

b. *Bentuk tulisan*, dapat berupa kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah.

Sejarah sebagai kisah sifatnya akan subjektif karena tergantung pada interpretasi atau penafsirannya yang dilakukan oleh penulis sejarah. Subjektivitas terjadi lebih banyak diakibatkan oleh faktor-faktor kepribadian si penulis atau penutur cerita. Sejarah sebagai kisah dapat berupa narasi yang disusun berdasarkan memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Sejarah sebagai kisah dapat diulang, ditulis oleh siapapun dan kapan saja. Untuk mewujudkan sejarah sebagai kisah diperlukan fakta-fakta yang diperoleh atau dirumuskan dari sumber sejarah. Tetapi tidak semua fakta sejarah dapat diangkat dan dikisahkan hanya peristiwa penting yang dapat dikisahkan.

Faktor yang harus diperhatikan dan mempengaruhi dalam melihat sejarah sebagai kisah, adalah sebagai berikut.

a. *Kepentingan yang diperjuangkannya*

Faktor kepentingan dapat terlihat dalam cara seseorang menuliskan dan menceritakan kisah/peristiwa sejarah. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok.

Contoh :

Seorang pencerita biasanya akan lebih menonjolkan perannya sendiri dalam suatu peristiwa. Misalnya, seorang pejuang akan menceritakan kehebatannya dalam menghadapi penjajah.

b. *Kelompok sosial dimana dia berada*

Dalam hal ini adalah lingkungan tempat ia bergaul, berhubungan dengan sesama pekerjaannya atau statusnya. Dari mana asal pencerita sejarah tersebut juga mempengaruhi cara penulisan sejarah.

Contoh :

Seorang sejarawan akan menulis sejarah dengan menggunakan kaidah akademik ilmu sejarah sedang seorang wartawan akan menulis sejarah dengan bahasa wartawan.

c. *Perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya*

Pengetahuan dan latar belakang kemampuan ilmu yang dimiliki pencerita sejarah juga mempengaruhi kisah sejarah yang disampaikan. Hal tersebut dapat terlihat dari kelengkapan kisah yang akan disampaikan, gaya penyampaian, dan interpretasinya atas peristiwa sejarah yang akan dikisahkannya.

d. *Kemampuan bahasa yang dimilikinya*

Pengaruh kemampuan bahasa seorang penutur/pencerita sejarah sebagai kisah terlihat dari hasil rekonstruksi penuturan kisah sejarah. Hal ini akan sangat bergantung pada kemampuan bahasa si penutur kisah sejarah.

3. Sejarah sebagai ilmu

Sejarah merupakan suatu ilmu yang mempelajari masa lampau manusia. Sebagai ilmu, sejarah merupakan ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki seperangkat metode dan teori yang dipergunakan untuk meneliti dan menganalisis serta menjelaskan kerangka masa lampau yang dipermasalahkan. Sejarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sejarawan harus menulis apa yang sesungguhnya terjadi sehingga sejarah akan menjadi objektif. Sejarah melihat manusia tertentu yang mempunyai tempat dan waktu tertentu serta terlibat dalam kejadian tertentu. Sejarah tidak hanya melihat manusia dalam gambaran dan angan-angan saja.

Sejarah sebagai ilmu memiliki objek, tujuan dan metode. Sebagai ilmu sejarah bersifat empiris dan tetap berupaya menjaga objektivitasnya sekalipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan subjektivitas.

Menurut Kuntowijoyo, ciri-ciri atau karakteristik sejarah sebagai ilmu adalah sebagai berikut.

a. *Bersifat Empiris*

Empiris berasal dari kata Yunani *emperia* artinya pengalaman, percobaan, penemuan, pengamatan yang dilakukan. Bersifat empiris sebab sejarah melakukan kajian pada peristiwa yang

sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah akan sangat tergantung pada pengalaman dan aktivitas nyata manusia yang direkam dalam dokumen. Untuk selanjutnya dokumen tersebut diteliti oleh para sejarawan untuk menemukan fakta yang akan diinterpretasi/ditafsirkan menjadi tulisan sejarah. Sejarah hanya meninggalkan jejak berupa dokumen.

b. *Memiliki objek*

Objek sejarah yaitu perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu (masa lampau). Waktu merupakan unsure penting dalam sejarah. Waktu dalam hal ini adalah waktu lampau sehingga asal mula maupun latar belakang menjadi pembahasan utama dalam kajian sejarah.

c. *Memiliki teori*

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Teori dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Teori tersebut diajarkan berdasarkan keperluan peradaban. Rekonstruksi sejarah yang dilakukan mengenal adanya teori yang berkaitan dengan sebab akibat, eksplanasi, objektivitas, dan subjektivitas.

d. *Memiliki metode*

Metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai suatu maksud. Setiap ilmu tentu memiliki tujuan. Tujuan dalam ilmu sejarah adalah menjelaskan perkembangan atau perubahan kehidupan masyarakat. Metode dalam ilmu sejarah diperlukan untuk menjelaskan perkembangan atau perubahan secara benar. Dalam sejarah dikenal metode

sejarah guna mencari kebenaran sejarah. Sehingga seorang sejarawan harus lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan jangan terlalu berani tetapi sewajarnya saja.

e. *Mempunyai generalisasi*

Studi dari suatu ilmu selalu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Jadi generalisasi merupakan sebuah kesimpulan umum dan pengamatan dan pemahaman penulis.

Ilmu pengetahuan social sifatnya selalu berubah dan mudah terjadi sebab kondisi setempat berubah, waktunya berubah, dan adanya pengaruh dari luar. Manusia tetap ingin tahu yang terjadi di masa lampau. Sejarah berbeda dengan ilmu sosial/ kemanusiaan yang lain seperti antropologi dan sosiologi sebab :

- a. Sejarah membicarakan manusia dari segi waktu yang artinya sejarah memperhatikan perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan.
- b. Dalam meneliti objeknya, sejarah berpegangan pada teorinya sendiri. Teori tersebut ditemukan dalam setiap tradisi sejarah. Teori sejarah diajarkan sesuai dengan keperluan peradaban masing-masing tradisi.
- c. Sejarah juga mempunyai generalisasi, dalam menarik kesimpulan umumnya dapat juga sebagai koreksi terhadap ilmu-ilmu lain.
- d. Sejarah juga mempunyai metode sendiri yang sifatnya terbuka dan hanya tunduk pada fakta.

- e. Sejarah membutuhkan riset, penulisan yang baik, penalaran yang teratur dan sistematika yang runtut, serta konsep yang jelas.

4. Sejarah sebagai seni

Sejarah sebagai seni merupakan *suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu kisah/ peristiwa di masa lalu. Seni dibutuhkan dalam penulisan sejarah karena :*

- a. Jika hanya mementingkan data-data maka akan sangat kaku dalam berkisah.
- b. Jika terlalu mementingkan aspek seni maka akan menjadi kehilangan fakta yang harus diungkap.
- c. Seni dibutuhkan untuk memperindah penuturan/ pengisahan suatu cerita.
- d. Seperti seni, sejarah juga membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi dan gaya bahasa.
- e. Seorang sejarawan sebaiknya mampu mengkombinasikan antara pengisahan (yang mementingkan detail dan fakta-fakta) dengan kemampuannya memanfaatkan intuisi dan imajinasinya sehingga dapat menyajikan peristiwa yang objektif, lancar, dan mengalir.

Ciri sejarah sebagai seni, terdapat :

- a. Intuisi:
Intuisi merupakan kemampuan mengetahui dan memahami sesuatu secara langsung mengenai suatu topik yang sederhana diteliti. Dalam penelitian untuk menentukan sesuatu, sejarawan membutuhkan intuisi dan

untuk mendapatkannya ia harus bekerja keras dengan data yang ada. Seorang sejarawan harus tetap ingat akan data-datanya, harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi sesudahnya. Berbeda dengan seorang seniman jika ingin menulis mungkin ia akan berjalan-jalan sambil menunggu ilham sebelum melanjutkan proses kreatifnya.

b. Emosi:

Emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang. Emosi diperlukan guna mewariskan nilai-nilai tertentu asalkan penulis itu tetap setia pada fakta. Dengan melibatkan emosi, mengajak pembaca seakan-akan hadir dan menyaksikan sendiri peristiwa itu.

c. Gaya bahasa:

Gaya bahasa merupakan cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau lisan. Gaya bahasa diperlukan sejarawan guna meuliskan sebuah peristiwa. Gaya bahasa yang baik yaitu yang dapat menggambarkan detail-detail secara lugas dan tidak berbelit-belit.

d. Imajinasi :

Imajinasi merupakan daya pikiran untuk membayangkan kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang (khayalan). Imajinasi diperlukan sejarawan untuk membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, serta apa yang akan terjadi.

Sejak defenisi sejarah menurut Oxford muncul, penulisan sejarah telah banyak berubah. Sejarawan dipaksa untuk bertanya mengapa mereka menetapkan pilihan-pilihannya. Mengapa beberapa kejadian dimasukkan ke dalam narasi sejarah, mengapa kejadian-kejadian yang lain tidak? Mengapa setiap sejarawan memberikan makna tertentu kepada suatu kejadian tertentu, padahal kejadian itu dapat saja memiliki berabagai arti dalam berbagai konteks? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita harus '*hitoricise history*' (menguji sejarah penulisan sejarah) agar dapat memahami kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang mempengaruhi perkembangannya (penulisan sejarah).

Pada umumnya disepakati bahwa satu-satunya bentuk sejarah sebagai catatan yang umum diterima ialah apa yang dinamakan *modern professional history* (sejarah professional modern, SPM). SPM, sebagaimana halnya Negara birokrasi yang erat berkaitan dengannya, mencapai bentuknya yang khas di Eropa pada abad ke-19. Baik topik (terutama politik, diplomasi, dan militer) maupun metodenya (penelitian arsip) yang dipilih sejarawan, mencerminkan kaitan yang erat antara ilmu yang baru itu dengan negara modern.

Dengan struktur negara modern sebagai bentuk politik yang dominan dan tersebarnya model-model pendidikan dan ilmu pengetahuan barat ke seluruh dunia, tradisi historiografi Eropa ini menjadi kokoh di seluruh dunia sebagai sejarah nyata. Sejarah nyata adalah rekonstruksi dari apa yang sebenarnya terjadi dan biasanya disusun menurut negara-

negara (sejarah Prancis dan Inggris) yang mencerminkan prioritas dan nilai-nilai kelompok elite pemegang kekuasaan negara. Leopold von Ranke, bapak sejarah bangsa Jerman awal abad ke-19, memperkokoh peranan politik, landasan kelembagaan, dan status ilmiah bidang ilmu. SPM yang baru ini ditandai oleh narasi besar (*gerand narrative*). Narasi besar adalah sebuah narasi dominan yang menampilkan sejarah sebagai kemajuan berpuncak pada kejayaan modernitas negara-bangsa. Hal ini secara implisit dilihat sama.

C. Perdebatan Kesejarahan tentang Lahirnya Pancasila

Beberapa tahun yang lalu, di awal tahun 1980-an, sebuah perdebatan sejarah yang agak emosional terjadi. Masalahnya bermula ketika seseorang sejarawan, yang kebetulan juga mempunyai kedudukan agak penting, menerbitkan sebuah buku kecil tentang Pancasila. Dalam buku tersebut ia mencoba membuktikan bahwa meskipun Bung Karno adalah tokoh yang pertama memperkenalkan nama Pancasila sebagai dasar Negara, namun unsur-unsur nilai fundamental dari Pancasila itu telah lebih dulu dikemukakan oleh seorang pemimpin pergerakan nasional yang lain.

Pendapat baru ini tentu saja mengagetkan khalayak ramai, karena sejak semula tak ada yang mempersoalkan anggapan bahwa Bung Karno adalah perumus Pancasila. Hal ini telah sejak lama diterima sebagai fakta sejarah. Perdebatan tentang siapa yang pertama merumuskan Pancasila ini bertambah keras, karena masalahnya tak sampai disini aja. Jika pendapat baru tersebut

benar maka tanggal 1 Juni 1945, hari ketika Bung Karno mengucapkan pidatonya yang terkenal itu tak lagi bisa dipertahankan sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal tersebut telah kehilangan nilai simboliknya. Jadi, tak perlu dirayakan secara nasional. Kalau demikian halnya, tentu saja para pendukung Bung Karno akan kehilangan salah satu keuntungan mereka dalam wacana politik. Maka begitulah, perdebatan sejarah dan kepentingan politik pun menjadi campur baur.

Perdebatan mengenai sejarah atau kalau memakai idiom ilmu sejarah, tentang hasil rekonstruksi dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, adalah hal yang lumrah. Maka, kalau mau gagah-gagahan sedikit, bisalah dikatakan bahwa sejarah adalah perdebatan. Karena itulah biasanya kita lihat beberapa sejarawan menulis tentang peristiwa yang sama. Sejarawan bisa saja memperdebatkan semua hal yang menyangkut hari lalu itu. Di kalangan masyarakat luas halnya tentu saja berbeda. Hanyalah peristiwa yang dianggap besar, dari sudut akibat yang ditimbulkannya, atau penting, dari sudut kesadaran masyarakat, yang biasanya memancing perdebatan. Kadang-kadang terjadi juga perdebatan yang menyangkut masalah kecil, namun dirasakan sensitive, karena dianggap bisa merusak gambaran masa lalu yang telah dianggap benar dan otentik.

Dalam sejarah Proklamasi Kemerdekaan, umpamanya, persoalan tentang oleh siapa dan apabila peristiwa Rengasdengklok, yaitu peristiwa penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh sekelompok pemuda menjelang Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya tak terlalu penting dan, barangkali tak

pula perlu diperdebatkan. Sebab peristiwa yang terjadi sesudahnya telah menutupi arti dari penculikan Bung Karno dan Bung Hatta itu. Tetapi justru karena peristiwa ini berkaitan langsung dengan tanggal Proklamasi, tanggal yang penting secara historis dan simbolik, maka segala sesuatu tentang penculikan itu pun menjadi perdebatan.

Apakah karena diculik oleh para pemuda revolusioner kedua pemimpin besar bangsa itu akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanpa menunggu lebih dulu izin dari tentara pendudukan Jepang, yang telah kalah perang. Kalau memang karena ini, maka semua unsur dari peristiwa penculikan tersebut perlu diperjelas jadi diperdebatkan. Tetapi, bukan tak mungkin penculikan itu tak lebih daripada sebuah gangguan, *aberration*, belaka dari proses sejarah yang sedang berjalan. Penculikan tersebut, kata yang lain, justru menyebabkan tanggal proklamasi menjaditerlambat satu hari.

Tentu saja, sekian contoh perdebatan yang lain tentang sejarah kontemporer Indonesia, baik ditanggapi secara emosional atau dengan *nuchter*, masih bisa diberikan. Tetapi, tambahan contoh tidak akan mengubah argument dasar, bahwa perdebatan adalah hal yang biasa ketika kita berhadapan dengan apa yang disebut sejarah itu. Malah bisalah dikatakan bahwa perdebatan kesejarahan yang sehat bukan saja membantu perkembangan ilmu sejarah dan dapat pula memperluas pengetahuan masyarakat tentang sejarah, tatapijuga, dan lebih penting, memperdalam kesadaran sejarah.

Kesemuanya memang menunjukkan bahwa sejarah bukanlah milik para sejarawan atau cendekiawan saja, tetapi adalah juga, dan malah terutama, kepunyaan masyarakat. Kegoncangan dari gambaran tentang hari lampau bisa langsung ataupun tidak memantulkan akibatnya dalam peristiwa sosial. Kalau demikian halnya, maka tampaklah bahwa sejarah tidaklah sekedar peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi bagian dari kekinian. Karena itu bisalah dipahami, kalau gambaran masa lalu yang telah dianggap otentik itu digugat atau dipertanyakan, kita merasa seakan-akan kemantapan kekinian kitalah yang dipermasalahkan. Atau, bisa juga masa lalu yang telah dianggap masyarakat sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang terbukti benar, itu kita lihat sebagai sebuah kewajaran, maka kitalah, bukan orang lain, yang menggugat gambaran masa lalu, yang salah bentuk itu. Apa pun coraknya.

Kembali kepada perdebatan tentang siapa pencetus Pancasila yang pertama, seperti yang telah disinggung di atas. Tingginya unsur emosional yang tertumpah dalam perdebatan itu menunjukkan betapa tingginya nilai simbolik yang telah dikenakan kepada kelahiran Pancasila dalam kesadaran sejarah bangsa. Hal yang sama juga telah dan pasti akan dialami oleh berbagai peristiwa lain yang dianggap penting dan bermakna dalam sejarah perjuangan bangsa. Sewaktu-waktu perdebatan peristiwa tersebut bisa muncul. Bahkan boleh dikatakan dinamika intelektual dapat diukur dari apa atau tidaknya perdebatan kesejarahan. Sebab perdebatan kesejarahan sebenarnya tak lain

daripada pantulan dari usaha sekali-kali melihat dan memahami diri kembali.

Perdebatan kesejarahan adalah bagian dari usaha untuk menempatkan bangsa dalam konteks perubahan zaman yang terus berlangsung. Meskipun dalam suasana perdebatan polarisasi dalam pemahaman dan pengetahuan sejarah bisa terjadi, namun perdebatan kesejarahan tidak bersifat disintegratif. Jika semua telah berakhir, integrasi yang lebih utuh malah bisa diharapkan. Masalah yang terberat yang mungkin dihadapi ialah kalau perdebatan yang mungkin dihadapi ialah kalau perdebatan tersebut terjadi di saat sumber sejarah tak lagi dipunyai. Ketika inilah perdebatan kesejarahan mengandung bahaya *disintegratif*.

Apakah yang akan dijadikan sebagai landasan berpijak, kecuali rasa-kesejarahan yang saling berbeda? Dalam suasana ketiadaan sumber ini akan terasa betapa mahalnya harga dari kealpaan untuk menjaga sumber sejarah yang harus dibayar bangsa. Dari sudut inilah kita bisa memahami juga mengapa kehadiran lembaga kearsipan dan museum boleh juga dipakai sebagai ukuran dari tingkat kemodernan sebuah Negara. Dengan memelihara sumber-sumber sejarah sebuah Negara bukan saja bermaksud untuk melestarikan masa lalu atau memelihara peninggalan lama tetapi, juga sesungguhnya berjaga-jaga akan kemungkinan terjadinya perdebatan kesejarahan yang bersifat disintegratif.

Salah satu ciri yang terabaikan dari masyarakat yang sedang mengalami perubahan ialah adanya pluralitas rasa-hayat sejarah. Dalam situasi ini masyarakat-bangsa seakan-akan terdiri atas berbagai komunitas sejarah, yaitu komunitas yang diikat

kesamaan gambaran dan persepsi terhadap masa lalu. Dalam dinamika perubahan social-politik komunitas sejarah, yang jamak ini bisa menemukan diri mereka bersentuhan satu dengan yang lainnya. Disaat strategi masa depan harus di buat dan ketika pemahaman terhadap hari lampau dan hari kini harus memperdalam, kemungkinan akan terjadi persentuhan komunitas-sejarah bisa sangat tinggi. Bukanlah pengetahuan dan pemahaman tentang corak dinamika yang telah dijalani di masa lalu harus diperdalam, jika hari kini ingin diberi makna dan kalau visi hari depan ingin dirumuskan? Maka, perdebatan antara komunitas-sejarah pun tak terelakkan.

Persentuhan itu bisa juga terjadi sebagai akibat dari insiden-intelektual, ketika seseorang tampil menggugah kemantapan gambaran hari lalu. Atau disebabkan oleh berbagai kemungkinan lain. Karena itu bisalah pula dipahami kalau salah satu Negara ialah mencoba sejauh mungkin memperkenalkan visi kesejarahan yang relative tunggal. Maka, kita pun berkenalan dengan berbagai usaha untuk mendapatkan sebuah sejarah nasional yang bisa diterima semua pihak.

Usaha ini bisa terus dijalankan, tetapi kemantapan gambaran masa lalu akan selalu juga digugah. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita sekali-kali berhadapan dengan goncangan dari kemantapan dalam gambaran masa lalu itu. Hal yang paling biasa terjadi ialah ketika seseorang menemukan sumber sejarah yang otentik yang dapat mengisi lubang informasi dalam rekonstruksi sejarah atau member kesaksian yang berbeda dari apa yang

selama ini dianggap benar. Kalau yang kedua yang terjadi, maka perbaikan dari rekonstruksi sejarah harus dilakukan.

Gugatan terhadap gambaran masa lalu itu bisa juga muncul sebagai akibat dari dipakainya metode atau cara pembacaan baru terhadap sumber yang telah diketahui. Hal ini sering terjadi, ketika kita berhadapan dengan sejarah pra-zaman modern. Umumnya, gugatan terhadap keabsahan gambaran masa lalu, yang kita sebut sejarah itu, menyangkut hal-hal yang bersifat kronikel, yang merupakan unsure utama dari gambaran masa lalu itu. Hala-hal ialah jawaban terhadap pernyataan apa, siapa, apabila, dan di mana.

Perdebatan emosional tentang Pancasila yang disinggung di atas, bertolak dari usaha untuk mendapatkan kepastian tentang siapa. Dan, gugatan itu muncul berdasarkan pembacaan kembali terhadap sumber yang telah lama diketahui, yaitu *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, yang terbit tahun 1959. Buku yang disusun Prof. Mr. Muh. Yamin ini berisikan catatan stenografis dari persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Baiklah kita tidak usah ikut terlibat dalam perdebatan ini. Hanya saja tentu perlu diingat bahwa dalam teknik penelitian sejarah, tanggal peristiwa tidak hanya dilihat pada yang tertulis, tetapi juga pada konteks keseluruhan dari teks dokumen sejarah yang dihadapi. Bukankah kesalahan ketik atau tulis adalah hal yang biasa? Bukankah pula mengubah tanggal untuk suatu tujuan

tertentu adalah pula hal yang biasa? Dulu pernah dilakukan, sekarang pun masih dikerjakan.

Jadi, kalau kita ingin mendapatkan kepastian lagi, maka semacam kritik teks perlu dijalankan. Perbandingan dengan sumber-sumber di luar teks tentu tak pula bisa dihindarkan. Hal yang tak bisa dihindari ialah konsistensi dari rekonstruksi peristiwa yang dibuat. Tetapi, sudahlah, ini hanyalah masalah teknik saja. Yang jelas, tanpa adanya teks yang bisa dipakai sebagai sumber, semua perdebatan yang terjadi, seperti telah dikatakan di atas, hanya akan menghasilkan fragmentasi sosial. Komunitas-komunitas sejarah akan saling bertabrakan untuk membela keabsahan gambaran mereka tentang hari lalu itu.

Semakin penting suatu peristiwa dan semakin tinggi nilai simboliknya, maka semakin tinggi pula kemungkinan peristiwa itu akan memancing perdebatan. Peristiwa apakah yang lebih penting dan yang secara simbolik lebih bermakna dalam hidup kenegaraan selain dari yang menyangkut asas dan landasan Negara? Penentuan siapa perumus pertama Pancasila mungkin dengan mudah memancing perdebatan, karena sangat menyentuh hakikat kehadiran sebuah komunitas-sejarah. Tak pula kurang pentingnya, penentuan siapa dapat pula memberikan legitimasi dari kehadiran komunitas-sejarah tertentu, yang elah menjadikan tokoh Bung Karno sebagai symbol dan sebagai personifikasi dari nilai-nilai politik yang diperjuangkan.

Gagasan atau, katakana saja, filsafat dan ideology kenegaraan, yang bertolak dari hasrat untuk meletakkan suatu landasan ideal bagi kehidupan bangsa dan Negara, dilahirkan dalam konteks

sejarah tertentu. Gagasan ini mungkin pula mendapat pengesahan social dan politik dalam konteks sejarah yang telah berbeda. Tetapi, dengan mendapatkan pengesahan dan penerimaan ini gagasan atau filsafat tersebut terlibat dalam dinamika sejarah. Sebagai teks ia mungkin abadi, tetapi teks yang tak berubah itu bisa memantulkan pesan yang berbeda-beda pada zaman yang berbeda pula. Ia tidak merupakan teks yang mati. Maka timbullah pertanyaan apakah idealism yang dipancarkan oleh gagasan tersebut masih menyinari kehidupan kenegaraan ataukah transformasi internal telah terjadi, sehingga yang tinggal hanyalah nama, yang telah kehilangan makna? Atau, barangkali, seperti yang terjadi di bekas Uni Soviet dan Eropa Timur, umpamanya, gagasan yang selama ini menjadi landasan kehidupan kenegaraan telah kehilangan legitimasinya.

Dari sudut hubungan yang dinamis antara teks dari gagasan tentang landasan ideal kehidupan bangsa dan Negara dengan dinamika zaman ini, bisalah dipahami kalau Presiden Soekarno, yang baru saja mengeluarkan dekrit yang memberlakukan kembali UUD 1945 menyambut dengan gembira diterbitkannya **Naskah Persiapan UUD 1945**. Dalam pengantarnya ia mengatakan bahwa mempelajari segala bahan di sekelilingi Konstitusi Proklamasi berarti, bahwa Bangsa Indonesia menemui kembali Kepribadiannya, yang menjelmakan susunan ketatanegaraan Rakyat Indonesia. Ia amalah juga beranggapan bahwa Naskah ini tidak ubahnya dengan epos Revolusi Indonesia yang merintis jalan ke kebesaran Bangsa Indonesia. Dengan kata lain, buku ini diharapkannya bisa membawa para pembaca ke dalam suasana

perasaan dan pemikiran yang melahirkan UUD 1945. Bahkan lebih dari itu, dengan naskah ini ia berharap para pembaca dapat menghayati pergumulan pemikiran dan cita-cita para pendiri Negara untuk membuat peta kehidupan bangsa di masa depan.

Kini, lima puluh tahun telah berlalu, sejak gagasan agung mengenai kehidupan bangsa dan Negara itu dicetuskan. Masa ini hanyalah periode yang sangat singkat dalam sejarah umat manusia, tetapi zaman yang penuh pergolakan bagi sebuah bangsa yang berjuang mempertahankan kemerdekaan dan memenuhi janji-janji kemerdekaan. Betapa banyak perdebatan dan pertengkaran yang telah dilalui dalam masa itu, meskipun kemerdekaan diperjuangkan untuk mendapatkan sebuah masyarakat yang harmonis. Betapa banyak korban yang ahrus jatuh, meskipun perdamaian abadi adalah cita-cita yang tak pernah lepas dari hati. Tetapi, betapa banyak pula hal-hal yang sebelumnya tak terimpikan akan bisa dimiliki bangsa dalam dua-tiga generasi, ternyata bisa didapatkan salam satu generasi.

Lima puluh tahun lalu telah berlalu. Masihkah kita mengimpikan impian yang sama dan mencitakan cita-cita yang sama dengan para pendiri bangsa? Masihkah kita setia kepada ketetapan hati mereka ketika Negara ini didirikan dan diperjuangkan? Mungkin pertanyaan ini terlalu berbau perenungan, yang hanya bisa dijawab di keheningan malam. Mungkin, tetapi di saat keputusan nasional telah dibuat dan berkali-kali diperkuat bahwa kehidupan kenegaraan kita berdasarkan keharusan kontitusi, yang telah diputuskan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan,

maka adalah kewajiban moral dan politik untuk sewaktu-waktu meninjau kembali pergolakan pemikiran dan perasaan yang menghasilkan UUD itu.

Perdebatan akan muncul juga. Tetapi dengan tersedianya sumber sejarah yang otentik maka perdebatan bukan saja akan bisa bertolak dari landasan yang kukuh, tetapi, malah, lebih mungkin menghasilkan pandangan yang kreatif dalam menghadapi cita-cita lama dengan perjalanan zaman. Setiap langkah yang diayunkan dan setiap waktu yang dilalui tak akan hentinya menuntut berbagai corak penyesuaian, baik structural, bahkan juga cultural. Karena itulah **Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI**, yang merupakan penyempurnaan dari **Naskah Persiapan UUD 1945**, yang diselenggarakan Prof. Mr. Muh. Yamin kira-kira 35 tahun lalu, diterbitkan untuk kalangan lebih luas. Teks yang dihasilkan berdasarkan beberapa tahap penyempurnaan memberikan kepada kita landasan yang lebih kuat untuk mengadakan dialog kesejarahan tentang cita-cita perjuangan, landasan kenegaraan, paham kebangsaan, dan tak kurang pentingnya, visi masa depan bangsa.

Risalah ini tidak hanya memberikan itu. Naskah ini tak hanya memberikan landasan untuk perdebatan antara komunitas-sejarah atau bahan diskusi untuk merumuskan kembali tuntutan cita-cita bangsa dalam konteks hari kini dan hari depan. Risalah bisa merupakan pasangan dialog kita dalam kesendirian masing-masing untuk memahami alam perasaan dan pikiran para peletak dasar kebangsaan kita. Buku ini tak ubahnya dengan sebuah panorama pemikiran, perasaan, dan ketetapan hati para pelopor

kemerdekaan. Impian dan harapan, gambaran hari lalu dan visi masa depan, pandangan tentang dunia sendiri dan tentang dunia sana, semua mendapatkan tempat dalam usaha mendirikan sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam buku ini pula kelihatan bahwa hasrat mendirikan sebuah Negara yang merdeka, bukan hanya sebagai pantulan keyakinan filosofis, bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, tetapi juga didasarkan pada idealism yang luhur, yaitu untuk menjamin kesejahteraan social, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjamin perdamaian dunia yang abadi. Dengan begini, Risalah sesungguhnya adalah pula kaca sejarah yang mengajak kita dalam kekinian kita, melihat diri dalam perjalanan sejarah.

Lima puluh tahun berlalu. Dalam rasa syukur atas rahmat ilahi yang telah ditumpahkan kepada bangsa kita. Risalah memberikan kepada kita kemungkinan untuk mengenang dan memikirkan kembali pesan terselubung dari rahmat ilahi ini (Taufik Abdullah, Ahli Peneliti LIPI).

D. Sejarah Pergerakan Indonesia, Mengawali Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebelum Negara Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan, baik besar maupun kecil yang tersebar di Nusantara. Dalam sejarah Indonesia selalu disebutkan bahwa ada dua kerajaan besar yang melambangkan kemegahan dan kejayaan masa lalu yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya berdasar beberapa bukti sejarah (Muara

Takus abad ke-7), berada di Palembang. Palembang sendiri dalam sejarah dikenal sebagai pusat ziarah agama Budha. Di daerah talaga Batu terdapat batu yang bertuliskan *Siddhayatra*, yang artinya mungkin perjalanan suci yang berhasil (Sartono Kartodirdjo, dkk. 1997: 53).

Pada abad ke-13 Sriwijaya masih menguasai wilayah sebagian besar Sumatera, dan Semenanjung Malaka serta sebagian Barat pulau Jawa dan Sunda. Kerajaan Sriwijaya mempunyai tentara yang kuat yang digambarkan tangkas dalam perang di darat maupun di laut, maka layak jika kekuasaannya banyak dan luas. Pada permulaan abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam di bagian Utara pulau Sumatera, dan ini berarti berakhirnya beberapa kerajaan Hindu dan Budha di Sumatera.

Majapahit merupakan kerajaan terbesar kedua yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara, yaitu di daerah-daerah Sumatera bagian barat sampai ke daerah-daerah Maluku dari Irian di bagian Timur (sekarang Papua). Pengembangan Kerajaan Majapahit hingga ke Negara-negara tetangga di Asia Tenggara dalam bentuk persahabatan. Gajah Mada sebagai patih masa hayam Wuruk telah menjadikan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar dan berkuasa. Dengan sumpah Palapanya, Gajah Mada membuktikan pengabdianya pada Majapahit.

Meninggalnya Gajah Mada (1364) dapat dianggap merupakan detik-detik awal keruntuhan Majapahit dan semakin mundur dengan wafatnya Hayam Wuruk (1389). Kapan keruntuhan Majapahit juga banyak versi yang berbeda, tetapi dari berita Portugis dan Italia mengatakan bahwa pada permulaan

abad ke-16 kerajaaan Majapahit masih berdiri, yang disebutnya sebagai kerajaan Hindu (Sartono, dkk. 1977: 272). Akan tetapi berdasar berita lain menyatakan pada tahun 1518-1521 penguasaan atas Majapahit beralih ke tangan Adipati Unus dari Demak. Sejak berkembangnya Kerajaan Demak, itu Majapahit beralih dari kerajaan Hindu ke kerajaan Islam.

Awal abad ke-16 bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perebutan hegemoni. Belanda telah meletakkan dasar-dasar militernya pada tahun 1630-an guna mendapat hegemoni perdagangan atas peniagaan laut Indonesia. VOC sebagai perwakilan dagang Belanda di Indonesia mendirikan markas besarnya di Batavia dan mulai menguasai wilayah-wilayah perdagangan di Nusantara.

Pada pertengahan abad XVII Belanda tidak puas hanya dengan perjanjian perdamaian, pembangunan benteng-benteng dan pertahanan Angkatan Laut untuk memperkokoh kekuasaan Belanda. VOC masih menganggap terdapat kekacauan baik besar maupun kecil dari penguasa-penguasa kerajaan di Nusantara yang dapat mengacaukan rencana mereka. Kebijakan militer VOC menjadi semakin agresif dengan ikut campur tangan dalam urusan kerajaan-kerajaan. Dengan demikian mulailah kekuasaan Belanda terhadap kerajaan-kerajaan.

Kekuasaan Belanda dimulai memang dari Indonesia bagian timur sebagai pusat rempah-rempah yaitu di Maluku, kemudian ke Sulawesi, Nusa Tenggara sampai Jawa. Dengan demikian kekuasaan Raja-raja di Nusantara harus menghindari Belanda.

Sebelumnya jika terjadi persaingan antar keluarga kerajaan atau antar kerajaan, maka Belanda akan mendukung salah satunya. Jika berhasil maka Belanda akan mendapat imbalan yang menguntungkan secara ekonomis atau pun politis. Kekuasaan VOC berakhir pada 31 Desember 1799, kemudian asset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Karenanya sejak abad XIX Belanda menguasai Nusantara dalam seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan itu terus berlangsung hingga Jepang merebutnya pada tahun 1942.

Kontak dengan Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat yaitu dengan masuknya paham-paham baru, seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme. Paham-paham tersebut sebenarnya telah muncul pada abad XVIII di Eropa, tetapi masuk dan berkembang di Indonesia baru abad XX awal, kecuali materialisme.

Pada tahun 1870 Belanda telah membuat kebijakan untuk daerah koloninya yang disebut Hindia Belanda ini dengan liberalisasi. Ide-ide liberal yang berkembang di Nederland telah member pengaruh kuat terutama dalam bidang ekonomi. Ajarannya di bidang ekonomi yakni menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan Negara atau pemerintah (G. Mudjanto: 1989: 19). Diantara golongan liberal terdapat golongan humanis, dan merekalah yang menghendaki untuk dihapusnya *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Suatu usaha yang dilakukan VOC maupun pemerintah Belanda yang member keuntungan besar pada mereka tetapi tidak bagi rakyat pribumi.

Berkat perjuangan golongan liberal dan humanis maka *cultuurstelsel* sedikit demi sedikit mulai dihapuskan. Pada tahun 1870 dianggap sebagai batas akhir berlakunya *cultuurstelsel* dan dikeluarkan Undang-Undang Agraria yang mengatur bagaimana pengusaha swasta memperoleh tanah untuk usahanya dari Undang-Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta.

Kaum liberal pada dasarnya kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat sehinggabanyak mendapat kritik, diantaranya dari C. Th. Van Deventer yang menulis di majalah de Gids 1899 berjudul *fen fereschuld* atau *Debt of Honour* atau Balas Budi. Dikatakan oleh Van Deventer bahwa kemakmuran Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh karena itu Belanda berhutang budi pada rakyat Hindia Belanda dan harus membayarnya dengan menyelenggarakan Trias Politika: irigasi, emigrasi (transmigrasi) dan edukasi. Berkaitan dengan pengajaran, yang dilaksanakan hanyalah pengajaran tingkat rendah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendahan, mandor-mandor atau pelayanan-pelayanan yang bisa membaca dan upah mereka lebih rendah dari pelayan kulit putih.

Beberapa sekolah menengah juga sekolah tinggi memang dibuka, tetapi bagi rakyat jelata tidak ada kemungkinan menyekolahkan anaknya arena biaya mahal. Sekolah-sekolah tersebut untuk kepentingan pemerintah bukan untuk kemajuan pribumi. Dapat dipahami bagaimana kondisi intelektual masyarakat yang tidak mengenai pendidikan (Barat). Menjadi sangat wajar jika paham-paham Eropa itu baru muncul dan

dikenal abad XX setelah adanya pendidikan nasionalisme sebagai *nationstate* atau Negara bangsa, sampai abad XX belum ada Negara Indonesia.

Sampai abad ke XIX perlawanan terhadap Belanda masih bersifat local (kedaerahan). Perlawanan masih bersifat negative seperti mengundurkan diri ke daerah yang belum terjangkau kekuasaan kolonial atau pun mencari perlindungan pada kekuatan gaib. Model perlawanan seperti itu terlalu diandalkan pemimpin yang kharismatik yang dianggap pengikutnya punya kesaktian. Perlawanan seperti itu akan berakhir jika pemimpinnya ditawan atau terbunuh.

Sesudah tahun 1900 sifat perlawanan mengalami perubahan yaitu, perlawanan bersifat nasional, perlawanan positif dengan senjata, taktik modern, diplomasi (model Barat). Perlawanan juga diorganisir lebih baik, juga mulai memikirkan masa depan bangsa. Apa sebenarnya yang dapat mendukung pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Perkembangan pendidikan barat menggeser pendidikan tradisional di pondok, pesantren, wihara-wihara telah menimbulkan masalah tersendiri.

Adanya homogenitas agama di Indonesia dengan 90% Islam dapat mendesak nasionalisme sebagai suatu hal positif yang member kemungkinan berbeda. Meskipun demikian nasionalisme dapat menjadi kuat di kalangan masyarakat karena adanya kesamaan. Demikian pula dengan kesamaan bahasa yang dapat menumbuhkan kesatuan. Masyarakat telah menggunakan bahasa Melayu sebelum nasionalisme berkembang dan hal ini membuat pemerintah Belanda bergetar, karena bahasa mampu menjadi

senjata psikologis untuk aspirasi nasional bangsa Indonesia (George Me Tuman Kahin: 1995: 51).

Memberikan pendidikan Barat kepada penduduk Indonesia terutama kaum elite telah disesali Belanda. Belanda juga takut terhadap perkembangan Islam. Perkembangan Islam selama ini dianggap sebagai kesalahan Belanda, karena dalam Islam tidak hanya beredar ikatan biasa, tetapi juga merupakan simbolik kelompok untuk melawan asing (penjajah) dan menindas suatu agama yang berbeda sebagaimana hasil penelitiannya Snouek Hurgronje yang dikutip George Me tuman KAhin (1995: 50). Maka pemerintah menjamin bahwa orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat harus dijamin bakal memperoleh kedudukannya dalam kalangan pegawai negeri. Bila itu tidak dilaksanakan, maka orang Indonesia akan semakin jauh dari Belanda dan pemerintah Belanda akan mengawasi kaum terpelajar terutama terhadap arah dan tujuan serta propaganda Pan-Islamisme (George Me Tuman Kahin, 1995: 62). Dengan demikian perlawanan terhadap kolonial telah semakin tegas dilakukan masyarakat Indonesia yaitu dengan model Barat.

Sementara itu Jepang mengalahkan Sekutu di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 dan kemudian mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Janji Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjejahan dan memajukan rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya Jepang juga merampas kehormatan rakyat dan terjadi kemiskinan dimana-mana. Janji Jepang baru mulai direalisir setelah Jepang makin terdesak oleh Sekutu. Sekutu segera bangkit dari kekalahan Jepang

dan mulai merebut pulau-pulau antara Australia dan Jepang. Pada April 1944, sekutu mendarat di Irian Barat.

Pemerintah Jepang kemudian berusaha mendapatkan dukungan penduduk Indonesia, yaitu saat Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1944 mengucapkan pidato di parlemen Jepang yang antaranya mengatakan akan memberikan kemerdekaan Indonesia, kemudian dikenal sebagai "*Kaiso Declaration*". Janji itu terasa lambat sekali jika dibandingkan Philipina dan Burma yang diberi kemerdekaan masing-masing pada 1 Agustus 1943. Kelambatannya kemungkinan karena (G. Moedjanto, 1989: 84).

1. Pemimpin-pemimpin Indonesia dan Jepang belum mengadakan perjanjian apapun.
2. Berhubungan dengan hal pertama, Jepang terpaksa mempertimbangkan waktunya.

E. Perumusan Pancasila, Dasar Negara Proklamasi 17 Agustus 1945

1. Sidang-sidang BPUPKI

a. Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari, berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut: (a). Tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin (b) Tanggal 31 mei 1945 Prof. Soepomo (c) Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno

a. Mr. Muh Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesia sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)
5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dengan Pembukaan yang bunyinya adalah sebagai berikut:

'Untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia (Pringgodigdo, A.G.:162)

b. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan usulan Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori Negara. Dari tiga teori yang ada, maka paham Negara integralistiklah yang cocok dengan Bangsa Indonesia. Menurut paham ini Negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integrasi, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis.

Menurut paham ini yang terpenting dalam Negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling besar, tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuan. Menurut paham ini, tidak ada dominasinya mayoritas dan tirani minoritas.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat Negara Indonesia, Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Saya mengusulkan pendirian Negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter sebagaimana yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau kecil. Dalam Negara yang bersatu itu urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
- (b) Kemudian dianjurkan supaya para warga Negara takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.

- (c) Mengenai kerakyatan disebutkan sebagai berikut: untuk menjamin supaya pimpinan Negara, terutama kepala Negara teru-menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan Negara Indonesia harus dibentuk system badan permusyawaratan. Kepala Negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.
- (d) Menurut Prof. Soepomo dalam lapangan ekonomi Negara akan bersifat kekeluargaan juga, oleh karena itu sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. System tolong-menolong, system koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.
- (e) Mengenai hubungan antar bangsa, Prof. Soepomo membatasi diri dan menganjurkan supaya Negara Indonesia bersifat Negara Asia Timur raya, anggota dari kekeluargaan Asia Timur raya.

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Usulan dasar Negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah dari Ir. Soekarno, yang disampaikan dalam sidang tersebut dengan tanpa teks. Beliau mengusulkan dasar Negara yang terdiri atas lima sila sebagaimana pada Bab. I. lima prinsip sebagai dasar Negara tersebut kemudian oleh Soekarno agar diberi nama "Pancasila" atas saran salah seorang teman beliau ahli bahasa. Berikutnya menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas

menjadi “Trisila”. Trisila tersebut juga dapat diperas menjadi “Eka Sila” yang intinya adalah “gotong-royong”.

Penjelasan di atas relevan dengan Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, sebagai berikut: “Saudara-saudara! “Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apa lagi yang lima bilangannya? (seorang yang hadir: Pendawa Lima). Pendawa pun Lima orangnya. Sekarang banyak prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ke-Tuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi-saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal, dan abadi. (tepuk tangan riuh) (PSP UGM, 2008: 22).

Beliau mengusulkan bahwa PANCasila adalah sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau ‘*Philosophische grondslag*’. Juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia sebagai “*weltanschauung*” dan di atas dasar itulah kita dirikan Negara Indonesia.

d. Sidang BPUPKI kedua (10-16 Juli 1945)

Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua tentang penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik yaitu : (1) Abdul Fatah Hasan, (2) Asikin Natanegara (3)

Soerjo Hamidjodjo (4) Muhammad Noor (5) Besar, dan (6) Abdul Kaffar. Selain tambahan anggota BPUPKI Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak tanggal 1 Juni yang telah lalu.

Menurut laporan itu pada tanggal 22 Juni 1945, beliau Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota badan penyelidik. Yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 38 Anggota, yaitu anggota-anggota yang bertempat tinggal di Jakarta dan Naggota-anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota *TituooSangi In* dari luar Jakarta, dan pada waktu itu Jakarta menjadi tempat rapat *Tituoo Sangi In*. Pertemuan antara 38 orang anggota itu diadakan di gedung kantor besar Jawa Hooke Kai (Kantornya Bung Karno sebagai Honbucoo/Sekretaris Jenderal Jawa Hooke Kai). Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang, dan populer disebut "Panitia Sembilan".

Panitia Sembilan ini setelah mengadakan pertemuan secara masak dan sempurna telah mencapai suatu hasil yang baik yaitu suatu modus atau persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan: Modus atau persetujuan tersebut tertuang dalam suatu rancangan "Pembukaan Hukum Dasar", rancangan Preambul Hukum Dasar yang dipermaklumkan oleh panitia kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945. Panitia kecil Badan Penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya rancangan Preambule yang disusun oleh panitia Sembilan tersebut.

Adapun bagian terakhir naskah Preambule tersebut adalah sebagai berikut:

“.....maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hokum dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terdapat hal yang sangat menarik perhatian juga yaitu pemakaian istilah “hokum dasar” yang kemudian diganti dengan istilah Undang-Undang Dasar. Hal ini menurut keterangan Prof. Soepomo dalam rapat tanggal 15 Juli 1945, ‘bahwa istilah hokum dalam bahasa Belanda *‘recht’* itu meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis. Oleh karena itu tidak lagi digunakan istilah hokum dasar untuk rancangan yang harus disusun oleh Panitia Perancang yang dibentuk dalam rapat 11 Juli, adapun istilah yang benar adalah Undang-Undang Dasar.

Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah sebagai berikut: dalam rapat tanggal 10 Juli antara lain diambil keputusan tentang bentuk negara. Dari 64 suara (ada beberapa anggota yang tidak hadir) yang pro Republik 55 orang yang meminta kerajaan 6 orang adapun bentuk lain dan blangko 1 orang.

Pada tanggal 11 Juli 1945 keputusan yang penting adalah tentang luas wilayah Negara baru. Terdapat tiga usul, yaitu (a)

Hindia Belanda yang dulu (b) Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (Borneo Inggris), Irian Timur, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya dan (c) Hindia Belanda ditambah Malaya, akan tetapi dikurangi dengan Irian Barat. Berdasarkan hasil pemungutan suara dari 66 orang suara yang memilih (a) Hindia Belanda ada 19, yang memilih (b) yaitu daerah yang terbesar yaitu jumlah yang terbanyak yaitu 39, sedangkan yang memilih (c) ada 6 lain-lain daerah 1 serta blangko 1. Jadi pada waktu itu angan-angan sebagian besar anggota Badan Penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua keputusan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian; Tarakan dan Morotai yang masih dikuasai Jepang.

Keputusan-keputusan lain adalah untuk membentuk panitia kecil yaitu: (1) Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Ir. Soekarno, (2) Panitia ekonomi dan keuangan yang diketahui oleh Drs. Moh. Hatta, dan (3) Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso. Pada tanggal 14 Juli Badan Penyelidik bersidang lagi dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pertemuannya. Susunan Undang-Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu ; (a) Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda, (b). pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar Negara Pancasila dan (c) Pasal-pasal Undang-Undang Dasar (Pringgodigdo, 1979: 169-170).

2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Menurut pengumuman Nanpoo Gun (Pemerintah Tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan), tanggal 7 Agustus 1945 (Kan Poo No. 72/2605 k.11), pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau '*Dokuritsu Zyunbi Linkai*'.

Untuk keperluan membentuk panitia itu pada tanggal 8 Agustus Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. K.R.T. Radjiman diberangkatkan ke Saigon. Keberangkatan ketiganya ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi, Saiko Sikikan untuk Daerah Selatan (Nanpoo Gun), jadi penguasa tersebut juga meliputi kekuasaan wilayah Indonesia Menurut Soekarno, Jendral Terauchi pada tanggal 9 Agustus, memberikan kepadanya 3 cap yaitu:

1. Soekarno diangkat sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai Wakil ketua, Radjiman sebagai Anggota.
2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus itu.
3. Cepat atau tidaknya pekerjaan Panitia, diserahkan sepenuhnya kepada Panitia.

Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Zyunbi linkai itu terdiri 24 orang terdiri atas 21 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Adapun susunan keanggotaan PPKI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

Adapun anggota-anggotanya sebagai berikut:

3. Dr. K.R.T. Radjiman Widioningrat
4. Ki Bagus Hadikoesoemo
5. Oto Iskandardinata
6. Pangeran Purbojo
7. Pangeran Soerjohamodjojo
8. Soetardjo Kartohamidjojo
9. Prof. Dr. Mr. Soepomo
10. Abdul Kadir
11. Drs. Yap Tjwan Bing
12. Dr. Mohammad Amir (didatangkan dari Sumatera)
13. Mr. Abdul Abbas (didatangkan dari Sumatera)
14. Dr. Ratulangi (didatangkan dari Sumatera)
15. Andi Pangerang (didatangkan dari Sumatera)
16. Mr. Latuharhary
17. Mr. Pudja (didatangkan dari Bali)
18. A.H. Hamidan (didatangkan dari Kalimantan)
19. Raden Panji Soeroso
20. Abdul Wachid Hasyim
21. Mr. Mohammad Hasan (didatangkan dari Sumatera)

Berbeda dengan Badan Penyelidik (Dokuritsu Zyunbi Tioosakai), dalam susunan kepanitiaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi linkai) tidak duduk seorang pun bangsa Jepang, demikian pula dalam kantor tata usahanya.

Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran, Ir. Soekarno mengumumkan di muka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum

jagung berbungan (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itulah maka ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian menambahkan sejumlah anggota atas tanggung jawabnya sendiri. Agar dengan demikian sifat Panitia Persiapan Kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional.

Dalam batinnya sebagai Komite Nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan itu menyelenggarakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini untuk tidak dilupakan bahwa anggota-anggotanya datang dari seluruh kepulauan Indonesia sebagai wakil-wakil daerah masing-masing, kemudian ditambah dengan enam orang lagi sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada hakikatnya juga sebagai Komite Nasional memiliki sifat representatif, sifat perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut ternyata bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang semula adalah merupakan badan bentukan Pemerintah Tentara Jepang, kemudian sejak Jepang jatuh dan kemudian ditambahkan enam anggota baru atas tanggungan sendiri maka berubahlah sifatnya dari badan Jepang menjadi badan nasional sebagai badan pendahuluan bagi Komite Nasional.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

A. Latar belakang

Pancasila merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, yang juga diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai kepastakaan, nilai *religious* yang terdapat pada pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk Negara. Pancasila bukan dari ide-ide bangsa lain, melainkan berasal dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat, inilah yang dinamakan ideologi.

Pengajarannya tercemrin dalam kehidupan praktis, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun religi. Menurut bakri [1994], pancasila sebagai ideologi bersifat dinamik dalam arti bahwa yang menjadi kesatuan prinsip pengarahannya yang berkembang dialektik serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif masa depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional.

Nor basry memaparkan pancasila akan selalu mempunyai hal baru yang progresif dalam menghadapi tantangan kehidupan yang makin maju dan kompleks. Dalam beberapa pasal, khususnya menyangkut nilai nilai kemanusiaan dan keadilan, pancasila telah tampil di garda depan. Tantangan sekarang ini, pancasila dihadapkan pada kekuatan kapitalisme global yang telah dijadikan idiologi masyarakat dunia. Masyarakat Indonesia sedikit banyak terpengaruh dengan kaum kapitalisme global ini. Menghadapi konsepsi tatanan pemikiran yang berkembang, sekarang saatnya kita menghidupkan dan memperlihatkan pancasila sebagai sosok yang sakti. Saatnya kita menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung didalamnya.

Dalam pancasila ada kepribadian kemanusiaan yang sangat penting. Kepribadian kemanusiaan merupakan sifat-sifat hakikat kemanusiaan abstrak pada umumnya. Secara universal yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, yang merupakan sifat hakiki manusia. Jika tidak demikian bukanlah manusia, dan jika tidak berkrakyatan dan berkeluargaan juga bukan manusia, serta jika tidak berkeadilan juga bukan manusia. Dengan demikian, lima unsur tersebut mutlak ada didalam diri manusia, sehingga disebut kepribadian kemanusiaan. Sebuah Negara bangsa membutuhkan *Weltans chauung* atau landasan filosofi. Atas dasar *Weltans chauung* itu, disusunlah visi, misi, dan tujuan Negara. Tanpa itu, Negara bergerak seperti layangan putus, tanpa pedoman.

Jika diperhatikan kondisi saat ini, pamor Pancasila sedang menurun karena banyaknya masyarakat yang tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya Pancasila juga dapat dipandang sebagai ideologi Negara kebangsaan Indonesia seperti Mustafa Rejai menyatakan dalam buku *Political Ideologies* bahwa ideologi itu tidak pernah mati, akan tetapi akan selalu *emergence* (kemunculan), *decline* (kemunduran), dan *resurgence of ideologies* (kebangkitan kembali suatu ideologi). Tampaknya, sejak awal reformasi hingga saat ini sedang terjadi *declining* (kemunduran) pamor ideologi Pancasila seiring meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi dunia.

Agar Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap mempunyai semangat untuk diperjuangkan, kita perlu menerima kenyataan belum diterimanya Pancasila oleh semua pihak. Dunia juga tampak belum yakin pada kelangsungan dan kemajuan sebuah Negara bangsa bernama Indonesia. Untuk itu kita harus memahami, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai ideologis yang terdapat pada Pancasila tersebut guna membangun bangsa dengan lima dasar Negara.

B. Pengertian Ideologi dan Dimensi-dimensinya

Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*eidos*” dan “*logos*”. *Eidos* berarti idea, gagasan, cita-cita ataupun konsep. Sedangkan *logos* berarti ilmu, ajaran, atau paham. Ideology adalah ilmu atau ajaran tentang ide-ide, gagasan-gagasan, atau cita-cita terpenting. Jadi, ideologi menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus

merupakan dasar, pandangan atau pun paham. . Jorge Larraín, dalam tulisannya tentang *The Concept of Ideology* (2002) menjelaskan bahwa “*ideology as a set of beliefs*” yaitu setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai sesuatu yang dipandang bernilai dan menjadi kekuatan motivasi bagi perilaku individu atau kelompok masyarakat. Nilai-nilai yang dipandang itu sebagai cita-cita yang menjadi landasan bagi cara pandang, cara pikir, dan cara tindak seseorang atau bangsa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ideologi adalah seperangkat sistem nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam negara. Ideologi mengandung nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakatnya dan terkristalisasi dalam falsafah negara. Upaya *de Tracy* mengalami kegagalan karena dalam kenyataannya, ideologi tidak lagi menjadi keyakinan ilmiah tentang ide-ide melainkan, sebaliknya, telah menjadi idealisme revolusioner.

Akibatnya kajian tentang ide-ide yang seharusnya menjadi kajian nasional telah menjadi kajian kajian ideologis. Sebagai contoh, ideologi republikanisme dan liberalism dipertentangkan dengan ideologi otoritarianisme yang dianut oleh napoleon. Bahkan, napoleon yang awalnya mendukung lembaga bentukan de Tracy kemudian berbalik menyerang dengan menyebut pengertian ideologi sebagai hal yang doktriner pengertian yang sampai kini melekat pada ideologi. Tracy telah terlihat bahwa

pengertian ideologi telah merosot dari ilmu tentang ide-ide doktriner dan melekat pada kekuasaan.

1. Dimensi dimensi ideologi

a) Dimensi realitas

Merupakan pencerminan realitas yang hidup dalam masyarakat yang nilai-nilai dasarnya bersumber dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

b) Dimensi idealitas

Mengandung cita-cita dalam berbagai bidang yang ingin dicapai oleh masyarakat penganutnya.

c) Dimensi norma litas

Mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakat, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi.

d) Dimensi fleksibilitas

Bersifat terbuka dan demokratis artinya mengikuti perkembangan zaman, sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Peranan Ideologi dalam Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara

1) Sebagai dasar: asas dan pondasi semua kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri.

2) Sebagai pengarah: sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk

mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang, peran sebagai pengarah ditunjukkan pada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum segala peraturan hukum dan perundang undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Sebagai tujuan: semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam sebuah ideologi. Pancasila ideologi nasional akan memberikan motivasi atau semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pembukaan uud 1945.

Sebagaimana diuraikan, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1) Sebagai Dasar

Artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fundasi di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dibangun. dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri (dimensi realitas). Pancasila sejak awal pembahasannya (sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945) memang direncanakan untuk dijadikan Dasar Negara. Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI

menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Sebagai Pengarah

Artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang (dimensi normalitas). Disini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah, pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkannya pada kedudukan Pancasila sebagai "*sumber dari segala sumber hukum*" segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Sebagai Tujuan

Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (dimensi idealitas).

D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.

Ideologi yang dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung pada dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis, yang berlawanan dengan ideologi tertutup atau tidak demokratis (otoriter/totaliter). Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh asas sila keempat yaitu: *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*.

Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka, yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan perkembangan spirit zaman. Suatu ideologi yang dalam kenyataannya tidak mampu lagi menerima pemikiran-pemikiran baru atau metode baru yang berbeda, yang demikian disebut ideologi tertutup atau ideologi otoriter/totaliter, walaupun dapat saja penganutnya menyatakan ideologinya demokratis.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun dalam penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan nilai instrumental yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lainnya

1) Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila: memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Monodualisme ini adalah kodrati, maka manusia tidak dapat hidup sendirian, ia selalu membutuhkan yang lain. Menurut konsep Pancasila, yakni manusia dalam hidup saling tergantung antar manusia, saling menerima dan memberi antara manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Saling membutuhkan dan saling memberi merupakan pasangan pokok dan ciri khas persatuan serta menjadi inti isi dari nilai kekeluargaan. Ideologi Pancasila, baik setiap silanya maupun paduan dari kelima sila-silanya, mengajarkan dan menerapkan sekaligus menghendaki persatuan.

Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia (Bung Karno, 1 Juni 1945). Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental, spiritual, dan landasan etik dalam Ketahanan Nasional, maka atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tersimpul nilai satu derajat, sama kewajiban dan hak, saling mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong.

Sila Persatuan Indonesia. mengandung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara.

Sila kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang diilustrasikan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan Negara/bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, menghormati hak orang dan sikap gotong royong, yang menjamin kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan adil.

2) Ideologi Liberal

Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak azasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Metode berfikir ideologi ini ialah liberalistik yang berwatak individualistik. Aliran pikiran perseorangan atau individualistik diajarkan oleh Hoobbes, Locke, Rousseau, Spencer dan Laski. Aliran pikiran ini mengajarkan

bahwa Negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial).

Menurutnya kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi, sehingga masyarakat merupakan jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang yang hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak dari hak azasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan.

Faham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individual secara mutlak yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Faham liberalisme selalu mengkaitkan aliran pikirannya dengan hak azasi manusia menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu.

3) Ideologi Komunis

Ideologi Komunistik mendasarkan diri pada premise bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi, dengan menempuh proses dialektik. Ciri konsep dialektik tentang manusia, yaitu bahwa tidak terdapat sifat permanen pada diri manusia, namun ada keteraturan, ialah kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan perkembangan dialektik dari manusia, maka

sejarahpun berkembang secara dialektik pula. Sehubungan dengan itu, metoda befikirnya materialisme dialektik dan jika diterapkan pada sejarah dan kehidupan sosial disebut materialisme-historik. Aliran pikiran golongan (*das theory*) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin bermula merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri.

4) Liberalisme

Tampilnya ideologi liberalisme dilatarbelakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelas menengah (terdiri atas kelompok industrialis dan pedagang) mulai diterima. Selanjutnya, dengan dukungan pemikiran liberal klasik seperti John Locke, J.S. Mill, Herbert Spencer, Adam Smith, dan David Hume, ide-ide liberal tersebut mulai tersistematisasi dan mewujudkan dalam pemikiran ekonomi, politik maupun sosial, dan akhirnya, perkembangan liberalisme sebagai ideologi politik, semakin mantap seiring dengan terjadinya Revolusi Inggris (1688), Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789). Ketiga Revolusi tersebut mengukuhkan dua prinsip hukum yang mendasari politik liberal, yaitu (1) pernyataan tentang hak asasi manusia (HAM), dan (2) adanya konstitusi yang menetapkan tatanan politik.

5) Kapitalisme

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, lahirlah pemikiran, teori, dan sistem ekonomi baru yang dijiwai oleh semangat liberalisme yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan buah pikiran dari tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo. Keduanya menggagas ide-ide liberal dan rasional, khususnya tentang hakekat manusia serta peran pemerintah dalam masyarakat sipil. Latar belakang pemikiran ini tidak lepas dari kehidupan ekonomi pada saat itu yang berada di bawah sistem merkantilis suatu sistem ekonomi di mana pemerintah berperan besar dalam membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi guna mendorong ekspor dan membatasi impor.

Pandangan-pandangan Smith yang kemudian menjadi acuan kapitalisme klasik dapat diringkas sebagai berikut (Heywood, 1998:52-53): Ekonomi adalah pasar yang bergerak sesuai dengan harapan serta keputusan-keputusan individu yang bebas. Kebebasan dalam pasar dipandang sangat penting dan kebebasan itu meliputi: (a) kemampuan pengusaha untuk memilih barang yang hendak diproduksi, (b) kebebasan buruh untuk memilih majikan, dan (c) kemampuan konsumen untuk memilih produk-produk yang hendak dibeli. Adapun relasi-relasi yang terbangun dalam pasar, yaitu pengusaha, buruh, penjual, pembeli, dilandasi oleh relasi yang bercorak sukarela dan kontraktual. Yang menarik dari kapitalisme klasik ini adalah bahwa tiap-tiap individu memiliki kebebasan dan kepentingan pribadi. Namun demikian aktivitas ekonomi sendiri beroperasi berdasarkan kekuatan-

kekuatan pasar yang bercorak impersonal yang secara alami akan menjadi daya dorong untuk menuju kemakmuran ekonomi.

Kekuatan pasar tersebut dikenal sebagai hukum penawaran dan permintaan yang dapat mengatur pasar sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan aturan-aturan dari luar, bahkan untuk itu pasar harus dibebaskan dari intervensi pemerintah. Selain hukum penawaran dan permintaan, Smith juga meyakini adanya *invisible hand* sebagai pihak yang mengatur pasar. Dalam praktik, *invisible hand* digunakan untuk menjelaskan bagaimana masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, defisit neraca pembayaran, dan lain-lain. dapat terselesaikan oleh mekanisme dalam pasar itu sendiri. Selain mengurangi masalah-masalah seperti pengangguran, kekuatan-kekuatan pasar tersebut dipercaya juga dapat menjadikan kegiatan ekonomi semakin efisien.

Efisiensi ekonomi didasari oleh pemikiran bahwa tiap-tiap perusahaan yang terjun ke pasar memiliki motif untuk mengejar profit, sehingga prosedur-prosedur yang dijalankan adalah bagaimana mempertahankan biaya yang rendah. Pemborosan dan efisiensi tidak dapat ditoleransi. Namun demikian, pihak-pihak yang terlalu mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya pun dapat dicegah melalui kompetisi antara produsen. Sementara, di pasar konsumen adalah raja. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keuntungan, perusahaan juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen serta memuaskan mereka.

Dapat diringkas bahwa menurut Adam Smith, kapitalisme mengandung beberapa prinsip dasar, yakni yang berikut.

a) Ekonomi pasar

Ini merupakan kegiatan ekonomi yang ditentukan oleh kekuatan pasar, seperti penawaran dan permintaan. Hal ini dapat berjalan baik, bila pihak-pihak eksternal, yaitu pemerintah tidak melakukan intervensi di dalamnya. Pasar yang berupa relasi pengusaha-pekerja dan penjual-pembeli dipercaya sebagai pengambil keputusan yang efektif.

Pengakuan atas hak untuk memiliki harta pribadi (secara khusus berupa sarana-sarana produksi seperti tanah dan pabrik). Harta milik pribadi ini tersebar pada individu-individu dan tidak terkonsentrasi pada pemerintah.

b) Kompetisi

Prinsip ini bisa terlihat antar pengusaha maupun antar negara. Di masa kini, kompetisi dalam pasar bebas bisa menjadi isu politik yang kontroversial menyangkut konsumen sebagai pihak yang diuntungkan karena barang-barang impor menjadi murah, sementara, di sisi lain, buruh dalam negeri akan kehilangan pekerjaan karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak dapat bersaing sehingga harus menurunkan atau menghentikan produksinya. Namun demikian, para kapitalis tetap meyakini bahwa kompetisi antar bangsa dapat membawa kehidupan ekonomi menjadi efektif dan produktif.

c) Profit

Kapitalisme memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keuntungan dan hal ini difasilitasi oleh tiga hal, yakni (a) kebebasan berdagang, (b) kebebasan untuk memiliki harta pribadi, dan (c) kebebasan untuk melakukan kontrak. Selama abad ke-19, kapitalisme menjadi semacam dogma di Amerika Serikat dan Inggris. Ideologi ini mencapai puncaknya ketika negara-negara tersebut memberlakukan doktrin *laissez-faire*, di mana negara memiliki peran minimal dalam bidang ekonomi sehingga kelompok bisnis benar-benar leluasa dalam menggerakkan roda ekonomi. Keadaan berbalik ketika memasuki abad ke-20 Amerika Serikat dilanda Depresi Besar pada tahun 1939 dan di Eropa berkecamuk Perang Dunia II.

Pada situasi demikian, kapitalisme justru menampilkan efek kontra produktif dari doktrin *laissez-faire*. Menghadapi kemandegan ekonomi tersebut, lahir pemikiran J.M. Keynes dengan karyanya *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936). Pemikiran Keynes menandai perubahan besar dalam liberalisme klasik karena ia menolak konsep pasar bebas yang dapat mengatur dirinya sendiri, Sebaliknya, ia mendukung peran pemerintah yang lebih besar di bidang ekonomi, yaitu dalam kebijakan tentang pajak, suku bunga, fiskal, insentif investasi, dan penyediaan pekerjaan umum untuk menyerap pengangguran (Heywood, 1998).

Pemikiran Keynes banyak diterapkan di negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Dengan pemikiran Keynes, pemerintah mulai menerima tanggung jawab dalam menangani

masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Tampilnya peran pemerintah di bidang sosial dan ekonomi ini dikenal sebagai konsep negara kesejahteraan yang menjunjung prinsip-prinsip (1) tiap anggota masyarakat berhak menikmati standard kehidupan minimum, dan (2) negara kesejahteraan bertujuan menyediakan lapangan kerja sebagai tujuan sosial tertinggi.

Konsep negara kesejahteraan tidak luput dari berbagai tantangan. Hal ini terlihat pada tahun 1980an, ketika Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat dan Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris. Keduanya mendorong kebijakan-kebijakan yang bercorak *neokonservatisme*. Tujuannya adalah untuk mempromosikan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi dengan peran pemerintah seminim mungkin. Kedua tokoh tersebut juga memegang komitmen terhadap keberlangsungan pasar bebas, menekankan deregulasi, desentralisasi pemerintahan dan privatisasi sektor-sektor publik.

Di satu sisi, kapitalisme memang dapat membawa kemakmuran ekonomi, namun di sisi lain juga mengandung kelemahan yaitu lahirnya bentuk-bentuk monopoli yang memperkecil keuntungan di pasar bebas. Selain itu, dalam ekonomi kapitalistis juga dikenal siklus dari kemakmuran ke resesi atau depresi yang mengakibatkan banyak orang sewaktu-waktu bisa menganggur.

6) Kolonialisme

Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah/bangsalain dengan maksud untuk memperluas wilayah negara itu. Faktor penyebab timbulnya kolonialisme ialah

keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, kebanggaan sebagai bangsa yang “istimewa,” keinginan untuk mencari sumber kekayaan alam dan tempat pemasaran hasil industri. Ada beberapa tipe kolonialisme, yang yang berikut.

- (a) Koloni penduduk: negeri asing yang kemudian menjadi tanah air baru karena migrasi besar-besaran, misalnya Amerika Utara dan Kanada.
- (b) Koloni kelebihan penduduk: seperti koloni-koloni bangsa Italia dan Jepang.
- (c) Koloni deportasi: tanah koloni yang dikerjakan oleh orang-orang buangan, misalnya Australia.
- (d) Koloni eksploitasi: daerah jajahan yang dikerjakan hanya untuk mencari keuntungan, misalnya Hindia Belanda.
- (e) Koloni sekunder: tanah koloni yang tidak menguntungkan negeri “induk”, tapi perlu dipertahankan karena kepentingan strategi.

7) Nasionalisme

Nasionalisme merupakan salah satu ideologi yang berpengaruh di Eropa pada akhirabad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20, dan di Asia-Afrika pada abad ke-20. Dalam kurun waktu dua abad, nasionalisme telah merepresentasikan diri sebagai ideologi yang berperan penting dalam pembentukan negara-bangsa (*nation-state*) di ketiga belahan dunia tersebut. Dalam kajian-kajian tentang nasionalisme, titik tolak pembahasan terletak pada bangsa (*nation*). Berpijak pada konsep bangsa ini nasionalisme dapat dimengerti sebagai sebuah kesadaran nasional,

ideologi politik, dan gerakan politik yang mengarahkan suatu bangsa menuju pembentukan organisasi politik yang ideal yaitu negara-bangsa. Negara bangsa adalah konsep di mana negara terdiri dari satu bangsa, dan yang disebut bangsa di sini adalah rakyat yang berdaulat.

Jadi konsep bangsa yang digunakan tidak lagi mengacu pada aspek primordial sepertikesatuan etnis atau bahasa, namun lebih pada aspek politis. Pembentukan negara bangsa, sebagai tujuan nasionalisme, mensyaratkan adanya pemahaman tentang bangsa dalam arti modern, yaitu bangsa di mana para anggotanya memiliki kesadaran bahwa mereka (1) tinggal dalam teritori yang sama sehingga menimbulkan rasa memiliki negara yang sama, (2) memiliki identitas nasional yang terkristalisasi dari sejarah, bahasa, dan budaya yang sama, dan (3) merupakan anggota bangsa yang sama. Ketiga hal ini merupakan aspek-aspek yang dapat mempersatukan rakyat yang terpisah secara geografis sekaligus menumbuhkan tanggung jawab politik bersama.

Bangsa dalam arti modern, seperti telah disebut, dicirikan oleh adanya tanggungjawab politik bersama dari para anggotanya. Dalam sejarah, pembangunan bangsa sebagai kesatuan politis dilatarbelakangi oleh gagasan kedaulatan rakyat yang merupakan reaksi terhadap gagasan kedaulatan raja yang bercorak absolut. Gagasan kedaulatan rakyat inilah yang kemudian melahirkan sebuah kata kunci yaitu warga negara. Sebagai akibat dari lahirnya gagasan kedaulatan rakyat, maka dalam konteks kenegaraan, negara dipahami sebagai tatanan politik yang melembagakan kehendak rakyat.

Rakyat adalah subjek hukum, pihak yang memahami diri sebagai pembuat hukum itu sendiri. Selain itu, dengan adanya kesadaran dari rakyat bahwa mereka adalah warga negara, maka rakyat (yang juga) sebagai anggota bangsa akan melihat diri mereka sebagai kesatuan warga negara yang berhak menentukan pemerintahan sendiri. Jadi, dalam pengertian bangsa yang modern, terdapat hubungan yang erat antara bangsa, negara, dan rakyat sebagai warga negara. Adapun peran nasionalisme adalah sebagai ideologi yang mendorong kesadaran rakyat menjadi kesadaran nasional untuk menuju pembentukan negara-bangsa yang berdaulat.

Untuk memahami nasionalisme di Eropa pada abad ke-18-20 dan di Asia-Afrika pada abad ke-20, maka dapat dijelaskan dari ideologi-ideologi lain yang mengiringi pemikiran nasionalisme di kawasan-kawasan tersebut. Di Eropa, perkembangan nasionalisme juga diiringi oleh ide-ide kedaulatan rakyat, liberalisme, dan kapitalisme. Dalam paham liberalisme, kebebasan individu dijamin. Sebagai akibatnya, tujuan negara dalam masyarakat yang liberal adalah untuk mempertahankan kebebasan, melindungi harta milik dan mewujudkan kebahagiaan individu. Dengan demikian, ketika nasionalisme, liberalisme, dan gagasan kedaulatan rakyat telah berhasil mentransformasi bangsa-bangsa di negara-negara Eropa (khususnya Eropa Barat) menjadi bangsa bercorak politis yang terdiri atas kesatuan warga negara, maka negarabangsa tak lebih dari sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu-individu warga negara.

Dampaknya dalam hubungan antar negara adalah bahwa yang disebut kepentingan nasional sebenarnya tak lain dari kepentingan individu-individu atau warga negara, yang wajib diwujudkan oleh negara. Bila tiap negara berkewajiban mewujudkan kepentingan nasional maka dalam hubungan internasional akan muncul benturan antar kepentingan nasional. Nasionalisme dan liberalisme (dan kemudian diikuti oleh liberalisme dalam bidang ekonomi yaitu kapitalisme) yang berkembang di Eropa akhirnya mendorong intensitas konflik internasional yang dipicu oleh persaingan ekonomi disertai persaingan untuk melakukan ekspansi wilayah guna mendapat sumber bahan mentah.

Tiap negara berlomba membangun imperium dengan memperluas wilayah-wilayah jajahan di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai contoh, antara tahun 1870–1900 Inggris menguasai wilayah jajahan seluas 4.250.000 mil², Prancis 3.500.000 mil² dan Jerman + 1.000.000 mil². Nasionalisme dan kapitalisme di Eropa pada abad ke-18-19 telah melahirkan negara bangsa yang kokoh dan dengan kekuatan negara ini pula, suatu bangsa dapat membangun koloni-koloni dan imperium.

Semakin luas wilayah jajahan yang dimiliki, semakin makmur suatu bangsa. Sebaliknya, di Asia dan Afrika, kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa (yang kemudian diikuti oleh Jepang) telah menyadarkan rakyat pribumi untuk melawan. Nasionalisme yang bercorak anti kolonialisme dan anti imperialisme merupakan jiwa dari seluruh gerakan nasional untuk memerdekakan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Hasil perjuangan tersebut dapat dilihat dari data bahwa di antara tahun 1945 dan

1960, terdapat 55 bekas wilayah jajahan yang menjadi merdeka dan membentuk negara-negara berdaulat.

Pada abad ke-21 ini, nasionalisme tidak lagi menjadi isu sentral dalam masalah-masalah global. Namun demikian, masih banyak negara yang harus menghadapi masalah-masalah kebangsaan yang bertumpu pada upaya persatuan bangsa (*nationbuilding*) dan permasalahan ini umumnya terjadi di negara-negara yang terbentuk dari bangsa yang multi etnis dan multikultural. Contohnya adalah Uni Sovyet dan Yugoslavia yang gagal dalam membangun kesatuan bangsa dari keragaman etnis, yang akhirnya berujung pada pembubaran kedua negara tersebut. Selain itu, negara-negara seperti Spanyol masih harus menghadapi gerakan separatis Basque. Sementara itu, negara-negara seperti Irak, Sri Lanka dan bahkan Indonesia masih harus terus berjuang menuju kesatuan bangsa ini.

E. Hambatan dan Tantangan dalam berideologi Pancasila

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, terdapat potensi konflik yang besar mengintai adanya berbagai nilai yang dianut oleh beberapa kelompok masyarakat dan hal ini dapat pula bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu perlu di ketengahkan disini hambatan dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

1) Hambatan

Hambatan muncul karena adanya perbedaan aliran pemikiran, misalnya paham individualism dan paham golongan.

Menurut paham individualisme Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas semua kontrak individualis dalam masyarakat (*kontak social*). Disini kepentingan harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Hak kebebasan individu hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki individu lain, bukan oleh kepentingan masyarakat. Sementara itu, menurut paham golongan, Negara adalah suatu susunan golongan untuk menindas kelas lain. Paham ini berhubungan dengan paham materialism sejarah (suatu ajaran yang bertitik tolak pada hubungan hubungan produksi dan kepemilikan sarana produksi serta berakibat pada munculnya dua kelas yang bertentangan, kelas buruh dan kelas majikan dan semua itu terjadi dalam keadaan sejarah manusia).

2) Perbedaan kepentingan

Pegalaman sejarah menunjukkan bahwa penafsiran pancasila secara subjektif dan kepentingan sendiri sama dengan membuat kabur pancasila dan menjadi tidak bermakna. Perbedaan kepentingan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pola pikir masing masing kekuatan politik, golongan, atau kelompok dalam masyarakat.

3) Bentuk bentuk ancaman

Ada beberapa bentuk ancaman terhadap idiologi pancasila yaitu:

Pertama ialah isu (penyebar kebohongan dan fitnah atau desas-desus dengan tujuan tertentu). Berikutnya gejala gejala

(antara lain pola hidup konsumtif, sikap mental individualistis, pemaksaan kehendak, kemalasan, menurunnya disiplin, menurunnya keteladanan, sikap acuh tak acuh, dan penyalahgunaan wewenang). Dengan runtuhnya komunisme, ada pendapat yang cenderung pendapat yang membenarkan paham kapitalisme di Indonesia. Selanjutnya perbuatan, tindakan, dan tingkah laku yang mengganggu (seperti tindak kekerasan dan pelanggaran hukum), dan subversi (sabotase, spionisme, dan lain-lain).

4) Tantangan

a) Tantangan dari dalam negeri antara lain:

- Tantangan dari integrasi adanya perpecahan perpecahan yang disebabkan tidak puas sikap daerah menimbulkan permasalahan permasalahan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI.
- Permesta dan pemberontakan lainnya sejak zaman revolusi
- Tantangan dari masalah agama adanya usaha usaha yang timbul karena adanya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan symbol symbol keagamaan lainnya.
- Tantangan dari masalah SARA adanya perpecahan yang mengatasnamakan SARA menyebabkan beberapa peristiwa yang dapat menghancurkan Pancasila antara lain peristiwa Tanjung Periok.

b) Tantangan dari luar negeri antara lain :

- 1) Adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, misalnya ideologi

Komunisme dalam peristiwa PKI Madiun dan Pemberontakan G-30 S/PKI. Atau ideologi Liberal dalam Peristiwa Ratu Adil dan Pembantaian di Sulawesi oleh Westerling.

- 2) Adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI contohnya privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penanganan hukum dan keamanan di Indonesia. Oleh karena itu Pancasila bagaimana pun juga akan berusaha untuk tetap mempertahankan diri dari segala macam tantangan tersebut demi kelangsungan negara Indonesia.

F. Refleksi Kritis Terhadap Ideologi

Ideologi dapat ditinjau dari pelbagai sudut. Ideologi dapat menjadi sistem pemikiran yang terbuka atau tertutup, ideologi dapat dimengerti sebagai ilusi dan berorientasi pada kekuasaan yang bersifat menindas. Namun, di sisi lain, ideologi juga dapat menjadi pandangan (*world view*), pandangan hidup. Bertolak dari seluruh pengertian tersebut, maka diperlukan refleksi kritis terhadap ideologi mengingat adanya satu ciri penting yang melekat pada ideologi, yakni sifatnya yang futuristik (berisi cita-cita tentang tatanan masyarakat yang baik di masa depan dan merupakan acuan untuk melakukan perubahan politik). Ideologi berfungsi memberikan harapan akan dunia baru yang lebih baik dari keadaan masa kini dan masa lampau yang kurang ideal, serta memberikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ideal. Oleh karena itu, maka ideologi sangat menarik baik rakyat, baik secara rasional maupun emosional.

Sering ada kecenderungan ideologi dikeramatkan, dimitoskan sebagai sesuatu yang mampu membawa keselamatan bagi bangsa, bahkan seluruh umat manusia. Dengan demikian, ideologi diterima sebagai ajaran suci yang tidak bisa dibantah dan tertutup bagi ide dan realitas baru sehingga menjadi steril, kaku, dan tidak berkembang. Pengaruh ideologi sedemikian besarnya terhadap masyarakat sehingga, sebagai akibatnya, bisa terjadi manusia dikorbankan untuk ideologi, dan bukan ideologi untuk manusia.

BAB V

DEMOKRASI PANCASILA



A. Apa itu Demokrasi

Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah Perang Dunia II. Menurut penelitian UNESCO tahun 1949 disimpulkan bahwa “... untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh” (Mirriam Budiardjo, 2010: 105). Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem

politik non demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti: totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran.

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelebagaan dari kebebasan. Karena itu, mungkin saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.

Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. Karena itu, untuk memudahkan pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut.

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan.

- b. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional.
- c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mencukupi kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara.

B. Konsep Dasar Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos*” berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) demokrasi secara sederhana diartikan sebagai “*the government from the people, by the people, and for the people*”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di bawah ini adalah sejumlah pengertian demokrasi menurut para ahli :

1. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan yang mana dibentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Pengertian demokrasi menurut Charles Costello adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas oleh hukum dan budaya dalam melindungi masing-masing hak perorangan warga negara.

3. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan yang dilaksanakan dan diadakan dari rakyat dan bagi rakyat. Adapun terkait yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat sendiri yang telah dipilih oleh mereka rakyat sendiri setelah yakin kalau setiap keperluannya senantiasa mendapat perhatian pada aturan yang sudah atau akan disusun oleh wakil-wakil rakyatnya terkait penerapan kekuasaan negara.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman Yunani Kuno, tidak disebut lagi. Baru setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di dunia Barat sebelumnya. Dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas, mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Dewasa ini, bentuk demokrasi yang paling umum adalah demokrasi perwakilan. Para warganya memilih pejabat-pejabat untuk membuat keputusan politik yang rumit, merumuskan undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum. Atas nama rakyat, pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis,

membutuhkan waktu dan tenaga, yang sering tidak praktis bagi sebagian besar warga negara biasa.

Tim ICCE IUN (2003: 112) menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup. Bahwa demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya yakni budaya yang kondusif sebagai mind set dan setting sosial dan bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup. John Dewey (Zamroni, 2001: 31) menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan.

Ubaedilah (2013:68) Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar: pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*Government by the people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*Government for the people*), ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerinthan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

d.

Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang Demokrasi.

- a. Menurut Harris Soche
- b. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak, untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari pemaksaan.
- c. Menurut Henry B. Mayo

- d. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsipkesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik
- e. Menurut International Commission For jurist
- f. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.
- g. Menurut C.F.Strong
- h. Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan memepertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Berdasar pendapat-pendapat di atas, demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi.



C. Macam-macam Demokrasi

1. Macam-macam Demokrasi berdasarkan Fokus perhatiannya

- a. Demokrasi formal yakni demokrasi yang hanya berpusat pada bidang politik tanpa sama sekalipun meminimalkan kesenjangan politik.
- b. Demokrasi Material yaitu Demokrasi yang berpusat pada bidang ekonomi tanpa pengurangan pada kesenjangan politik.
- c. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi ini merupakan kombinasi dari demokrasi formal serta demokrasi material.

2. Macam-macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

- a. Demokrasi dengan langsung atau bahasa Inggrisnya direct democracy merupakan demokrasi yang dengan langsung mengikutsertakan rakyat terkait penentuan dan pemilihan keputusan tertentu kepada negara. Contohnya adalah pemilihan umum atau pemilu.
- b. Demokrasi tak langsung atau bahasa Inggrisnya Indirect Democracy : Demokrasi yang tidak langsung memasukkan semua rakyat sebuah negara pada penentuan suatu keputusan. Misalnya keputusan tertentu yang diadakan dan ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat misalnya DPRD DPD, DPR.

D. Ciri-ciri Demokrasi

Adapun ciri-ciri sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi ialah sebagaimana berikut ini.

1. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kehendak dan keperluan masing-masing rakyat atau seluruh rakyat.
2. Terdapat ciri konstitusional yaitu terkait kehendak kekuasaan maupun kepentingan rakyat yang disusun dan dicatat pada sebuah undang-undang negara.
3. Mempunyai ciri perwakilan yaitu Saat mengelola setiap kepentingan negara kedaulatan dan juga kekuasaan rakyat telah diwakili pada yang tadinya telah dipilih dan ditentukan dari rakyat itu sendiri.
4. Setiap aktivitas politik dilaksanakan dalam memilih Pihak mana yang hendak diamanahi untuk menjalankan roda pemerintahan.

Ciri kepartaian yaitu partai hanyalah suatu sarana dan media selaku unsur-unsur dan penerapan sistem demokrasi.



E. Prinsip Demokrasi

1. Kebebasan disepakati diakui dan disetujui oleh masing-masing warga negara.
2. Keikutsertaan setiap warga negara terkait pelaksanaan dan penentuan keputusan politik.
3. Kesetaraan masing-masing warga negara
4. Masing-masing warga negara memiliki kesetaraan dan kesamaan terkait praktek politik.



F. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Demokrasi

1. Kelebihan

- a) Kesamaan hak menyebabkan masing-masing masyarakat boleh ikut ambil bagian terkait sistem politik.
- b) Penerima kekuasaan ditentukan berdasarkan keinginan serta suara rakyat.
- c) Menghindari adanya monopoli kekuasaan

2. Kelemahan demokrasi

- a) Mudah goyahnya kepercayaan rakyat karena efek-efek yang bersifat negatif misalnya media yang tidak objektif atau subjektif terkait penyampaian informasi
- b) Dinilai tidak adil terkait kesamaan hak sebab menurut para ahli masing-masing orang memiliki pemahaman politik yang tidak sama persis.
- c) Fokus konsentrasi pemerintah yang masih menjabat menjadi berkurang, lantaran mendekati pemilihan umum selanjutnya.



G. Membangun Demokrasi

Terkait membangun demokrasi, negara kita ini sudah melalui berbagai masa transisi dari demokrasi semu yaitu masa orde baru menuju demokrasi yang sebenarnya. Pada dekade akhir-akhir ini negara telah merasakan mengalami kemajuan dalam hal berdemokrasi. Setiap Pimpinan lembaga negara setuju Kalau kunci sukses membangun demokrasi Indonesia ialah yaitu dengan makan empat pilar kebangsaan yakni:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. NKRI
4. Bhinneka Tunggal Ika.

Ini adalah pondasi negara kita perjuangan yang sangat keras dari *founding fathers*. Hasil perjuangan dan kerja keras Bapak pendiri bangsa ini sudah dikemukakan lewat menguatkan empat pilar tersebut kita mengharapkan supaya setiap Pimpinan lembaga negara mampu dan sanggup menyelesaikan dan mencari solusi setiap masalah-masalah yang sedang dialami oleh negara ini. Dari kita pastinya menginginkan segalanya bisa berlangsung secara seimbang hingga terjadinya situasi yang harmonis mengenai kehidupan berbangsa serta bernegara.

Peraturan sebaik apapun jika segenap pihak tidak mentaati dan mematuhi maka pada akhirnya ia tetap tidak jadi sempurna sementara peraturan yang sederhana namun para pihak mentaati serta mematuhi, maka peraturan tersebut akan jadi sempurna dan menimbulkan manfaat dan kemaslahatan umum. Negara kita benar-benar memerlukan suatu bentuk pemerintahan yang bersih

lewat pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercatat pada empat pilar kebangsaan tersebut.

Sehingga Sudah dirasa cukup dengan 4 pilar tersebut apabila segalanya mempraktekkannya dengan tulus dan baik dengan begitu bisa diyakini jika Indonesia nantinya akan berubah menjadi negara yang besar serta berdaulat secara penuh. Mengenai sebagian besar negara demokrasi modern era kini setiap rakyatnya tentu termasuk 1 kekuasaan yang berdaulat akan tetapi kekuasaan politiknya di laksanakan dengan tidak langsung lewat perwakilan atau DPR, perihal tersebut yang kemudian dinamakan dengan demokrasi perwakilan. Kemunculan konsep demokrasi perwakilan asalnya yaitu dari institusi alasan gagasan yang tumbuh seni rupa era pencerahan Renaissance serta Revolusi Perancis dan negara Amerika Serikat.

1. Penyalahgunaan Demokrasi

Demokrasi sendiri merupakan sistem yang terdapat pada pemerintahan di mana masing-masing warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang setara. demokrasi tentunya tidak memandang suku bangsa tidak memandang jenis kelamin dan serta tidak memandang mengenai kelompok Golongan atau status sosial. Sebab demokrasi artinya adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Mengenai sistem demokrasi rakyatlah selaku pemeran penting yang menjadi memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan. tidak ada suatu keputusan yang dapat ditetapkan oleh pihak pemerintahan tanpa disertai turut terlibatnya suara dari rakyat.

Adapun maksud dari demokrasi tersebut ialah agar bisa membentuk kedaulatan negara terhadap rakyat tujuan menjadikan pemerintahan yang legal atau sah dan diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Amerika Serikat merupakan negara yang bisa dikatakan paling demokrasi di dunia ini lewat sistem pemerintahannya. Disana, Amerika Serikat termasuk negara yang memiliki tingkat kebebasan paling tinggi terkait segala hal apapun. Sebagai permisalan saja amati kehidupan Amerika entah itu dari faktor ekonomi sosial dan juga budaya yang terdapat di sana. Dengan penguasaan pengetahuan demokrasi yang sudah berhasil pada pemerintahannya, Amerika Serikat kini mulai menyuarakan kepada seluruh penjuru dunia terkait paham-paham tersebut.

Saat ini Kita berkaca pada negara kita sendiri, apa sejauh ini Indonesia sudah berhasil mengamalkan demokrasi itu sendiri? Atau sudah seperti apa sistem demokrasi yang sudah di terapkan tersebut? Silahkan diskusikan dengan teman-teman mu!!



2. Penyelewengan Demokrasi

Kita bisa jadikan contoh pelaksanaan demokrasi yang sering terjadi ialah ketika diadakannya pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Acara tersebut kita lebih mengenalnya sebagai pesta demokrasi dengan rangka memilih pemimpin yang nantinya memimpin negara atau kepala daerah. Dalam proses berlangsungnya pesta demokrasi tersebut, berbagai macam-macam penyelewengan penyelewengan bukti kalau sistem demokrasi begitu buruknya jika diterapkan. Inilah sebagian penyelewengan yang kerap kali berlangsung dan ditemukan dalam besar demokrasi di Indonesia.

1. *Money politic*

Perihal tersebut termasuk suatu tradisi baru yang mana akan tetap berlangsung dan seterusnya proses. Dengan memanfaatkan situasi masyarakat kita ini yang sedang kekurangan uang, maka akan jadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Contohnya saja seorang calon pemimpin dengan mudah memberikan sejumlah uang atau berbagai bahan pokok untuk media menukar atau membeli suara rakyat itu.

2. *Intimidasi*

Hal ini Tentunya adalah metode yang benar-benar sangat Bahaya jika diterapkan. Sebagai contoh saja Ada sejumlah oknum dari salah satu pihak calon pemimpin yang mempraktekkan intimidasi kepada warga supaya memberikan suaranya kepada calon tersebut perihal ini amatlah tidak sejalan dengan peraturan pelaksanaan pemilu.

3. Pendahuluan ketika kampanye

Walaupun telah diperingatkan mengenai aturan proses pemilihan umum aturan yang meliputi proses pemilu seperti kampanye namun hal tersebut sudah termasuk penyelewengan demokrasi yang kerap kali dipraktekkan. Beragam cara dilakukan misalnya penyebaran baliho selebaran dan spanduk. Kerap kali juga ditemukan beberapa bakal calon pemimpin mengambil start duluan dengan cara mengadakan kunjungan ke sejumlah daerah.

4. Kampanye Negatif

Kampanye negatif ini dapat muncul sebab minimnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Perihal tersebut menyebabkan sejumlah masyarakat masih begitu kurang tahu menahu mengenai krusialnya media informasi. Sehingga cuma patuh dengan orang di sekeliling mereka yang jadi figurnya. Kampanye negatif bisa menjurus timbulnya fitnah yang bisa merusak integritas dari daerah itu disamping itu pula bisa terjadi isu-isu bertujuan menjatuhkan lawan politiknya.

H. Negara-negara Penganut Demokrasi



Demokrasi bisa juga dimaknai sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Ketika masa dahulu, saat sistem pemerintahan demikian rupanya menyulitkan setiap rakyat yang mana rakyat tidak begitu dipertimbangkan untuk mendukung sistem pemerintahan. Namun begitu ketika saat sekarang sejarah sudah mencatat kalau Demokrasi merupakan sistem politik yang paling banyak penerapannya di sejumlah negara seluruh dunia. sebab kita semua bisa dimaklumi jika Demokrasi merupakan suatu sistem yang transparan dan adil.

Waktu ke waktu telah bertambah banyak negara yang mengganti sistem pemerintahan mereka dengan sistem demokrasi. Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Hal ini disebabkan demokrasi dipertimbangan banyaknya jumlah rakyat yang dipunyai oleh sebuah

negara. Di bawah ini kami akan membahas sebagian negara-negara yang menganut sistem demokrasi terbesar di dunia.

1. India

India adalah negara dengan sistem demokrasi dengan jumlah penduduknya paling besar di dunia yaitu urutan nomor 2 yang menyebabkan negara ini termasuk negara demokrasi paling besar di dunia. Adapun sistem yang diadopsi India adalah sistem demokrasi liberal. Akhir-akhir ini atau tepatnya pada tahun 2014 Silam yang mengadakan pemilihan umum. Dapat kita bayangkan coba kondisi pemilu di sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Walaupun begitu proses berjalannya pemilu di sana benar terjaga dengan aman dan berlangsung secara karena sistem yang mereka pakai benar-benar efisien.

2. Amerika Serikat

Negara yang kerap kali dinamakan dengan Paman Sam merupakan penganur demokrasi paling tua dan juga lebih berpengalaman. Perjalanan demokrasi di sana hingga waktu sekarang ini sungguh baik dan sudah menjadi negara adikuasa. Di samping itu negara ini termasuk negara paling berpengaruh di dunia untuk saat ini. Jumlah peserta pemilu di sana kurang lebih dapat mencapai 250 juta jiwa yang menunjukkan bahwa betapa tingginya antusias masyarakat Amerika Serikat di sana.

3. Indonesia

Negara kita Indonesia bertambah berhasil saja ketika menerapkan mengadakan Pemilu. Dibuktikan ketika Pemilu terakhir

ini Indonesia bisa terbilang cukup aman tertib serta lancar walaupun tidak sepenuhnya dapat kita katakan baik apabila disamakan dengan negara India terkait sistem yang efisien. Namun begitu mengenai pergerakan politik setiap waktunya menjadi bertambah dan bertambah bagus. Di tahun 2014 saja jumlah partisipan yang terlibat pada pemilu yakni mencapai lebih dari 190 juta jiwa. Dan nantinya dapat diprediksikan pada Pemilihan selanjutnya, jumlah suara akan tetap bertambah terlebih lagi Sudah cukup banyak remaja yang sudah memasuki usia bisa ikut menyuarakan suaranya.

4. Brazil

Negara Brazil termasuk negara yang terbesar dan jumlah penduduknya amat tinggi di Benua Amerika Selatan. Brazil memiliki jumlah penduduk mencapai kurang lebih 200,000,000 jiwa. Mengenai hak suara pemilu bisa mencapai 140 juta jiwa. Pelaksanaan pemilihan umum di Brasil sendiri adalah 4 tahun sekali, beda halnya dengan Indonesia yang pelaksanaannya lima tahun sekali.

5. Pakistan

Pakistan adalah negara Islam yang memiliki jumlah penduduk paling banyak nomor 2 didunia sudah negara kita negara Indonesia Pakistan sendiri juga adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dan terbesar. Dengan urutan nomor 5. Intinya negara ini memiliki konsep pemerintahan republik Islam namun begitu terkait pelaksanaan pemilihan pemerintah masih memakai sistem demokrasi lewat pemilihan umum.

6. Nigeria

Nigeria adalah negara yang lokasinya berada di benua Afrika tepatnya di bagian barat Nigeria. negara yang termasuk ke dalam benua Afrika ini memiliki jumlah penduduk banyak. Negara ini sendiri memiliki konsep pemerintahan republik Federal Nigeria yang baru saja menerapkan pemilihan umum terakhir terjadi di tahun 2015 yang lalu. Yang mana pada penentuan di negara Nigeria diterapkan bertepatan dengan pemilihan presiden dan parlemen pemerintahan.

1) Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional, pancasila berfungsi sebagai berikut :

1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan memulai keputusan politik;
2. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. Nilai-nilai dari setiap sila pancasila, sesuai dengan ajaran demokrasi bukan ajaran Otoritarian atau totalitarian. Jadi, pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern antara lain :

a. Kedaulatan rakyat

Hal ini didasarkan pada bunyi pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yaitu "...yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik

indonesia yang berkedaulatan rakyat...."Kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi.

b. Republik

Hal ini didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang berbunyi "... yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia..."Republik berarti res publica Negara untuk kepentingan .

c. Negara berdasar atas Hukum

Hal ini didasarkan pada kalimat "...Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi ,dan keadilan sosial,..."Negara hukum indonesia menganut hukum arti luas atau materil.

d. Pemerintahan yang kostitusional

Berdasar pada kalimat "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu UUD negaraIndonesia..."UUD negara indonesia 1945 adalah konstitusi negara.

e. Sistem perwakilan

Berdasarkan sila ke IV pancasila,yaitu kerakyatan yang dipinpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

f. Prinsip Musyawarah

Berdasarkan sila ke IV Pancasila,yaitu kerakyatan yang yaitu kerakyatan yang dipinpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

g. Prinsip ketuhanan

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan, kebawah kepada rakyat dan di atas dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan.

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:

1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial
2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

2) Struktur Demokrasi

Disamping adanya nilai-nilai demokrasi, untuk terwujudnya sistem politik demokrasi dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. Menurut Budiarto (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan, lembaga-lembaga antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- b. Suatu Dewan Perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui Pemilu yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dwi partai, multi partai).
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

3) Pancasila Sebagai Etika Politik

a. Pengertian Etika

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan Etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai kehidupan manusia. Adapun etika khusus dibagi menjadi dua yaitu :

- Etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri
- Etika sosial merupakan kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat

b. Pengertian Politik

Politik berasal dari kata politic yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu yang diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara beberapa

alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih. Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, yang menyangkut peraturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada.

c. Pengertian etika politik

Etika politik yaitu pertanyaan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warganegara terhadap negara, hukum yang berlaku di negara itu. Adapun fungsi Etika politik dalam masyarakat yaitu:

- a. Penyedia alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara tanggung jawab.
- b. membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

Sedangkan prinsip dasar etika politik Pancasila adalah yaitu:

a. Pluralisme

Ialah kesediaan untuk menerima pluralitas artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat.

b. Hak asasi manusia

Ialah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan.

c. Solidaritas bangsa

Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasip sepenanggungan.

d. Demokrasi

Prinsip “ kedaulatan rakyat” yang menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksa orang lain tanpa kehendak atau keinginannya sendiri.

e. Keadilan sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat yang tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide yang tidak memiliki keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

4) Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide. Dalam pengertian sehari-hari idea disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam hal ini cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan/paham.

Pancasila sebagai ideologi yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang dapat mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang kongkrit dan operasional sehingga tidak menjadi slogan belaka. Dalam ketetapan MPR no XVIII/1998 menyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggara bernegara. Konsekuensi dari rumusan yang demikian berarti seluruh

pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan.

Perwujudan Ideologi Pancasila sebagai Cita-cita bernegara Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi indonesia 2020 maka dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut :

- a. Religius
- b. Manusiawi
- c. Bersatu
- d. Demokratis
- e. Adil
- f. Sejahtera
- g. Maju
- h. Mandiri
- i. Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara

Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan sejahtera pada prinsipnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai pancasila sebagai cita-cita bersama. Maka dengan begitu, bangsa atau masyarakat yang demikian adalah masyarakat madani indonesia (hamdan mansoer) 2003. Sebagai suatu cita-cita, maka nilai-nilai pancasila di ambil dimensi idealisme nya sebagai nilai-nilai ideal, penyelenggara negara

hendaknya berupaya bagaimana menjadikan kehidupan bernegara indonesia ini semakin dekat dengan nilai-nilai ideal tersebut.

Hubungan manusia dengan cita-citanya disebut dengan ideologi. Dalam konteks ini ideologi berisi seperangkat nilai, dimana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Ideologi yang pada mulanya berarti gagasan dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Dengan masalah ini, perlu diukemukakan beberapa pengertian ideologi, yaitu :

1. Partick Corbett, menyatakan bahwa ideologi sebagai setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta pengorganisasiannya seperangkat keyakinan mengenai sifat hakikat manusia dan alam yang ia hidup di dalamnya, suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen, dan suatu dambaan agar keyakinan-keyakinan tersebut di hayati dan pendirian itu di akui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan.
2. A.S Homby menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang memebentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang.
3. Soejono Soemargono menyatakan secara umum "ideologi" sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan,kepercayaan yang

menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang : politik, sosial, kebudayaan, dan agama.

4. Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
5. Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai sistem pemikiran dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka ,adapun ideologi tertutup adalah suatu pemikiran tertutup dan ideologi terbuka adalah suatu pemikiran yang terbuka.

Fungsi utama ideologi dalam masyarakat :

- Sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat.
- Sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat.

Perlu dikemukakan bahwa ideologi pancasila sebagai sebuah pemikiran sudah memenuhi sifat ideologi terbuka. Nilai yang terkandung didalam ideologi pancasila bukanlah nilai-nilai luar tetapi bersumber dari kekayaan rohani bangsa serta diterimanya nilai bersama itu adalah hasil kesepakatan warga bangsa bukan paksaan atau tekanan pihak lain. Lebih dari itu, nilai yang terkandung dalam pancasila adalah lima dasar yang sifatnya abstrak ,mendasar,garis besar,yang isinya tidak langsung bersifat operasional. Nilai-nilai dasar itu membutuhkan penjabaran yang khusus dalam prakter penyelenggaraan negara.

Sumber semangat yang menjadikan pancasila sebagai ideologi terbuka yang terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945.

Dikatakan bahwa “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok itu diserahkan kepada UU yang lebih muda caranya membuat, mengubah dan mencabut. Sehingga demikian ideologi pancasila merupakan nilai dasar ideologi yang bersumber dari kekuatan rohania bangsa dan dapat diterima menjadi dasar perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara sepanjang perjalanan bangsa sejak dari terbentuk sebagai bangsa dan dalam perjalanan perjuangan dan pembangunan bangsa.

BAB VI

KONSEP DASAR AGAMA DAN NEGARA

A. Konsep Dasar Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan, keyakinan yang mendasar dari dalam jiwa manusia. Agama sebagai ajaran moral dan spiritual selalu menjanjikan pemeluknya untuk meraih kebahagiaan. Maka, sebagai ciri yang dimiliki agama adalah fungsinya yang bersifat universal. Artinya, agama menanamkan kebahagiaan dan kedamaian sesama manusia, dan penganugerahkan kenikmatan yang tak terhingga, yaitu perjumpaan (*liqa*) dengan Tuhan.

Sayangnya, tidak semua manusia menyadari fungsi agama. Bahkan di negara-negara Barat yang sekuler, agama dipisahkan dari pemerintahan (kenegaraan). Di satu sisi mungkin ada baiknya, namun di sisi lain lebih banyak ketimpangannya. Seperti sejarah runtuhnya rezim komunis di Russia, Komunisme sudah tidak memiliki kekuatan sosial seperti sebelum runtuhnya Uni Soviet. Runtuhnya sosialisme-komunisme membuat sistem lain, yakni liberalisme-kapitalisme dan menjadi satu-satunya ideologi yang berjaya. Bahkan, sistem yang disebut sebagai musuh komunisme itu menguasai dunia hingga sekarang. Suatu komunitas masyarakat bila tanpa kendali moral agama, maka

tinggal menunggu keruntuhannya. Hanya nilai kebenaran yang didasarkan pada bimbingan wahyu Tuhanlah, yang dapat menyelamatkannya, yaitu dengan penegakan kebenaran sebagai lambang kemenangan.¹

Negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan juga bukanlah negara agama. Melainkan negara Indonesia adalah negara keberagamaan, Berdasarkan Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)". Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya".

Dengan ini seluruh masyarakat Indonesia boleh memilih kepercayaan apa yang akan dia anut. Namun jika kita tidak bisa bersikap pluralisme di negara ini, terkhusus dalam hal agama, maka konflik-konflik antar agama pun tidak bisa terelakkan. Misalnya konflik agama di Ambon (1999) antara preman Batu Merah yang beragama Muslim dengan supir angkot yang beragama Kristen. Yang kemudian menyebabkan pertikaian antar kelompok agama dan suku bangsa yang kemudian meledak menjadi kerusuhan yang besar di Ambon. Dari konflik ini kita bisa melihat sikap, terlalu sensitif dengan persoalan agama, tanpa

¹ Th Sumartana, Demokratisasi dalam Kehidupan Beragama (sebuah Refleksi), *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UNISIA*. No. 34/XIX/II. 1997, hlm. 29.

meneliti bagaimana kronologisnya terlebih dahulu agar kerusuhan tidak terjadi.

Maka dari itu kita perlu memahami betul bagaimana sikap beragama dalam keragaman agama di Indonesia. Dengan berpegang teguh pada Tuhan, bermoral, serta bersikap pluralisme.

B. Bentuk Realisasi konsep Agama di Indonesia

Realisasi suatu yang nyata, yang ada dalam kehidupan. Bentuk realisasi ini untuk mengatur keteraturan beragama, misalnya kelembagaan. Adapun beberapa lembaga keagamaan di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya konflik antar agama, dan juga untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. antara lain:

1. Islam : Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Kristen : Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)
3. Katolik : Konfensi Wali Gereja Indonesia (KWI)
4. Hindu : Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
5. Buddha: Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi)
6. Konghucu: Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin)

C. Konsep Dasar Negara

Apakah dasar negara Republik Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Landasan atau dasar itu harus kuat dan kokoh agar gedung yang berdiri di atasnya akan tetap

tegak sentosa untuk selama-lamanya. Landasan itu harus pula tahan uji terhadap serangan-serangn baik dari dalam maupun dari luar.

Keputusan PPKI menetapkan UUD 1945, yang didalam pembukaannya kita temukan dasr negara “pancasila”. Oleh karena itu, secara yuridis pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Akibat hukum dari disahkannya pancasila sebagai negara maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh pancasila. Landasan hukum pancasila sebagai dasar member akibat hukum dan filosofi, yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman pada pancasila. Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul berhubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD.

Oleh karena itu pancasila tercantum dalam UUD1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana tercantum jelas dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undang (ketetapan MPR, UU, peraturan pemerintah pengganti UU, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan lainnnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah RI haruslah sejiwa denngan Pancasila. Isi dan

tujuan dari peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari Pancasila.²

Negara Indonesia merupakan negara yang kehidupan masyarakatnya diatur UUD 1945, negara yang demokratis dimana Pancasila sebagai pedoman semua hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai konsep negara, sebagai wajah bahwa inilah Indonesia, yang memegang teguh kebersatuan dari berbagai keragaman. Sila-sila Pancasila saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena sila diatas akan mencakup semua sila-sila di bawah.

Maka dari itu konsep agama yang terdapat pada sila pertama “Ketuhanan yang maha Esa” merupakan sila yang mencakup semua sila di bawahnya. Dengan berkehidupan baik dan bermoral seperti yang diatur dalam masing-masing agama, maka sila-sila berikutnya dapat dengan mudah di terapkan.

D. Perlunya Pengetahuan Mendalam tentang konsep dasar Agama dan Negara

Bagaimana seseorang memimpin jika nilai religiusnya kurang? Jika nilai religiusnya kurang maka apa yang akan terjadi? Mungkinkah menyebabkan dampak buruk bagi rakyat yang dipimpinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali berada dibenak kita. Maka jawabannya adalah nilai religius merupakan pokok utama terciptanya pemimpin yang adil, yang mampu membuat perubahan. Karena pemimpin yang seperti itulah yang menerapkan kehidupan ber-ke-Pancasilaan. Begitu juga dengan

²Kansil dan Christine, *Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945*, cet-21, (Jakarta: Paradya Paramitha, juni 2003) hal.59

masyarakatnya, jika nilai spiritual dan pluralisme sudah melekat, Maka untuk menjalankan kehidupan sebagai warga negara yang baik akan berjalan dengan sendirinya.

Dalam konteks religius nilai Agama Islam contohnya bahwa pada dasarnya pendidikan dalam segala aspek membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bahwa ada symbol atau sosok yang menjadi sebuah suri tauladan sebagai acuan hidup dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan oleh islam sebagai agama paripurna tidak akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kecuali jika menyembah Allah semata. Dengan hanya menyembah Allah maka tujuan penciptaan manusia akan tercapai. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari firman-Nya,

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku” (adz-Dzariyaat:56)

Disamping dengan menyembah Allah untuk merealisasikan kebahagiaan dunia maupun akhirat, manusia harus melaksanakan beberapa hal yang sangat urgen berikut ini.

- Beriman kepada Allah dan malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, qadha dan qadar-Nya yang baik dan buruk.
- Mengikuti manhaj atau ajaran islam dalam menjalani kehidupan dunia. Manhaj dan ajaran islam ini mencakup berbagai hal, yakni menjalankan rukun islam, konsisten dengan nilai-nilai luhur, berlaku adil, bermusyawarah, berdakwah di jalan Allah, menajalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dan berjihad *fii sabilillah* demi menegakkan agama-Nya di muka bumi ini.

- Konsisten dengan seluruh petunjuk yang tercakup dalam ajaran islam, baik dalam masalah ibadah maupun dalam berinteraksi antar sesama, baik dalam sistem sosial, politik, maupun ekonomi. Semua itu juga harus sesuai dengan apa yang dipraktikkan Rasulullah Saw. Beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang hidup dalam tiga periode pertama dalam islam.
- Senantiasa mengikuti ijma' "consensus" orang-orang muslim yang saleh dan ijtihad orang-orang yang berilmu.

Dengan mengikuti semua hal di atas, maka manusia dapat dapat mencapai kebahagiaan kapan dan dimana saja mereka berada atau di dunia dan di akhirat. Semua ini merupakan hal yang pasti, karena manhaj yang diajarkan islam sesuai dengan semua masa dan semua tempat. Disamping itu bahwa ini merupakan hal yang aksiomatik bahwa islam datang untuk seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, dan warna kulit, kapan saja dan dimana saja pun mereka berada.

Muhammad Saw adalah penutup para Nabi, dakwah beliau ditujukan kepada seluruh ummat manusia untuk beriman kepada Allah. Sementara itu, dakwah para nabi sebelum beliau tidaklah bersifat universal untuk seluruh ummat manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qura'an.

"Katakanlah, Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan yang berhak disembah selain dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada

Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitabnya) dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk". (Al-A'raf:158).

Dapat disimpulkan bahwa beranjak dari ideologi dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, yang mana secara nilai-nilai yang di kandung oleh semua sila-sila yang ada pada pancasila tersebut menjadi sebuah tolak ukur yang mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti nilai Ketuhanan yang Maha Esa "bahwa semua masyarakat Indonesia secara universal harus memiliki kepercayaan atau lebih tepatnya harus menganut Agama. Yang mana agama tersebut harus diakui negara secara legal. Dengan mengamalkan nilai dasar yang terkandung pada Pancasila itu sudah berarti kita menjalankan konsep dasar Agama dan Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII

SEJARAH MAKNA LAMBANG GARUDA PANCASILA

A. Sejarah

Garuda, kendaraan (wahana) Wishnu tampil diberbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Suku dan Cetho dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka candi Wishnu yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Dicandi Siwa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung, Jatayu, mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkeraman Rahwana. Arca anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Wishnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda Jawa Kuno paling terkenal, ini arca ini disimpan di Museum Trowulan.

Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wishnu, Garuda juga memiliki sifat Wishnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai "Tuan segala makhluk yang dapat terbang" dan "Raja agung

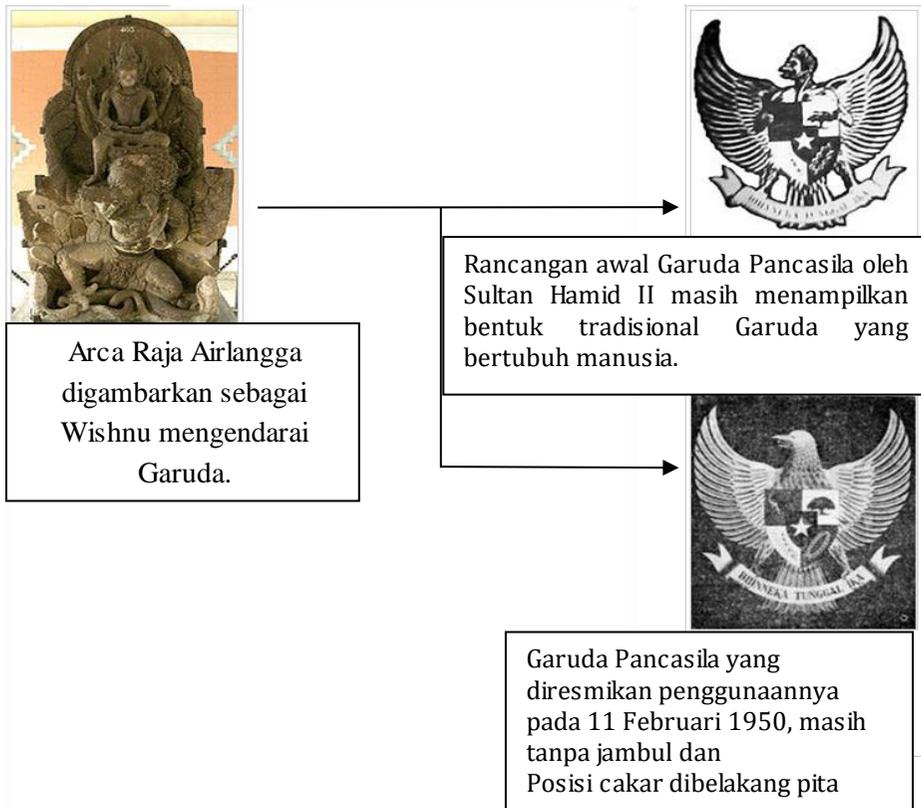
para burung. Di Bali ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh sayap, dan cakar elang tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia.

Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan, digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wishnu, atau dalam adegan pertempuran melawan Naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan ideologi Pancasila. Garuda juga dipilih sebagai nama mas kapai penerbangan nasional Indonesia Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.

Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara dibawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, MA Pelaupessy, MohNatsir, dan RMNg Poerba tjaraka sebagai anggota.

Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku "Bung Hatta Menjawab" untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambing negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang

diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M.Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Berikut gambaran Proses rancangan Garuda.



B. Perancang Garuda Pancasila

Perancang lambang negara Indonesia adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II menggambarkan lambang negara berupa seekor Burung Garuda berwarna emas dengan berkalungkan perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila dan mencengkeram seutas pita putih yang bertuliskan "BHINNEKA

TUNGGAL IKA". Lambang negara tersebut dirancang sejak Desember 1949, yaitu beberapa hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Untuk menseleksi lambang negara yang akan digunakan, maka dibentuklah Panitia Lencana Negara pada 10 Januari 1950. Pada saat itu, banyak usulan lambang negara yang diajukan kepada panitia. Dengan melalui beberapa proses, rancangan karya Sultan Hamid II diterima dan dikukuhkan sebagai lambang negara.

Sultan Hamid II dilahirkan pada tahun 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie dan meninggal pada 1978. Sultan Hamid II dilahirkan dari kesultanan Pontianak dan pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Kalimantan Barat serta menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio di era Republik Indonesia Serikat. Atas usul dari Soekarno dan berbagai organisasi lainnya, rancangan Sultan Hamid II tersebut disempurnakan sedikit demi sedikit. Pada Maret 1950, penyempurnaan sampai pada tahap finalisasi. Rancangan final tersebut mulai diperkenalkan kepada masyarakat sejak 17 Agustus 1950, dan sejak itu pula lambang tersebut digunakan. Pengesahan resmi lambang Negara Garuda Pancasila pada 17 Oktober 1951, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1951 yang dikeluarkan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo. Sedang tata cara penggunaannya diatur melalui PP No. 43 Tahun 1958.

Sejak tahun 1951, belum ada nama sah dari lambang negara tersebut, sehingga memunculkan banyak sebutan, diantaranya Garuda Pancasila, Burung Garuda, Lambang Garuda, Lambang

Negara atau hanya sekedar Garuda. Oleh sebab itu, pada 18 Agustus 2000, melalui amendemen kedua UUD 1945, MPR menetapkan nama resmi lambang negara. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36 A UUD 1945 yang disebutkan sebagai **Garuda Pancasila**. Nama tersebut sesuai dengan desain yang digambarkan pada lambang negara tersebut, yaitu Garuda diambil dari nama burung dan Pancasila diambil dari dasar negara Indonesia.

BAB VIII

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Pengertian Paradigma

Istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia Ilmu Pengetahuan (Soegito,2002:20). Secara terminologis, istilah ini dikembangkan oleh Thomas S.Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution* (1970: 49). Paradigma diartikan sebagai asumsi teoritis yang umum sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum, dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya,paradigma memiliki fungsi strategis dalam membangun kerangka berpikir dan strategi penerapannya sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat,ciri dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, kaelan (2010:225) menyimpulkan bahwa inti sari pengertian paradigma adalah satu asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan sumber nilai), sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat dinamis. Artinya, teori yang telah dibangun, mapan, dan diakui eksistensinya dalam

ilmu pengetahuan dapat mengalami perubahan sebagai akibat adanya temuan-temuan baru yang diperoleh melalui dunia penelitian. Apabila demikian, maka ilmuwan harus kembali pada asumsi-asumsi dasar atau asumsi-asumsi teoritis untuk mengkaji paradigma ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan kata lain, seorang ilmuwan harus mengkaji kembali dasar ontologis dari ilmu tersebut. Misalnya, suatu teori ilmu-ilmu social yang dibangun atas dasar hasil penelitian ilmiah (metode kuantitatif) yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat yang persial, terukur, korelatif dan positivistik tidak dapat dipertahankan karena teori itu secara epistemologis hanya dibangun atas dasar kajian satu aspek dari objek ilmu pengetahuan itu.

Oleh karena itu, para ilmuwan social boleh mengkaji kembali paradigma ilmu berdasarkan hakikat manusia. Dalam kenyataan objektifnya, manusia bersifat ganda, bahkan multidimensi. Oleh karena itu, tidak keliru apabila para ilmuwan social mengembangkan paradigma baru yang dibangun atas dasar metode kualitatif. Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang dan biasa di pergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan, misalnya, politik, hukum, ekonomi, budaya dan bidang-bidang ilmu lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari paradigma berkembang menjadi terminology yang mengandung pengertian sebagai: *sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolok ukur, parameter*, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan. Dengan

demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya.

B. Pancasila Sebagai Orientasi dan Kerangka Pembangunan Nasional

Wawasan kebangsaan sebagai suatu kekuatan dinamis dapat menggerakkan segenap potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur menuju Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya tidak dapat begitu mudah mengalami erosi, jika tidak oleh karena tingkah laku insan-insan itu sendiri yang merusaknya. *Founding Fathers* kita selalu menekankan membangun sebuah bangsa (*Nation and character building*) dari kemerosotan zaman colonial untuk dijadikan suatu bangsa yang berjiwa kuat dan tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dalam abad XX, juga pentingnya *self respect* kepada bangsa itu sendiri, menumbuhkan *self confidence* dan sanggup untuk berdikari (Roeslan Abdulgani dalam Rukiyati, 2008:130).

Saat ini Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme dari pada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan social-politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat (M.Sastrapratedja, 2001).

Sila pertama dan kedua mengandung imperative etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia dengan keluhuran martabatnya. Sila ketiga mengandung implikasi keharusan

mengatasi segala bentuk sektarianisme, yang berarti pula komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa. Sila keempat mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional: persamaan politis, hak-hak asasi manusia dan kewajiban kewarganegaraan. Dan sila kelima mencakup persamaan dan pemerataan.

Sila-sila Pancasila, yang bermuatan nilai-nilai Religius (sila ke-1), nilai-nilai Human (sila ke-2), nilai-nilai kebangsaan (sila ke-3), nilai-nilai Demokrasi (sila ke-4), dan nilai-nilai keadilan (sila ke-5), merupakan sebuah kesatuan organis, harmonis, dinamis, sebagai orientasi pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Keterpurukan bangsa Indonesia dalam bidang karakter yang kita rasakan dan kita alami hingga kini, mengharuskan kita *bac to basic* kepada nilai-nilai Pancasila yang sangat luhur dan kita banggakan itu.

Pancasila diharapkan dapat menjadikan matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan social-budaya. Ada dua fungsi dari Pancasila sebagai kerangka acuan (M. Sastrapratedja, 2001): *pertama*, Pancasila menjadi dasar visi yang memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial-budaya yang akan datang, membangun visi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang dan *kedua*, Pancasila sebagai nilai-nilai dasar menjadi referensi kritik sosial-budaya.

Visi diibaratkan sebagai suatu peta yang memberi petunjuk ke mana arah perjalanan kita. Visi masyarakat memberi arah kemana gerak dan langkah masyarakat kita. Nilai-nilai apa yang menjadi pedoman untuk melangkah ke masa depan. Visi dapat pula didefinisikan sebagai ekspresi terdalam akan apa yang kita

kehendaki, yang mengungkapkan isi ideal dan spiritual dari kodrat kita. Visi adalah impian yang terjadi saat kita jaga-impian mengenai keinginan kita mau menjadi apa? Ini adalah visi pribadi masing-masing. Visi suatu masyarakat adalah nilai-nilai yang dianggap paling penting, yang memberi corak khas pada tatanan sosial-budaya dan mewarnai perilaku seluruh anggota masyarakat. Visi itu dapat merupakan warisan dari para pendahulu, dapat pula merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh semua warga dan menjadi komitmen bersama.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan (Soegito, 2002:201). Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah: *"melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*.

Tujuan pertama merupakan manifestasi dari negara hukum formal. Sedangkan tujuan kedua dan ketiga merupakan manifestasi dari pengertian negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Sementara tujuan yang terakhir merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa bangsa yang hidup di tengah-tengah pergaulan masyarakat internasional. Secara filosofis, Pancasila sebagai pradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar, artinya setiap

pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apakah kita memiliki dasar dan alasan yang rasional menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional? Inilah persoalan yang perlu mendapat jawaban sebelum kita menggunakannya secara operasional.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dikembangkan atas dasar ontologis manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Oleh karena itu, baik buruknya pelaksanaan Pancasila harus dikembalikan kepada kondisi objektif dari manusia Indonesia. Apabila nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sudah dapat diterima oleh manusia Indonesia (nasional maupun empiris), maka kita harus konsekuen untuk melaksanakannya. Bahkan, kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan tolok ukur dalam setiap aktivitas bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi paradigma perilaku manusia Indonesia, termasuk dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.

Berkaitan dengan kenyataan di atas dan kondisi objektif bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi tolok ukur atau parameter dalam setiap perilaku manusia Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dikembalikan pada hakikat manusia yang "monopluralis". Berdasarkan kodratnya, manusia "monopluralis" memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) terdiri dari jiwa dan raga, (2) sebagai makhluk individu dan sosial, serta (3) sebagai pribadi dan makhluk Allah. Dengan demikian, pembangunan nasional harus dilaksanakan atas dasar hakikat "monopluralis". Pendek kata, baik buruknya dan

berhasil tidaknya pembangunan nasional harus diukur dari nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi hakikat manusia” monopluralis”.

Sebagai konsekuensi pemikiran di atas, maka pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak; raga jasmani; pribadi; sosial dan aspek ketuhanan yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau paradigma pembangunan nasional di berbagai bidang seperti politik dan hukum, ekonomi, hankam, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan beragama.

C. Pancasila Sebagai Paradigma dalam berbagai Kehidupan

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normative menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideology nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:

- a. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga
- b. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus social
- c. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigme dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ideologi

Ideologi adalah suatu kompleks ide-ide asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup (Driyarkara,1976). Dalam pengertian ini termuat juga pandangan tentang Tuhan, tentang manusia sesama, tentang hidup dan mati, tentang masyarakat dan negara dan sebagainya. Istilah manusia dan dunia mengandung arti bahwa manusia itu mempunyai tempat tertentu, mempunyai kedudukan tertentu, berarti mempunyai hubungan-hubungan itu, suatu ideologi bersifat hanya *diesseitig* (merembug kehidupan akhirat, mengakui adanya Tuhan, contohnya ideologi Pancasila).

Dalam rumusan di atas, ideologi bukanlah hanya pengertian. Ideologi adalah prinsip dinamika, karena merupakan pedoman (menjadi pola dan norma hidup) dan sekaligus juga berupa ideal atau cita-cita. Realisasi dari idea-idea yang menjadi ideologi itu dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi *realitas*, *idealitas* dan *fleksibilitas* (Pancasila sebagai ideologi terbuka) menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Ada perkembangan baru yang menarik berhubungan dengan dasar negara kita. Dengan kelima prinsipnya Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern (Ignas Kleden, 1988). Untuk mengatasi permasalahan di bidang politik, tidak ada jawaban lain kecuali bahwa kita harus mengembangkan sistem politik yang benar-benar demokratis (Mochtar Buchori (2001) dalam Rukiyati, 2008: 143). Demokratisasi merupakan upaya penting dalam mewujudkan *civil society*. Tanpa proses demokratisasi tidak akan tercipta *civil society*. Suatu masyarakat menjadi demokratis bukan karena memiliki institusi-institusi tertentu seperti lembaga perwakilan dan adanya pemilihan umum. Masyarakat menjadi demokratis kalau mewujudkan nilai-nilai inti demokratis (*core democratic values*).

3. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistik akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain.

Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

4. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab.

Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan social berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

5. Pancasila Sebagai Paradigma Pertahanan Keamanan

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak

hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

Pada saat ini Indonesia tengah berada pada era reformasi yang telah diperjuangkan sejak tahun 1998. ketika gerakan reformasi melanda Indonesia maka seluruh tatanan kehidupan dan praktik politik pada era Orde Baru banyak mengalami keruntuhan. Pada era reformasi ini, bangsa Indonesia ingin menata kembali (*reform*) tatanan kehidupan yang berdaulat, aman, adil, dan sejahtera. Tatanan kehidupan yang berjalan pada era orde baru dianggap tidak mampu member kedaulatan dan keadilan pada rakyat.

Reformasi memiliki makna, yaitu suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Apabila gerakan reformasi ingin menata kembali tatanan kehidupan yang lebih baik, tiada jalan lain adalah mendasarkan kembali pada nilai-nilai dasar kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar kehidupan yang baik itu sudah terkristalisasi dalam pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

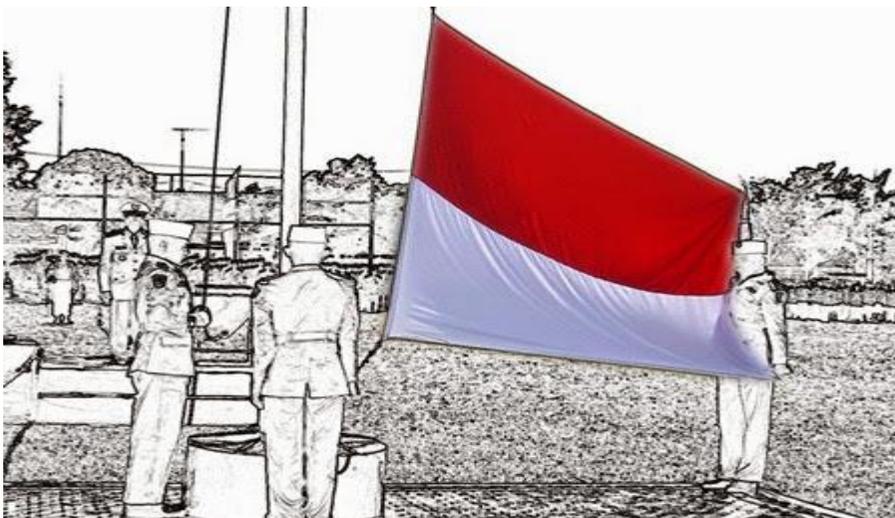
Oleh karena itu, pancasila sangat tepat sebagai paradigma, acuan, kerangka, dan tolok ukur gerakan reformasi di Indonesia. Dengan pancasila sebagai paradigma reformasi, gerakan reformasi harus diletakkan dalam kerangka perspektif sebagai landasan sekaligus sebagai cita-cita. Sebab tanpa suatu dasar dan tujuan yang jelas, reformasi akan mengarah pada suatu gerakan anarki, kerusuhan, disintegrasi, dan akhirnya mengarah pada kehancuran bangsa. Reformasi dengan paradigma pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebagai manusia makhluk tuhan.
- b. Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan yang luhur dan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- c. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Gerakan reformasi yang menghindarkan diri dari praktik dan perilaku yang dapat menciptakan perpecahan dan disintegrasi bangsa.
- d. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Gerakan reformasi bertujuan menuju terciptanya pemerintahan yang demokratis, yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
- e. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Perlu disadari bahwa ketidak adilanlah penyebab kehancuran suatu bangsa.

Lagu-Lagu Kebangsaan

Lagu lagu perjuangan Indonesia adalah musik yang diciptakan untuk tujuan nasional. lirik lagu wajib mengandung unsur-unsur yang dapat membangkitkan semangat perjuangan. Utamanya untuk para pejuang di masa penjajahan. Kemudian, lagu - lagu tersebut disebut lagu wajib karena guru-guru disekolah diharuskan mengajarkan lagu tersebut pada siswanya dengan tujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai dan mengingat jasa pahlawan serta meneladani semangat perjuangannya.

Lagu nasional diciptakan oleh komponis- komponis Indonesia yang hidup di masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Beberapa namanya mungkin pernah kita dengar seperti WR. Supratman, Ismail Marzuki, Kusbini C. Simanjuntak dan seterusnya. Nah, Berdasarkan Instruksi Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan no. 1 tanggal 17 Agustus 1959 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan diterbitkan oleh balai pustaka di tahun 1963



INDONESIA RAYA LAGU KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
Ciptaan : W.R. Supratman / Wage Rudolf Supratman

Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Disanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya,
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.

II

Indonesia, tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya,
Disanalah aku berdiri,
Untuk s'lama-lamanya.

Indonesia, tanah pusaka,
P'saka kita semuanya,
Marilah kita mendoa,
Indonesia bahagia.

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, Rakyatnya, semuanya,
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya,
Untuk Indonesia Raya.

III

Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti,
Disanalah aku berdiri,
N'jaga ibu sejati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi,
Marilah kita berjanji,
Indonesia abadi.

S'lamatlah rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya,
Majulah Neg'rinnya,
Majulah pandunya,
Untuk Indonesia Raya.

Refrain

Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, negriku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru

SYUKUR

Ciptaan : H. Mutahar

Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh
Akan karuniamu, tanah air pusaka
Indonesia merdeka
Syukur aku sembahkan, kehadiranMu Tuhan

Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh
Akan jasa usaha pahlawanku yang baka
Indonesia merdeka
Syukur aku hunjukkan ke bawah duli Tuhan

Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh
Akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata
Indonesia merdeka
Syukur aku hunjukkan ke hadapanMu Tuhan

INDONESIA PUSAKA

Ciptaan : Ismail Marzuki

Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap dipuja puja bangsa
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata

PADAMU NEGERI

Pencipta Lirik dan Lagu : Kusbini

Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdikan
Bagimu negeri jiwa raga kami

RAYUAN PULAU KELAPA – LIRIK LAGU WAJIB NASIONAL

Pencipta dan Pengarang Lagu / Lirik : Ismail Marzuki

Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa
Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur

INDONESIA TUMPAH DARAHKU

Ciptaan : IBU SUD

Di mana sawah luas menghijau
Di mana bukit biru menghimbau
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka yang kaya raya
Harum namanya Indonesia

Di mana puput berbunyi merdu
Di bawah gunung lembah yang biru
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka aman sentausa
Harum namanya Indonesia
Di mana nyiur melambai-lambai
Di mana padi masak mengurai
Tanah pusaka bahagia mulia
Harum namanya Indonesia

INDONESIA TUMPAH DARAHKU
Ciptaan : Ibu Sud

Di mana sawah luas menghijau
Di mana bukit biru menghimbau
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka yang kaya raya
Harum namanya Indonesia
Di mana puput berbunyi merdu
Di bawah gunung lembah yang biru
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka aman sentausa
Harum namanya Indonesia
Di mana nyiur melambai-lambai
Di mana padi masak mengurai
Tanah pusaka bahagia mulia
Harum namanya Indonesia

MAJU TAK GENTAR
Ciptaan : C. Simanjuntak

Maju tak gentar
Membela yang benar
Maju tak gentar
Hak kita diserang
Maju serentak
Mengusir penyerang
Maju serentak
Tentu kita menang

Bergerak bergerak, Serentak serentak
Menerkam menerjang terjang
Tak gentar tak gentar, Menyerang menyerang
Majulah majulah menang

SATU NUSA SATU BANGSA

Pencipta Lirik dan Lagu : L. Manik

Satu nusa
Satu bangsa
Satu bahasa kita
Tanah air
Pasti jaya
Untuk Selama-lamanya
Indonesia pusaka
Indonesia tercinta
Nusa bangsa
Dan Bahasa
Kita bela bersama

PAHLAWAN TANPA TANDA JASA

Pencipta Lirik dan Lagu : Sartono

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
Sebagai prasasti terima kasihku
Tuk pengabdianmu
Engkau sabagai pelita dalam kegelapan
Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan
Engkau patriot pahlawan pembangun insan cendikia

SELAMAT DATANG PAHLAWAN MUDA

Pencipta Lirik dan Lagu : Ismail Marzuki

Selamat datang pahlawan
Lama nian kami rindukan dikau
Bertahun bercerai mata
Kini kita dapat berjumpa pula

Dengarkan sorak gempita
mengiringi derap langkah perwira

Di Timur Matahari
Pencipta Lirik dan Lagu : W.R. Supratman

Di timur matahari mulai bercahaya bercahaya
Bangun dan berdiri kawan semua semua
Marilah mengatur barisan kita
Pemuda pemudi Indonesia

TERIMA KASIH KEPADA PAHLAWANKU
Ciptaan / Karya Musik dan Lagu : Hs. Mutahar

Kepadamu pahlawanku
Kepadamu pahlawanku
Kami terima kasih
Kami terima kasih
Kami terima kasih
Terima kasih
Kepadamu pahlawanku semua

HALO-HALO BANDUNG
Pencipta / Pengarang Lirik dan Lagu : Ismail Marzuki

Halo-halo Bandung
Ibukota periang
Halo-halo Bandung
Kota kenang-kenangan
Sudah lama beta
Tidak berjumpa dengan kau
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari bung rebut kembali

GARUDA PANCASILA

Pencipta / Pengarang Lirik dan Lagu : Sudharnoto

Garuda Pancasila
Aku-lah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju

DARI SABANG SAMPAI MERAUKE

Pencipta / Pengarang Lirik dan Lagu : R. Suharjo

Dari Sabang sampai Merauke
Berjajar pulau-pulau
Sambung menyambung menjadi satu
Itulah Indonesia
Indonesia tanah airku
Aku berjanji padamu
Menjunjung tanah airku
Tanah airku Indonesia

BERKIBARLAH BENDERAKU

Ciptaan : Ibu Sud

Berkibarlah benderaku
Lambang suci gagah perwira
Di seluruh pantai Indonesia
Kau tetap pujaan bangsa
Siapa berani menurunkan engkau
Serentak rakyatmu membela
Sang Merah Putih yang perwira
Berkibarlah s'lama lamanya
Kami rakyat Indonesia
Bersedia setiap masa
Mencurahkan segenap tenaga
Supaya kau tetap cemerlang

Tak goyang jiwaku menahan rintangan
Tak gentar rakyatmu berkorban
Sang Merah Putih yang perwira
Berkibarlah s'lama lamanya

HARI MERDEKA / 17 AGUSTUS 1945
Karangan / Ciptaan : H. Mutahar

Tujuh belas agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari Merdeka Nusa dan Bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia
merdeka . . .
S'kali merdeka tetap merdeka
Selama hayat masih dikandung badan
Kita tetap setia tetap sedia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap sedia
Membela negara kita

INDONESIA TETAP MERDEKA
Ciptaan : C. Simanjuntak

Sorak sorak bergembira
Bergembira semua
Sudah bebas negri kita
Indonesia merdeka
Indonesia merdeka
Republik Indonesia
Itulah hak milik kita
Untuk s'lama lamanya

RAYUAN PULAU KELAPA
Ciptaan : Ismail Marzuki

Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa

Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala
Reff:
Melambai lambai
Nyiur di pantai
Berbisik bisik
Raja Kelana
Memuja pulau
Nan indah permai
Tanah Airku
Indonesia

IBU KITA KARTINI

Karangan / Ciptaan : W.R. Supratman

Ibu kita Kartini
Putri sejati
Putri Indonesia
Harum namanya
Ibu kita Kartini
Pendekar bangsa
Pendekar kaumnya
Untuk merdeka
Wahai ibu kita Kartini
Putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya
Bagi Indonesia
Ibu kita Kartini
Putri jauhari
Putri yang berjasa
Se Indonesia
Ibu kita Kartini
Putri yang suci
Putri yang merdeka
Cita-citanya
Wahai ibu kita Kartini
Putri yang mulia

Sungguh besar cita-citanya
Bagi Indonesia
Ibu kita Kartini
Pendekar bangsa
Pendeka kaum ibu
Se-Indonesia
Ibu kita Kartini
Penyuluh budi
Penyuluh bangsanya
Karena cintanya
Wahai ibu kita Kartini
Putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya
Bagi Indonesia
Ibu kita Kartini
Putri sejati
Putri Indonesia
Harum namanya

GUGUR BUNGA

Pengarang / Pencipta Lagu : Ismail Marzuki

Betapa hatiku takkan pilu
Telah gugur pahlawanku
Betapa hatiku takkan sedih
Hamba ditinggal sendiri
Siapakah kini plipur laraNan setia dan perwira
Siapakah kini pahlawan hati
Pembela bangsa sejati
Reff :
Telah gugur pahlawankuTunai sudah janji bakti
Gugur satu tumbuh sribuTanah air jaya sakti
Gugur bungaku di taman hatiDi hari baan pertiwi
Harum semerbak menambahkan sari
Tanah air jaya sakti

MENGHENINGKAN CIPTA

Karangan / Ciptaan : T. Prawit

Dengan seluruh angkasa raya memuji
Pahlawan negara Nan gugur remaja diribaan bendera
Bela nusa bangsa
Kau kukenang wahai bunga putra bangsa
Harga jasa Kau Cahya pelita
Bagi Indonesia merdeka

BANGUN PEMUDI PEMUDA

Karangan / Ciptaan : A. Simanjuntak

Bangun pemudi pemuda Indonesia
Tangan bajumu singsingkan untuk negara
Masa yang akan datang kewajibanmu lah
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas Tak usah banyak bicara trus kerja
keras
Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih
Bertingkah laku halus hai putra negri
Bertingkah laku halus hai putra negri

DAFTAR PUSTAKA

- A Ubaedillah. 2003. *Pancasila, demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta:kencana Prenadamedia Group.
- Abdulgani, Ruslan, *Pancasila dan Reformasi; Makalah Seminar nasional KAGAMA*, Jogjakarta: Seminar, 1998.
- Adi Prasetyo, Stanley dan Olle Tornquist, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto* (Jakarta: Demos, 2003).
- Althusser, Louis, *Tentang Ideologi: marxisme strukturalis, psikoanalisis, cultural studies* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008).
- Barker, Chris, *Cultural Studies, teori dan praktik*, Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Berger, P.L, *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty*, New York: Basic Books, 1998.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, 2016. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- A. Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Rakyat.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1978.
- Faturahman, Deden & Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Gatara, Asep Sahid dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung: Fokusmedia, 2016.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Held, David, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan*, London: Polity Press, 1995.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti Press, 1997.
- Ismatullah, Deddy, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Seta, 2007.

- Jurnal, *What is Democracy?*, terj. Budi Prayitno, Deplu USA, 2001.
- Kansil dan Christine Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.
- Kusumaatmadja, Moctar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum International*, Bandung: Alumni, 2003.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mansoer, Hamdan, *Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Dirjen Dikti.
- Marpaung, Ginda Tua, *Sindrom Ancaman Sistem Politik Demokrasi*, Jakarta: Democratic System, 2005.
- Marx, Karl, *The Germany Ideology*, Londong: Lawrence & Wishart, 1970.
- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3S, 1989.
- MTI, *Good Governancedan Penguatan Institusi Daerah*, Jakarta: MTI dan AusAID, 2000.
- Nisjar, Karhi S., *Beberapa Catatan tentang "Good Governance"*, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Jakarta: Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, 1997, Vol. 1, No.2.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta:Pantjuran Tudjuh, Noer, Deliar, 1975.
- O'Donnell, Guillermo, *Transition from Authoritarian Rule Comparative Persepectives*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1986.
- Oppenheim, *international Law*, Vol. 1,8 th ed, 1995.
- Parma, SP., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Rahayu, Ani Sri, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Rochman , Ganie, good governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik) (Jakarta: Komnas HAM, 2000.
- Rosyada, Dede, et al., *Pendidikan Kewargaan: Demokras, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

- Rudy, Teuku May, SH, MA, MIR, *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung. PT. Eresco, 1993.
- S. Sumarsono dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Saleh, Sarbaini. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Citapustaka Media Perintis.
- Santosa, Kholid O, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*, Yogyakarta: Segarsy, 2004.
- Sanusi, A. 2006. *Meneropong Sepuluh Pilar Demokrasi Indonesia*, Syaifullah. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. (Menyambut 70 tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri). Bandung: Laboratorium PKN FPIPS UPI.
- Tim ICCE UIN. 2013. *Pendidikan Kewargaan. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- Usiono. 2007. *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

TENTANG PENULIS



Dr. Eka Susanti, M.Pd Lahir tanggal 26 Mei 1971 di Palembang, Sumatera Selatan. Merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari Pasangan M.Sihombing dan Yusnimar, SD Tammat Tahun 1984, SMP Tammat Tahun 1987, dan SMA Tamat Tahun 1990. Gelar sarjana S-1 diperoleh dari IKIP Negeri Medan Fakultas PIPS Jurusan PMP-KN tahun 1995. Gelar Magister Pendidikan diperoleh dari Universitas Negeri Padang Program Studi PIPS konsentrasi Antropologi/sosiologi tahun 2001. Kemudian gelar Doktor diperoleh dari Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi IPS.

Karirnya dimulai dari tahun 1993 sebagai pegawai honorer tetap di bagian keuangan IAIN SU. Tahun 1994 diangkat menjadi PNS dan sebagai staff dibagian keuangan tahun 1997 menjadi staff bagian akademik di fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan. Tahun 2001 menjadi tenaga pengajar di Fakultas Tarbiyah dan tahun 2002 menjadi tenaga educatif. Tahun 2004 sampai 2009 menjadi kepala laboratorium program D-II di Fakultas Tarbiyah IAIN SU. Kemudian tahun 2009 menjadi sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika. Dan saat ini sebagai Ketua Jurusan Pendidikan IPS Fak. Ilmu Tarbiyah Dan dan Keguruan UIN SU Medan.



Toni Nasution, M.Pd Merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Maradian Nasution dan Masnila Harahap. Penulis lahir pada tanggal 12 Maret 1991 di kelurahan Palopat Maria, kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Hp. 085361305340. Alamat Email Penulis: toniandrionasution@gmail.com. Sekolah Dasar diselesaikan tahun 2004, Madrasah Tsanawiyah tahun 2007, Madrasah Aliyah tahun 2010 di Padangsidempuan-Tapanuli Selatan, kemudian menyelesaikan kuliah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah strata satu (S-1) tahun 2015, menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) Program Studi Pendidikan IPS meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2017.

Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ittihadiyah (STIT) Labuhanbatu Utara kemudian dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Selain mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kampus UIN Sumatera Utara Medan penulis juga sebagai guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Kepala Sekolah di SMP Islam Terpadu Al-Afkari Desa Baru dusun III Kec. Batang Kuis.

Karya Penulis yang sudah terbit berupa Jurnal Ijtimaiyah Prodi Tadris IPS Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan, kemudian memiliki karya buku yang berjudul Konsep Dasar IPS yang diterbitkan oleh penerbit Samudra Biru Jakarta. Penulis pernah mengikuti Pelatihan Praktik Baik Pembelajaran Untuk Guru SMP/MTS Sekolah

Mitra UMSU dan UIN SU Oleh Tanoto Foundation pada 2-5 November 2018, kemudian pernah sebagai Penulis Artikel pada *International Conference UIN SU Medan (Indonesia-Malaysia) Tentang Counseling Psychology & Education initiatives meet the callanges of the industrial Revolution 4.0*. Pada tanggal 24-25 November 2018 yang berjudul (Inovasi Pembelajaran Pancasila Era Milenial) dan mengikuti International Conference and Seminar dengan tema *The Innovative Strategy Of Guidance Counselling at School and Madrasah in Industrial Age 4.0 Context*. Pada tahun Pada 31 September 2019.

Adapun aktivitas organisasi yang pernah diikuti penulis seperti Pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selaku Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah UIN SU Medan periode 2014-2015, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PGMI, Ketua Ikatan Alumni Pesantren Baharuddin, Ketua Umum Perhimpunan Pemerhati Pendidikan Sumatera Utara (P3SU), Sekretaris Umum DPP PEMAPASID, Ketua Umum Persatuan Pendidikan IPS Indonesia. Ketua Umum Lembaga Pusat Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Demokrasi (LP4D) serta pernah menjadi Pengurus Pemuda Al-Ittihadiyah Prov. Sumatera Utara.

TENTANG EDITOR



PARIDA HARAHAAP, M.Si dilahirkan di Gunung Tua pada tanggal 27 Agustus 1992 Putri dari pasangan Bapak Yusuf Harahap dan Ibu Nur Annisa Siregar. Editor menamatkan pendidikan di TK YPIPL pada tahun 1999, setelah itu melanjutkan pendidikan ke SD Negeri Gunung Tua dan lulus tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs. Pesantren Modern Baharuddin dan lulus tammat 2008 kemudian melanjutkan pendidikan ke MAs. Pesantren Modren Baharuddin dan lulus tahun 2011. Kemudian di tahun 2011 editor memasuki Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Prodi Pendidikan Matematika dan lulus Strata Satu (S-1) tahun 2015. Pada tahun 2016 editor melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Matematika Universitas Sumatera Utara.

Editor memiliki pengalaman kerja pernah mengajar di sekolah SMP tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 pernah mengajar sebagai guru Matematika di SD AL-Jamaiyah Medan dan sekarang bekerja sebagai tenaga pendidik atau Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan.